2024

Laporan Kinerja

Biro Perencanaan & Organisasi

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INFRASTRUKTUR DIPLOMASI KUAT untuk DIPLOMASI HEBAT

Kata Pengantar

Melalui Infrastruktur Diplomasi, Biro Perencanaan dan Organisasi berkomitmen untuk memperkuat fondasi yang mendukung pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia.

Yulastiawarman
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami persembahkan Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan laporan ini mengacu pada regulasi utama, yaitu Keputusan Menteri Luar Negeri No. 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Organisasi telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan yang selaras dengan Peta Strategis Tahun 2024, sebagai pedoman dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan (SK) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK), Perjanjian Kinerja tahun ini mengukur capaian kinerja pada indikator yang strategis, serta upaya perbaikan dan inovasi yang dilaksanakan di setiap unit.

Sebagai salah satu pilar pendukung di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri, penyusunan LKj ini bertujuan untuk memastikan bahwa Biro Perencanaan dan Organisasi senantiasa memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menjadi bagian integral dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai sarana refleksi dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan *tagline* **"Infrastruktur Diplomasi Kuat untuk Diplomasi Hebat,"** Biro Perencanaan dan Organisasi berkomitmen untuk memperkuat fondasi yang mendukung pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia. Infrastruktur diplomasi yang dimaksud meliputi aspek kelembagaan, perencanaan dan evaluasi kinerja & anggaran, serta tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global. Dengan infrastruktur diplomasi yang kokoh, Kementerian Luar Negeri dapat semakin meningkatkan efektivitas, daya saing, dan kredibilitas diplomasi Indonesia di kancah internasional.

Laporan ini tidak hanya menggambarkan capaian kinerja, tetapi juga mencerminkan langkah-langkah yang diambil dalam rangka penguatan manajemen kinerja, termasuk optimalisasi Indikator Kinerja, guna mengukur kinerja Kementerian Luar Negeri secara konkret sebagai pelaksana politik luar negeri Republik Indonesia. BPO terus mengupayakan penguatan organisasi, perbaikan tata laksana, serta reformasi internal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung peran strategis Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi sesuai dengan prioritas politik luar negeri Indonesia 4+1, yaitu diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta peran Indonesia di tingkat regional dan global.

Kami berharap Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024 ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, serta menjadi landasan bagi peningkatan kualitas kinerja organisasi di masa mendatang, baik bagi Biro Perencanaan dan Organisasi secara khusus maupun bagi Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Yulastiawarman

Daftar Isi

Kata Pengantar	02
Daftar Isi	04
Daftar Tabel	06
Daftar Gambar	09
Ringkasan Eksekutif	13

» Pendahuluan

Latar Belakang	21
Tugas dan Fungsi	21
Struktur Organisasi	22
Aspek Strategis	23

» Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	26
Perjanjian Kinerja	28

» Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja	32
Nilai Capaian Kinerja Organisasi	34
Stakeholder Perspective	35
Customer Perspective	79
Internal Business Process Perspective	95
Learning and Growth Perspective	117
Realisasi Anggaran	134
Analisis Efisiensi Sumber Daya	135
Capaian Kinerja Lainnya	143

» Penutup

Simpulan Umum Capaian Kinerja	156
Kendala-Kendala Utama yang Dihadapi	157
Langkah di Masa Mendatang untuk Peningkatan Kinerja	158

» Lampiran

Daftar Tabel

Tabel III.1 Capaian Kinerja BPO Tahun 2024	32
Tabel III.2 Hasil Penajaman Indikator *Road Map* RB 2020-2024	39
Tabel III.3 Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi	41
Tabel III.4. Capaian IK S1.1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	44
Tabel III.5. Target, Realisasi, dan Capaian IK S1. 1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	45
Tabel III.6. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	59
Tabel III.7. Capaian IK S1.2 Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu	60
Tabel III.8. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023 dan 2024	61
Tabel III.9. Target, Realisasi, dan Capaian IK S1. 2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	62
Tabel III.10. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi dan Perwakilan RI	63
Tabel III.11. Bobot Komponen, Unsur dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	67
Tabel III.12. Pembobotan Komponen dan Area Manajemen Risiko Indeks (MRI)	69
Tabel III.13. Pembobotan Pilar dan Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	70
Tabel III.14. Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	71
Tabel III.15. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	72
Tabel III.16. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	72
Tabel III.17. Capaian IK S1. 3 Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2024	73
Tabel III.18. Target, Realisasi, dan Capaian IK S1. 3 Tingkat Maturitas SPIP	73
Tabel III.19. Capaian IK C1.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	80
Tabel III.20. Target, Realisasi, dan Capaian IK C1.1 Indeks Kepuasan Layanan BPO	82
Tabel III.21. Komponen dan Bobot Penilaian AKIP	88
Tabel III.22. Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2023/2024	89
Tabel III.23. Capaian IK C2. 1 Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	90
Tabel III.24. Target, Realisasi dan Capaian IK C2. 1 Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	91
Tabel III.25. Capaian IK B1. 1 Jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan Predikat ¨Sangat Baik¨ (BB)	98
Tabel III.26. Target, Realisasi dan Capaian IK B1. 1 Jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan Predikat ¨Sangat Baik¨ (BB)	99
Tabel III.27. Capaian IK B1.2 Persentase Alokasi Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Memiliki Catatan Blokir pada Halaman IV DIPA	103
Tabel III.28. Target, Realisasi, dan Capaian IK B1.2 Persentase Alokasi Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Memiliki Catatan Blokir pada Halaman IV DIPA	104
Tabel III.29. Capaian IK B1.3 Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI	107
Tabel III.30. Target, Realisasi, dan Capaian IK B1.3 Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI	108
Tabel III.31. Capaian IK B2.1 Persentase Analisis terkait Organisasi yang Dimanfaatkan	111
Tabel III.32. Target, Realisasi, dan Capaian IK B2. 1 Persentase Analisis Terkait Organisasi yang Dimanfaatkan	113

Tabel III.33. Capaian IK L1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPO	119
Tabel III.34. Nilai Komponen IK L1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Perencanaan dan Organisasi	120
Tabel III.35. Target, Realisasi, dan Capaian IK L1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPO	121
Tabel III.36. Target, Realisasi, Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi	123
Tabel III.37. Perubahan Target dan IK Baru pada PK Kepala BPO Tahun 2024	125
Tabel III.38. Capaian IK L2. 1 Persentase Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi	131
Tabel III.39. Target, Realisasi, dan Capaian IK L2. 1 Persentase Realisasi Anggaran BPO	132
Tabel III.40. Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2024 per Jenis Belanja	135
Tabel III.41. Pagu dan Realisasi Anggaran Rincian *Output* atas Indikator Kinerja yang Didukung	137
Tabel III.42. Monitoring Efisiensi SBK untuk RO yang Dikelola oleh BPO	139
Tabel III.43. Pemenuhan Formasi Pegawai Berdasarkan Kebutuhan Organisasi	140
Tabel III.44. Penerimaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024	142

Daftar Gambar

Gambar III.1. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Sekretariat Jenderal, Pembahasan tentang Peningkatan Nilai RB General Kementerian Luar Negeri (Jakarta, 5 Maret 2024)	56
Gambar III.2. Pertemuan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam rangka dukungan terkait RB dan Pelayanan Publik, di Kantor Kementerian PANRB (Jakarta 20 Maret 2024)	56
Gambar III.3. Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu Tahun 2024 bersama Asdep Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia serta Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (8 Agustus 2024).	56
Gambar III.4. *Workshop* Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu Tahun 2024 (Jakarta 2-5 September 2024)	57
Gambar III.5. Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kepmenlu tentang Pedoman Sistem Kerja dalam rangka Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (Bogor, 6-7 September 2024)	57
Gambar III.6. Rapat Evaluasi Terhadap 28 Indikator RB General Tahun 2024, Penetapkan Lokus Evaluasi RB Tahun 2025 dan Penginputan Terhadap Portal RB (Bandung, 25-28 September 2024)	57
Gambar III.7. Pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam rangka konsolidasi penerapan RB di lingkungan Kementerian Luar Negeri (Jakarta, 4 Oktober 2024)	57
Gambar. III.8. Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia mewakili Kementerian Luar Negeri telah berpartisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2024 dan mendapat penghargaan sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Predikat "Pelayan Prima" (Jakarta, 8 Oktober 2024)	57
Gambar III.9. *Workshop* Reviu Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 -2024 dan Persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 (Jakarta, 13 November 2024)	57
Gambar III.10. Direktorat Konsuler mewakili Kementerian Luar Negeri telah berpartisipasi dalam proses Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI dan meraih Peringkat 3 dengan nilai 93,27 (Jakarta, 14 November 2024)	58
Gambar III.11. Heru H. Subolo, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat di Luar Negeri sedang menerima Penghargaan Peringkat 3 Penganugerahan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Jakarta, 14 November 2024)	58

Gambar III.12. Sosialisasi dan *Sharing Knowledge* Kebijakan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI (Semarang, 26 November 2024)	58
Gambar III.13. Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri dan seluruh Pejabat Eselon I (Jakarta, 5 Februari 2024)	66
Gambar III.14. Kegiatan Pembahasan Indikator dan Target RPJMN 2025-2029 serta Sinkronisasi Target Kinerja Pusat dan Perwakilan RI Tahun 2024 (Bogor, 19-23 Maret 2024)	66
Gambar III.15. Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2023 dan Triwulan I TA 2024 serta Bimbingan Teknis Perencanaan dan Monev Kinerja (Jakarta, 22-25 April 2024)	66
Gambar III.16. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Tematik Nasional Berdimensi Hubungan Luar Negeri yang Diampu oleh Kemenlu s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan Sosialisasi Kepmenlu Juknis Penyusunan dan Pengelolaan *Data Economic Intelligence* (DEI) Perwakilan RI (Jakarta, 9-11 September 2024)	66
Gambar III.17. Pelaksanaan Internalisasi dan Bimtek SPIP MR Terintegrasi serta Persiapan PM, PK, EM, SPIP Terintegrasi Kemenlu 2024 (Bogor, 14-16 Maret 2024)	78
Gambar III.18. Rapat *entry meeting* dengan BPKP dalam Penyusunan Maturitas SPIP Terintegrasi Kemenlu Tahun 2024 (Jakarta, 3 Mei 2024)	78
Gambar III.19. Kegiatan Rapat Koordinasi Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK), dan Evaluasi Maturitas (EM) SPIP serta Sosialisasi Aplikasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024 (Bogor, 28 Mei – 1 Juni 2024)	78
Gambar III.20. Kegiatan Rapat Koordinasi Finalisasi Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 pada Aplikasi *e-Integrity* SPIP (Bogor, 27-28 Juni 2024)	78
Gambar III.21. Pelaksanaan *Training of Trainers* (ToT) Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (MR) di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Jakarta, 26-30 Agustus 2024)	78
Gambar III.22. Keikutsertaan BPO dalam Kegiatan Forum Kebijakan Publik Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu (Jakarta 8 Agustus 2024)	86
Gambar III.23. Keikutsertaan BPO dalam *Workshop* Penyusunan Standar Pelayanan Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 (Jakarta 2-5 September 2024)	86
Gambar III.24. Keikutsertaan BPO dalam Sosialisasi Kebijakan dan *Sharing Knowledge* Pelayanan Publik (Semarang 26 November 2024)	86
Gambar III.25. Kegiatan Penyusunan Konsep Awal Teknokratik Renstra Kemenlu 2025-2029 (Bogor 22-24 Januari 2024)	94
Gambar III.26. Kegiatan Finalisasi Revisi Permenlu No. 4 Tahun 2018 dan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rensta Kemenlu 2025-2029 (Bandung, 26-28 Februari 2024)	94
Gambar III.27. Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Sekretariat Jenderal (Jakarta, 5 Maret 2024)	94
Gambar III.28. Kegiatan Forum Koordinasi Perencanaan Kinerja Diplomasi dalam rangka pembahasan *cross-cutting* kinerja K/L dengan Kemenlu pada program dan kegiatan yang berdimensi politik luar negeri (Jakarta, 14-16 Juli 2024)	94
Gambar III.29. Sekretariat Jenderal Memperoleh Penghargaan sebagai Peringkat Kedua atas Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Eselon I Kementerian Luar Negeri Tahun 2023/2024 (Jakarta, 10 September 2024)	94
Gambar III.30. Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu (Jakarta, 26-28 Maret 2024)	102
Gambar III.31. Pemutakhiran Penjenjangan Kinerja Kementerian Luar Negeri pada Aplikasi AKSI (Jakarta, 25-26 dan 28 November 2024)	102
Gambar III.32. Rapat Koordinasi Satker Sampling dalam Rangka Persiapan Tindak Evaluasi AKIP Kemenlu 2024 (Jakarta, 26 November 2024)	102
Gambar III.33. Rapat Koordinasi Proses Pemindahan Infrastruktur dan Data CAWI dari STIS BPS ke Kementerian Luar Negeri (Bandung, 18- 20 Januari 2024)	106
Gambar III.34. Pendampingan BPO dalam Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Luar Negeri RI dan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI (Jakarta, 5 Juni 2024)	106
Gambar III.35. Rapat Koordinasi Penelaahan dan Reviu RKA K/L Alokasi Anggaran TA 2025 (Bogor, 2-4 Oktober 2024)	106
Gambar III.36. Bimbingan Teknis Penyusunan Renja-K/L dan RKA-K/L Perwakilan RI TA 2025 di (Kreo, 3-14 Juni 2024)	110
Gambar III.37. Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran untuk Perwakilan RI (Bandung, 21-24 Agustus 2024)	110
Gambar III.38. Rapat Pembahasan Usulan Kenaikan Gaji Pegawai Setempat (Jakarta, 2 September 2024)	110
Gambar III.39. Rapat Evaluasi Penerapan FSR dan Dampak Revisi Anggaran Terhadap Penerapan FSR (Batam, 19-21 September 2024)	110
Gambar III.40. Kegiatan *Focus Group Discussion* Arah Kebijakan Luar Negeri dalam rangka Penyusunan Postur Diplomasi Indonesia 2045 (Bandung, 19-22 Juni 2024)	116
Gambar III.41. Rapat Panitia Antar Kementerian dan Non-Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Perwakilan RI (R-Perpres OPRI), (Jakarta, 24 Juni 2024)	116
Gambar III.42. Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kepmenlu tentang Pedoman Sistem Kerja dalam rangka Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (Bogor 6-7 September 2024)	116

Gambar III.43. Rapat Finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Bandung, 31 Oktober – 3 November 2024)	116
Gambar III.44. Rapat Konsolidasi dan Pemutakhiran Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), (Jakarta, 5-6 Desember 2024)	116
Gambar III.45. Dialog Kinerja Organisasi BPO Triwulan I Tahun 2024 (Jakarta, 2 Januari 2024	128
Gambar III.46. Dialog Kinerja Organisasi BPO Triwulan II Tahun 2024 (Jakarta, 2 Juli 2024)	128
Gambar III.47. Keikutsertaan BPO dalam Kegiatan Penyusunan Muatan Informasi Kinerja dan Anggaran dalam KRISNA RENSTRA 2025-2029 (Depok, 12-14 September 2024)	128
Gambar III.48. Dialog Kinerja Organisasi BPO Triwulan III Tahun 2024 (Jakarta, 17 September 2024	128
Gambar III.49. Keikutsertaan BPO dalam Kegiatan Sosialisasi Aplikasi AKSI Kementerian Luar Negeri hasil pengembangan Interkoneksi aplikasi AKSI dengan MONSAKTI (Jakarta, 6-8 November 2024)	128
Gambar III.50. Dialog Kinerja Organisasi BPO Triwulan IV Tahun 2024 (Jakarta, 12 November 2024)	128
Gambar III.51. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) Tahun 2024 (Depok, 22 November 2024	129
Gambar III.52. Keikutsertaan BPO dalam Kegiatan Pembahasan Pemutakhiran Penjenjangan Kinerja Kemenlu, Es I dan Penjenjangan Kinerja Satuan Kerja Es II (Jakarta, 25-26 dan 28 November 2024)	129
Gambar III.53. Penghargaan Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai Peringkat Ketiga Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon II Kementerian Luar Negeri Tahun 2023/2024 dengan Nilai 80,25 dan Kategori A (Jakarta, 10 September 2024)	129
Gambar III.54. Keikutsertaan BPO dalam Kegiatan Pra Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Sampai Dengan Triwulan (TW) IV TA 2024 (Depok, 9-12 Desember 2024)	129
Gambar III.55. Dialog Kinerja Organisasi BPO Awal I Tahun 2025 (Jakarta, 7 Januari 2025)	129
Gambar III.56. Kehadiran Presiden RI, Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 (Rio De Janeiro, Brazil, 18 November 2024)	152
Gambar III.57. Kehadiran Menteri Luar Negeri, Sugiono dalam G-7 *Foreign Affairs Ministers Meeting Outreach Session With Indo-Pacific Partners* (Fiuggi-Anagni, Italia, 25-26 November 2024)	152

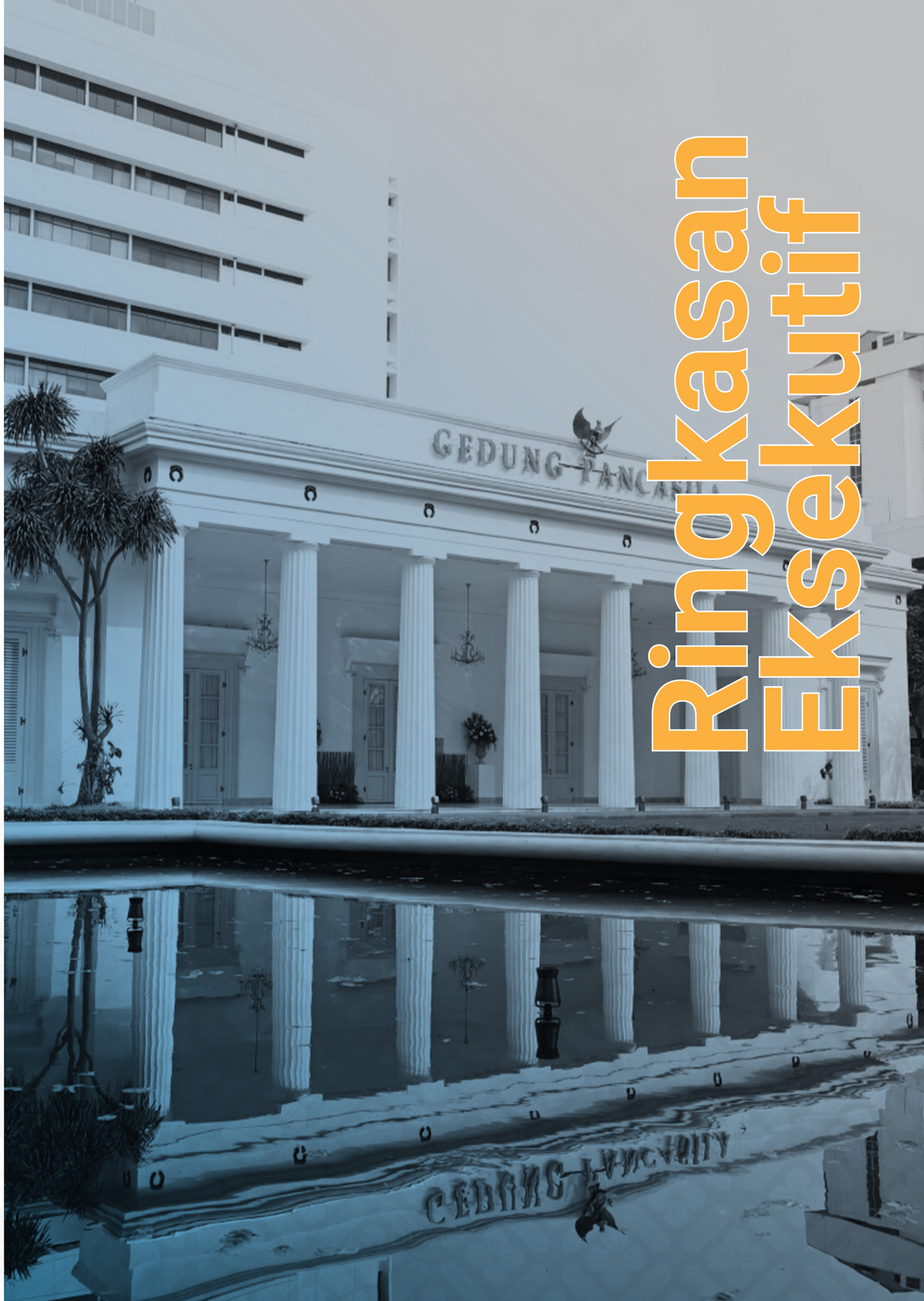

Ringkasan Eksekutif

Capaian IK :

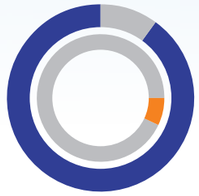

10 dari **11** IK
tercapai melebihi target

1 dari **11** IK
tercapai Optimal

Realisasi Anggaran :

Biro Perencanaan dan Organisasi berhasil menyerap

100%

dengan optimal yaitu
realisasi sebesar **Rp.15.522.690.520**
dari pagu anggaran sebesar **Rp.15.522.702.000**

NCKO 2024 » **106,25 (Istimewa)**

Terobosan/penghargaan/inisiatif strategis :

- Penyederhanaan Struktur Organisasi **(PSO)**
- Upaya penyelesaian Rancangan **Peraturan Presiden tentang Organisasi Perwakilan RI** (R-Perpres OPRI)
- Penyusunan **Peraturan Presiden** No. 150 Tahun 2024 **tentang Kementerian Luar Negeri**
- Penyusunan Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2024 **tentang Perubahan atas Peraturan Presiden** No. 65 Tahun 2019
- Penjajakan pembukaan **Perwakilan RI di Chengdu**
- Penjenjangan **kinerja *Cross Cutting*** dengan penyusunan Pohon Kinerja
- Pengembangan **Aplikasi AKSI** dengan interkoneksi Monitoring SAKTI (MONSAKTI) dan penjajakan interkoneksi dengan e-kinerja BKN
- Penerapan ***Reward and Punishment*** alokasi anggaran kepada seluruh unit organisasi

Highlight Kinerja :

- Pelaksanaan rencana aksi **RB General & Tematik** dengan **predikat A-**
- **Nilai Evaluasi AKIP** Kementerian Luar Negeri dengan **predikat A**
- **Tingkat Maturitas SPIP** Kementerian Luar Negeri mencapai **level 3**
- **Nilai Evaluasi AKIP** Sekretariat Jenderal dengan **predikat A**
- **Peningkatan jumlah unit organisasi** yang memiliki nilai Evaluasi AKIP dengan **predikat BB**
- **Minimalisir alokasi anggaran** blokir Kemeterian Luar Negeri
- **Minimalisir** jumlah **revisi anggaran** unit organisasi
- Pemanfaatan **analisis organisasi** oleh pimpinan
- **Nilai Evaluasi AKIP BPO** dengan **predikat A**
- **Realisasi anggaran** 2 tahun berturut-turut mencapai **100%**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, capaian kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi untuk Tahun 2024 **mencapai nilai sebesar 106,25**. Angka capaian kinerja tersebut merupakan akumulasi perhitungan capaian program kegiatan dari 4 (empat) *Perspective* dimaksud dengan pembagian bobot sebagai berikut: (1) *Stakeholder Perspective* dengan bobot 25% memberikan kontribusi capaian sebesar 103,08; (2) *Customer Perspective* dengan bobot 15% memberikan kontribusi capaian sebesar 98,02; (3) *Internal Business Process Perspective* dengan bobot 30% memberikan kontribusi capaian sebesar 116,48; dan (4) *Learning and Growth Perspective* dengan bobot 30% memberikan kontribusi capaian sebesar 102,79.

Adapun perbandingan NCKO selama periode Renstra adalah:

Nilai Capaian Kinerja Organisasi

2020	2021	2022	2023	**2024**
99,78	100,27	98,80	100,40	106,25

Dengan capaian kinerja per perspektif sebagai berikut

Stakeholder Perspective

Bobot Perspektif **25%**
Skor Perspektif **103,08**

Customer Perspective

Bobot Perspektif **15%**
Skor Perspektif **98,02**

Total NCKO » **106,25 (Istimewa)**

Internal Business Process Perspective

Bobot Perspektif **30%**
Skor Perspektif **116,48**

Learning and Growth Perspective

Bobot Perspektif **30%**
Skor Perspektif **102,79**

Dalam rangka mendukung Program Dukungan Manajemen di Kementerian Luar Negeri yang merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Infrastruktur Diplomasi yang Kuat, BPO sebagai pengampu tugas penataan organisasi Kemenlu berkomitmen untuk melaksanakan amanat penyederhanaan birokrasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) sesuai dengan Permen PANRB No. 20 Tahun 2018 pada tahun 2024.

Selain itu, sebagai upaya untuk menata kelembagaan Perwakilan RI, BPO masih terus mengupayakan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Perwakilan RI (R-Perpres OPRI) dengan melaksanakan koordinasi lebih lanjut antara Kemenlu, Kementerian PANRB, Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dengan harapan agar tahap penyusunan R-Perpres OPRI dapat memasuki harmonisasi pada tahun 2025.

Dalam rangka tindak lanjut atas transisi pemerintahan dengan ditetapkannya pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih dan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, BPO bersama dengan unit organisasi terkait dan Kementerian PANRB telah menyusun Peraturan Presiden No. 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri yang telah diundangkan pada 5 November 2024.

Guna menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden No. 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri, BPO bersama unit organisasi terkait tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Saat ini dapat disampaikan bahwa penyusunan naskah telah diselesaikan dan disampaikan kepada Kementerian PANRB untuk selanjutnya dapat dilaksanakan pembahasan lebih lanjut.

BPO bersama dengan unit organisasi terkait dan Kementerian PANRB telah menyusun Peraturan Presiden No. 150 Tahun 2024 dalam rangka tindak lanjut atas transisi pemerintahan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih.

Terkait peningkatan hubungan bilateral Kemenlu cq BPO tengah mengoordinasikan pembukaan Perwakilan RI di Chengdu. Upaya pembukaan Perwakilan RI di Chengdu pada Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui pembahasan dengan Perwakilan RI Beijing, unit organisasi terkait, Kementerian PANRB, Setkab dan Setneg serta Surat Menteri PANRB tentang Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembukaan Perwakilan RI di Chengdu.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan birokrasi yang berkelas dunia sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) 2020 – 2024. Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan rencana aksi RB General dan Tematik lebih dari sangat baik, dibuktikan dengan Indeks RB Kementerian Luar Negeri yang meningkat terus menerus dan pada tahun 2023 mencapai nilai 81.55 dengan predikat A- kategori memuaskan dengan catatan. Nilai tersebut dituangkan ke dalam nilai evaluasi RB Tahun 2024 dikarenakan sampai LKj ini dibuat hasil nilai evaluasi RB Tahun 2024 belum dirilis dari Kemen PANRB.

Sebagai upaya pencapaian implementasi SAKIP di Kemenlu, selama 5 (lima) tahun BPO selalu melakukan koordinasi dengan pihak eksternal maupun internal di lingkungan Kemenlu guna penyelarasan perencanaan kinerja organisasi dengan sasaran strategis dalam penjenjangan kinerja *cross cutting* dengan menyusun pohon kinerja pada tingkat Pusat dan Perwakilan, menyusun Kepmenlu No. 27/B/PR/08/2024/01 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan sebagai perubahan revisi ketentuan sistem manajemen kinerja Kemenlu, serta selalu melakukan reviu struktur informasi kinerja pada Rincian *Output* - Klasifikasi Rincian *Output* (RO-KRO) sebagai penyesuaian Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

BPO juga mengembangkan Aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi (AKSI) dari tahun ke tahun termasuk melakukan interkoneksi data Monitoring SAKTI (MonSAKTI) dan penjajakan interkoneksi data dengan e-kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kinerja individu di tahun 2024. AKSI tersebut merupakan alat bantu pengukuran nilai capaian kinerja di lingkungan Kemenlu yang berfungsi juga sebagai alat monitoring dan evaluasi dalam mencapai tujuan jangka panjang.

Terkait anggaran, selama 5 (lima) tahun terakhir, BPO berupaya untuk terus meningkatkan kinerja anggaran Kementerian Luar Negeri secara menyeluruh. Penurunan realisasi terjadi pada tahun 2020 dimana pandemi *Covid-19* berdampak pada serapan anggaran dengan realisasi sebesar 95,36%. Setelahnya, kinerja anggaran perlahan membaik dengan realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar 96,04%, tahun 2022 sebesar 97,18% dan tahun 2023 sebesar 98,23%.

Pemberlakuan mekanisme *Reward and Punishment* anggaran menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja anggaran Unit Organisasi Kementerian Luar Negeri. *Reward and Punishment* dapat diberlakukan pada tahun berkenaan dan/atau pada tahun perencanaan. Pada tahun perencanaan, *reward and punishment* dilakukan dengan penyesuaian distribusi anggaran atas dasar pencapaian kinerja dan realisasi anggaran unit organisasi bersangkutan. Adapun pada saat tahun berjalan, dalam hal terjadi kebijakan penghematan anggaran seperti penghematan perjalanan dinas pada TA 2024, unit organisasi yang realisasi anggarannya belum maksimal mendapatkan angka penghematan yang lebih besar.

Pemberlakuan mekanisme *Reward and Punishment* anggaran menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja anggaran unit Organisasi Kementerian Luar Negeri

Sejak Tahun 2022, Kementerian Luar Negeri c.q BPO bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) menyusun kajian penyesuaian besaran Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN). Kajian dimaksud menjadi basis utama dari usulan Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Keuangan untuk penyesuaian besaran ADTLN yang terakhir kali dilakukan pada tahun 2010. Kajian mengadopsi kerangka penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, dengan menghitung Indeks Kemahalan Luar Negeri (IKLN) untuk mengukur tingkat kemahalan biaya konsumsi di masing-masing kota tempat Perwakilan berkedudukan. Penyesuaian besaran ADTLN pada akhirnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2024 dan berlaku efektif sejak tanggal 16 Agustus 2024.

Terkait dengan Fasilitas Sewa Rumah (FSR), telah terbit Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 11 Tahun 2023 tentang FSR bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang ditetapkan di akhir Tahun 2023 dan diterapkan sejak tahun 2024.

BPO menjadi anggota dari Forum FSR, yang beranggotakan Biro SDM, BPO, BHAKP, BUM, Rokeu, dan Itwil dimana Forum bertujuan menghasilkan rekomendasi yang berisi persetujuan/penolakan penyewaan Fasilitas kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro SDM. Tim Forum FSR telah bekerja sejak awal tahun 2024 dan memberikan sejumlah rekomendasi persetujuan atas usulan FSR yang diterima dari Perwakilan RI. Dari pelaksanaan FSR selama satu tahun, terdapat catatan penyempurnaan atas peraturan maupun proses bisnis FSR kedepannya yang dapat ditindaklanjuti di tahun 2025.

Adapun implementasi penganggaran Pengarusutamaan Gender (PUG), BPO sebagai koordinator dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dan anggaran di Kementerian Luar Negeri turut mendukung implementasi rencana aksi PUG dengan mengikutsertakan dan memfasilitasi Tim Pokja PUG dalam Kegiatan Bimtek Penyusunan Renja dan RKA-K/L seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenlu sebagai *reviewer* dalam penyusunan *Gender Action Budget* (GAB) dan *tagging* Anggaran Responsif Gender (ARG) di dokumen perencanaan dan penganggaran pada unit organisasi masing-masing serta menghimbau unit organisasi Pusat dan Perwakilan RI untuk menyajikan capaian kegiatan yang mengusung PUG di Laporan Kinerja masing-masing unit organisasi.

Dalam mendukung target kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi pada Tahun 2024 sesuai alokasi pagu anggaran sebesar Rp.15.522.702.000,-, telah terealisasi anggaran sebesar Rp.15.522.690.520,- (100%) per 31 Desember 2024.

Kaleidoskop BPO 2024

Pendahuluan

01

- Latar Belakang
- Tugas dan Fungsi
- Struktur Organisasi
- Aspek Strategis

Latar Belakang

Dalam rangka implementasi salah satu asas dalam penyelenggaraan *good governance* yaitu akuntabilitas, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Disamping itu untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi, termasuk Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Luar Negeri, diharapkan dapat menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan di setiap akhir tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja BPO berdasarkan Kepmenlu No. 27/B/PR/08/2024/01 Tahun 2024 dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014.

Untuk memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik serta wujud tanggung jawab atas pencapaian kinerja, Biro Perencanaan dan Organisasi telah melakukan penyusunan atas Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Organisasi selama Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri No. 27/B/PR/08/2024/01 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024 ini berisi realisasi dan tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi berikut capaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang kemudian ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Tugas dan Fungsi

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi kinerja dan anggaran, kelembagaan dan tata laksana, serta reformasi birokrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

1. Koordinasi perencanaan serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
2. Koordinasi penataan organisasi dan tata kerja serta pelaksanaan kebijakan kelembagaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
3. Koordinasi penataan tata laksana dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
4. Koordinasi penyusunan panduan dan pedoman kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi untuk kinerja dan anggaran, kelembagaan, tata laksana, serta reformasi birokrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
5. Pelaksanaan layanan manajemen Biro.

Struktur Organisasi

Secara umum gambaran mengenai struktur organisasi BPO berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Bagian Perencanaan Kinerja Kementerian dan Perwakilan terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah I;
b. Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah II;
c. Subbagian Perencanaan Kinerja Wilayah III. dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Kementerian dan Perwakilan terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah I;
b. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah II;
c. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Wilayah III. dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Evaluasi Kinerja Kementerian dan Perwakilan terdiri atas :

a. Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah I;
b. Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah II;
c. Subbagian Evaluasi Kinerja Wilayah III. dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelembagaan Kementerian dan Perwakilan terdiri atas:

a. Subbagian Organisasi Kementerian;
b. Subbagian Organisasi Perwakilan Wilayah I;
c. Subbagian Organisasi Perwakilan Wilayah II. dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Kementerian dan Perwakilan terdiri atas:

a. Subbagian Ketatalaksanaan Kementerian dan Perwakilan;
b. Subbagian Refomasi Birokrasi Kementerian dan Perwakilan;
c. Subbagian Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Biro. dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional.

Aspek Strategis

Biro Perencanaan dan Organisasi merupakan unit organisasi setingkat Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program kerja, evaluasi kinerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Biro Perencanaan dan Organisasi telah mengidentifikasi beberapa aspek strategis organisasi yang bersifat mendukung maupun menghambat pelaksanaan tugas dan fungsinya. Aspek strategis yang dimiliki Biro Perencanaan dan Organisasi dapat dinilai melalui analisa SWOT yang merupakan *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan) dan *Threats* (ancaman). Analisa SWOT ini sangat diperlukan dalam rangka memproyeksikan berbagai keberhasilan dengan melihat kondisi-kondisi obyektif, Biro Perencanaan dan Organisasi secara keseluruhan. Analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dapat diuraikan sebagai berikut :

> **Analisis SWOT digunakan BPO untuk melihat kondisi obyektif dalam memproyeksikan keberhasilan.**

Strengths (kekuatan)

Biro Perencanaan dan Organisasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus mengedepankan profesionalisme, efisien, efektif, selektif, koordinatif, dan komprehensif dalam pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya.

S

Weaknesses (kelemahan)

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai *supporting unit*, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Biro Perencanaan dan Organisasi secara kuantitatif dirasa masih kurang memadai untuk mencapai sasaran-sasaran secara efektif dan efisien.

W

Opportunities (peluang)

Proses benah diri dan restrukturisasi Kementerian Luar Negeri konsisten dilaksanakan sehingga menjadi peluang bagi Biro Perencanaan dan Organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja yang mengedepankan profesionalisme.

O

Threats (ancaman)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Organisasi menghadapi ancaman yang berasal dari faktor eksternal yaitu perubahan pada ketentuan maupun kebijakan yang ada. Faktor-faktor eksternal tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sasaran-sasaran perencanaan serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan sasaran yang telah disusun dan ditetapkan.

T

Potensi/Peran Strategis

Peran strategis BPO adalah mengkoordinasikan isu-isu kinerja dan anggaran dalam tataran organisasi Kementerian Luar Negeri

Biro Perencanaan dan Organisasi memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan isu – isu kinerja dan anggaran dalam tataran organisasi Kementerian Luar Negeri. Biro Perencanaan dan Organisasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus mengupayakan profesionalisme, efisien, efektif, selektif, koordinatif, dan komprehensif dalam pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Organisasi menginternalisasi nilai- nilai profesional, integritas, manfaat, proaktif, inovatif, dan nilai kejuangan. Dalam upaya restrukturisasi dan proses benah diri pada Kementerian Luar Negeri, maka Biro Perencanaan dan Organisasi terus melakukan upaya peningkatan kinerja menuju profesionalisme seperti yang diharapkan.

Permasalahan utama (*strategic issue*)

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar Bagian di Biro Perencanaan dan Organisasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang efektif dan efisien. Meskipun secara kualitatif SDM yang tersedia cukup memadai, namun secara kuantitatif masih kurang memadai khususnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai *Supporting Unit*. Dengan adanya peluang untuk membenahi diri secara terus menerus, Biro Perencanaan dan Organisasi perlu meng-*capture* peluang ini dengan meningkatkan kapasitas SDM dan menambah sarana prasarana yang mendukung pencapaian sasaran kinerja. Ancaman yang mungkin terjadi adalah adanya perubahan eksternal yang akan mengakibatkan sasaran- sasaran perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tidak dapat dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan.

» Rencana Strategis
» Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Organsasi

Perencanaan Kinerja

02

Rencana Strategis

Rencana strategis BPO yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang telah disusun dengan memperhatikan kesesuaian visi dan misi Menteri Luar Negeri, dirancang untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan jangka panjang (2020-2024) yang memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif.

KEMENLU

Visi

Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

Misi

a. Memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal melalui hubungan luar negeri untuk mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
b. Memberikan pelindungan WNI/BHI di luar negeri yang prima sebagai upaya pelindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
c. Menjaga integritas NKRI yang bersinergi bersama dengan Pemerintah Pusat serta Daerah dan meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional
d. Memajukan kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di dunia internasional
e. Meningkatkan infrastruktur diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk mendukung peningkatan kualiltas manusia Indonesia

SETJEN

Visi

Menjadi Penggerak Utama Infrastruktur Diplomasi yang Kuat, Mewujudkan Diplomasi yang Aktif dan Efektif

Misi

a. Memperkuat Tata Kelola Organisasi Kemenlu.
b. Menyediakan Layanan Setjen Kemenlu yang Efisien.
c. Membangun Sumber Daya Manusia Kemenlu yang Kompeten dan memiliki *Values* (Nilai-Nilai Kemenlu yaitu PIMPIN).
d. Mengelola Barang Milik Negara Kemenlu Secara Tepat Guna, Efektif, Efisien, dan Akuntabel.
e. Membangun Sistem Informasi TIK Kemenlu yang Terintegrasi dalam Rangka Mewujudkan Transformasi Digital Kemenlu.
f. Mengelola Anggaran Kemenlu secara Akuntabel Berdasarkan Prinsip *Value for Money*.

BPO

Visi

Terwujudnya Perencanaan dan Organisasi Kemenlu yang efektif

Misi

a. Memperkuat perencanaan kinerja dan anggaran
b. Memperkuat penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
c. Meningkatkan kualitas laporan dan evaluasi kinerja

Program: Dukungan Manajemen
Kegiatan: Pengelolaan Organisasi
Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik

Dalam rangka mewujudkan tujuan jangka panjang (2020-2024) yaitu "Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik", maka BPO juga menyusun indikator kinerja yang setiap tahunnya mengalami penyesuaian yang tepat sasaran.

2020	2021	2022	2023	2024
• Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.	• Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.	• Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.	• Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.	• **Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.**
• Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu.	• Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu.	• Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu.	• Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu.	• **Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu.**
-	-	-	-	• **Tingkat Maturitas SPIP**
-	-	• Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi.	• Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi.	• **Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi.**
• Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal.	• Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal.	• Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal.	• Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal.	• **Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal.**
• Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal.	• Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal.	• Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal.	• Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART Sekretariat Jenderal.	-
-	-	• Jumlah Unit Eselon 1 dan Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran min. 92.	• Jumlah Unit Eselon 1 dan Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran min. 92.	-
• Jumlah Unit Organisasi Kementerian dan Satker Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal "Sangat Baik" (BB).	• Jumlah Unit Organisasi Kementerian dan Satker Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal "Sangat Baik" (BB).	• Jumlah Unit Organisasi Kementerian dan Satker Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal "Sangat Baik" (BB).	• Jumlah Unit Organisasi Kementerian dan Satker Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal "Sangat Baik" (BB).	• **Jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal "Sangat Baik" (BB).**
• Persentase alokasi yang memiliki catatan blokir pada halaman IVA DIPA.	• Persentase alokasi yang memiliki catatan blokir pada halaman IVA DIPA.	• Persentase alokasi yang memiliki catatan blokir pada halaman IVA DIPA.	• Persentase alokasi yang memiliki catatan blokir pada halaman IVA DIPA.	• **Persentase alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri yang memiliki catatan blokir pada halaman IV DIPA.**
• Indeks Revisi Anggaran Satker Kementerian dan Perwakilan.	• Indeks Revisi Anggaran Satker Kementerian dan Perwakilan.	• Indeks Revisi Anggaran Satker Kementerian dan Perwakilan.	• Indeks Revisi Anggaran Satker Kementerian dan Perwakilan.	• **Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI.**
-	-	• Persentase Analisis Terkait Organisasi yang Dimanfaatkan	• Persentase Analisis Terkait Organisasi yang Dimanfaatkan	• **Persentase Analisis Terkait Organisasi yang Dimanfaatkan**
• Nilai AKIP BPO.	• Nilai AKIP BPO.	• Nilai Evaluasi AKIP BPO.	• Nilai Evaluasi AKIP BPO.	• **Nilai Evaluasi AKIP BPO.**
-	-	• Persentase Realisasi Anggaran BPO.	• Persentase Realisasi Anggaran BPO.	• **Persentase Realisasi Anggaran BPO.**

Dari tabel di atas, dapat diketahui beberapa penyesuaian indikator kinerja dan peningkatan kualitas indikator kinerja yang terus dilakukan setiap tahunnya. Hal ini sebagai bentuk respon terhadap *concern* pihak pengawas internal dan eksternal terhadap kualitas indikator kinerja BPO agar lebih relevan dalam mencerminkan tugas dan fungsinya, serta semakin tepat sasaran dalam mengukur kinerja BPO yang mencerminkan manfaat yang berorientasi hasil (*outcome*).

Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja yang telah disusun dituangkan di setiap Sasaran Kegiatan yang ada pada Perjanjian Kinerja yang merupakan perikatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan dalam mencapai sasaran, indikator kinerja dan target dalam satu periode. BPO telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholders Perspective				
S1	Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik	S1.1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	81
		S1.2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	79,80 (BB)
		S1.3	Tingkat Maturitas SPIP	3,60 (Skala 5)
Customer Perspective				
C1	Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi yang Prima	C1.1	Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	3,60 (Skala 4)
C2	Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik	C2.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	80,45 (A)
Internal Business Process Perspective				
B1	Manajemen Kinerja dan Anggaran yang Berkualitas	B1.1	Jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal "SANGAT BAIK" (BB)	135
		B1.2	Persentase Alokasi Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Memiliki Catatan Blokir pada Halaman IV DIPA	9%
		B1.3	Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI	81%
B2	Hasil Analisis terkait Organisasi yang Optimal	B2.1	Persentase Analisis terkait Organisasi yang dimanfaatkan	82%
Learning and Growth Perspective				
L1	Tata Kelola Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi yang Baik	L1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Perencanaan dan Organisasi	80 (BB)
L2	Pengelolaan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi yang Optimal dan Akuntabel	L2.1	Persentase realisasi anggaran BPO	95%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang telah diubah menjadi Keputusan Menteri Luar Negeri No. 27 Tahun 2024, BPO telah menyusun indikator kinerja Tahun 2020-2024 secara SMART dimana Indikator Kinerja tersebut merupakan kesepakatan antara pengelola kinerja organisasi, pemilik indikator kinerja dan atasan langsung pemilik indikator kinerja.

Selain menyusun indikator kinerja, diperlukan juga penyusunan target dari indikator kinerja tujuan jangka panjang yang ditetapkan di Renstra Tahun 2020-2024. Berikut target indikator kinerja BPO selama 5 tahun:

Perbandingan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.	85	83	81	81	81
2.	Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu.	78 (BB)	79 (BB)	79.5 (BB)	79.8 (BB)	79.8 (BB)
3.	Tingkat Maturitas SPIP	N/A	N/A	N/A	N/A	3,60 (skala 5)
4.	Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi.	N/A	N/A	4 (skala 1-4)	3,6 (skala 4)	3,6 (skala 4)
5.	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal.	79 (BB)	80 (BB)	80 (BB)	80,20 (A)	80,45(A)
6.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal.	90	91	91	92	N/A
7.	Jumlah Unit Eselon 1 dan Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran min. 92.	N/A	N/A	40	30	N/A
8.	Jumlah Unit Organisasi Kementerian dan Satker Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal “Sangat Baik” (BB).	112 (dari 141)	122 (dari 141)	130 (dari 141)	130 (dari 141)	135
9.	Persentase alokasi yang memiliki catatan blokir pada halaman IVA DIPA.	10%	10%	10%	9%	9%
10.	Indeks/Nilai Revisi Anggaran Satker Kementerian dan Perwakilan.	95%	4 (skala 5)	99%	99%	81%
11.	Persentase Analisis terkait Organisasi yang Dimanfaatkan	N/A	N/A	70%	80%	82%
12.	Nilai Evaluasi AKIP BPO.	79 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	80 (BB)	80 (BB)
13.	Persentase Realisasi Anggaran BPO.	N/A	N/A	95%	95%	95%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat indikator kinerja yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi selama 5 tahun (2020-2024) serta adanya perubahan target dari tahun sebelumnya hal tersebut mencerminkan adanya kriteria SMART-C yang dilakukan oleh BPO yaitu penyesuaian kualitas dan target dengan perkembangan strategi organisasi yang selalu disempurnakan (*Continously Improved*) serta penerapan penentuan besaran target didasarkan pada realisasi tahun lalu dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pihak pengawas internal dan eksternal terhadap kualitas indikator kinerja BPO. Penjelasan lebih lengkap akan ada di setiap penjelasan masing-masing indikator kinerja.

BPO telah menerapkan kriteria SMART-C dalam penyesuaian indikator kinerja dan penentuan besaran target selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024).

- Capaian Kinerja
- Nilai Capaian Kinerja Organisasi
- *Stakeholder Perpective*
- *Customer Perspective*
- *Internal Businesss Process Perspective*
- *Learning and Growth Perspective*
- Realisasi Anggaran
- Analisis Efisiensi Sumber Daya
- Capaian Kinerja Lainnya

03 Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) BPO Tahun 2024 sebesar 106,25 merupakan nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja (IK) suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IK dan bobot perspektif sebagaimana tergambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel.III.1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi Tahun 2024

NCKO 2024					106,25 (Istimewa)
Stakeholder Perspective (25%)					103,08
S1 : Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik					103,08
Nama IK	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
S1.1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	33,33	81	81,55	100,68%	N/A
S1.2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	33,33	79,80 (BB)	80,86	101,33%	N/A
S1.3. Tingkat Maturitas SPIP	33,33	3,60 (skala 5)	3,86	107,22%	N/A
Customer Perspective (15%)					98,02
C1 : Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi yang Prima					95,28
Nama IK	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
C1.1. Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	100	3,60 (skala 4)	3,43	95,28%	N/A
C2 : Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik					100,75
Nama IK	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
C2.1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	100	80,45 (A)	81,05	100,75%	N/A
Internal Business Process Perspective (30%)					116,48
B1 : Manajemen Kinerja dan Anggaran yang Berkualitas					112,95
Nama IK	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
B1.1. Jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal "SANGAT BAIK" (BB)	33,33	135	139	102,96%	N/A
B1.2. Persentase alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri yang memiliki catatan blokir pada halaman IV DIPA	33,33	9%	1,29%	185,62%	120%
B1.3. Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI	33,33	81%	93,90%	115,93%	N/A
B2 : Hasil Analisis terkait Organisasi yang Optimal					120
Nama IK	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
B2.1. Persentase Analisis terkait Organisasi yang dimanfaatkan	100	82%	100%	121,95%	120%
Learning and Growth Perspective (30%)					102,79
L1 : Tata Kelola Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi yang Baik					100,31
Nama IK	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
L1.1. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Perencanaan dan Organisasi	100	80 (BB)	80,25	100,31%	N/A
L2 : Pengelolaan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi yang Optimal dan Akuntabel					105,26
Nama IK	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
L2.1. Persentase realisasi anggaran BPO	100	95%	100%	105,26%	N/A

Nilai capaian tersebut diperoleh dari 11 IK, dimana terdapat 8 IK yang melebihi target namun masih dibawah batas toleransi, sedangkan terdapat 2 IK yang melebihi target di atas batas toleransi dan 1 IK yang masih belum mencapai target Tahun 2024 yang ditetapkan.

NKCO Biro Perencanaan dan Organsiasi dapat dilihat sesuai infografis aksi.kemlu.go.id sebagai berikut:

Nilai Capaian Kinerja Organisasi

Stakeholder Perspective 103,08

S1 103,08
Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik

Customer Perspective 98,02

C1 95.28
Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi yang Prima

C2 100.75
Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik

CAPAIAN 106,25 (Istimewa)

Internal Business Process Perspective 116.48

B1 112.95
Manajemen Kinerja dan Anggaran yang Berkualitas

B2 120.00
Hasil Analisis Terkait Organisasi yang Optimal

Learning and Growth Perspective 102.79

L1 100,31
Tata Kelola Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi yang Baik

L2 105,26
Pengelolaan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi yang Optimal dan Akuntabel

Stakeholder Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder* sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder*. *Stakeholder* adalah pemangku kepentingan, yakni pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

Terdapat satu Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh BPO dalam menjalankan proses bisnis untuk mewujudkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan.

Sasaran Kegiatan (S1) Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik

IK S1.1 : Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri

IK ini mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

*Realisasi di tahun 2024 menggunakan realisasi tahun 2023 karena nilai hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 belum rilis.

Realisasi
2023 81,55
2024 81,55

IK S1.2 : Nilai Evaluasi AKIP Kementerian Luar Negeri

IK ini mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Realisasi
2023 79,15
2024 80,86

IK S1.3 : Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

IK ini mengukur tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Realisasi
2023 N/A
2024 3,86

Sasaran Kegiatan (S1) Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik

Tata kelola organisasi yang baik pada Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu unsur dari infrastruktur diplomasi yang kuat. Hal tersebut ditunjukkan dalam serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi. Sasaran Kegiatan (SK) S1 diukur berdasarkan rata–rata capaian pada 3 (tiga) IK dengan rincian sebagai berikut:

1. IK S1.1: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan dalam rangka mencapai *good governance*. Nilai IK Evaluasi Reformasi Birokrasi yang disajikan dalam laporan ini adalah Nilai Evaluasi RB Kemenlu Tahun 2023 dikarenakan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 belum rilis.

Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenlu dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024 melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/648/RB.06/2024, Kementerian Luar Negeri meraih Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri sebesar 81.55 dengan kategori 'A' predikat Memuaskan.

2. IK S1.2: Nilai Evaluasi AKIP Kementerian Luar Negeri

Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu merupakan penilaian atas perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian Evaluasi AKIP Kemenlu dirilis tanggal 19 Desember 2024 melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/613/AA.05/2024. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian PANRB menilai Kementerian Luar Negeri telah berhasil memimpin perubahan menuju pemerintahan berorientasi hasil, dan berhasil memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 80,86 dengan predikat 'A' (memuaskan)

3. IK S1.3: Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah nilai evaluasi penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kemenlu Tahun 2024 dirilis pada tanggal 12 Desember 2024 melalui Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. PE.09.03/SP-146/D2/02/2024 dengan capaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP 3,86 atau memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi).

Analisis IK S1.1

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri

Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024

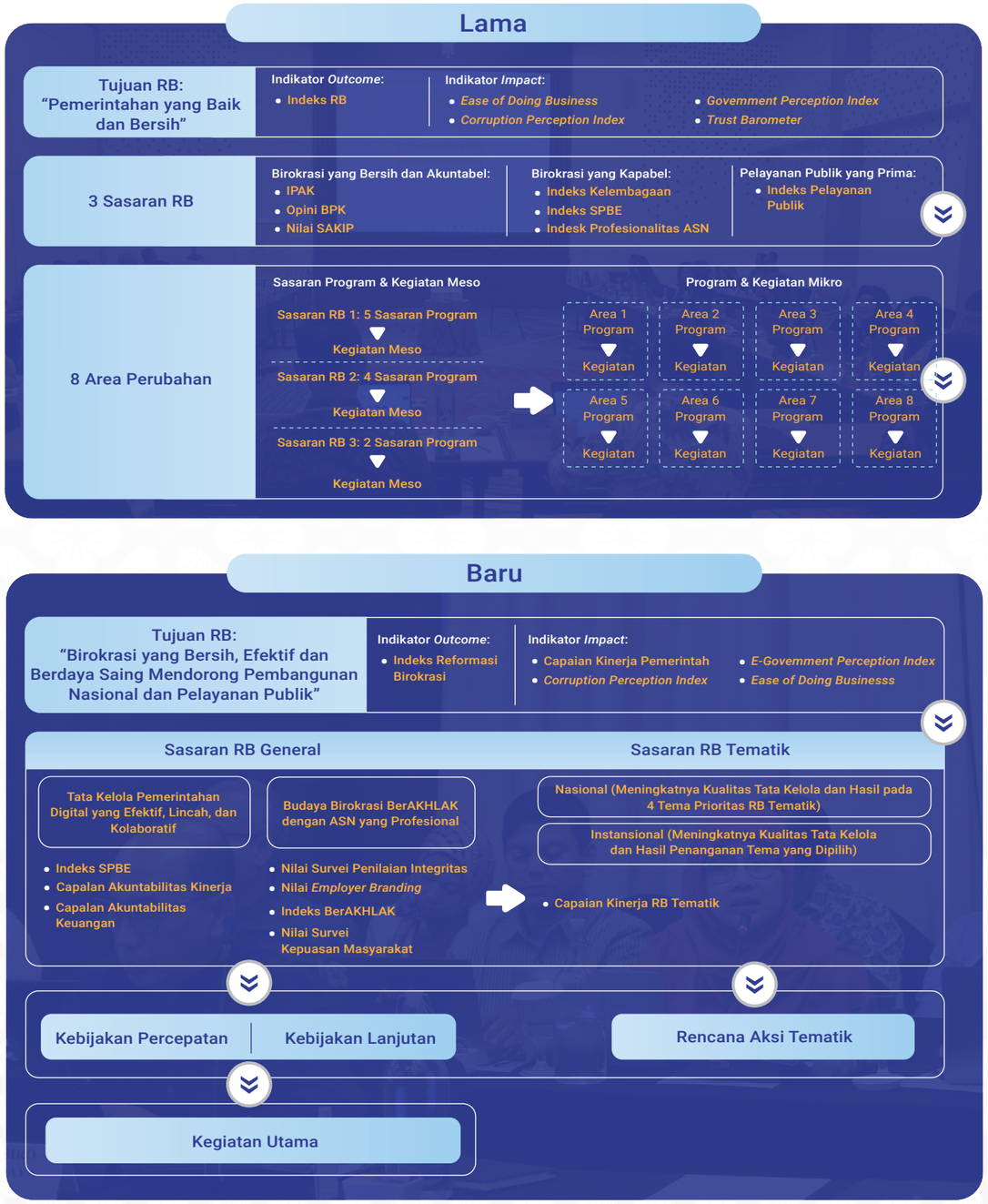

Deskripsi IK

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrumen dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Hal ini ditunjukkan dalam salah satu agenda prioritas Pembangunan Nasional terkait arahan RB yang berisi tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* RB Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. *Road Map* disusun dengan tujuan membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, dengan begitu dapat menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan RB.

Agenda prioritas Pembangunan Nasional terkait arahan RB yang berisi tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Dalam tahap akhir periode ketiga *Road Map* RB Nasional Tahun 2020-2024, hasil evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Dari segi perencanaan, *Road Map* RB 2020-2024 belum secara optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Dari segi pelaksanaan, pengelolaan RB di level nasional maupun instasional belum secara optimal dirasakan oleh masyarakat, masih dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing instansi pemerintah sehingga belum dapat fokus pada isu strategis nasional yang mendorong pembangunan nasional. Menyikapi kondisi tersebut, telah dilakukan upaya-upaya penajaman terhadap *Road Map* RB Tahun 2020-2024 dengan harapan dapat membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN tentang RB.

Merujuk Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan. Kegiatan Percepatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mempercepat terwujudnya birokrasi yang diharapkan. Isu strategis RB yang akan dihadapi adalah Isu Hulu terkait tata kelola pemerintahan dan Isu Hilir terkait agenda prioritas Pembangunan Nasional. Dengan demikian, *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut *double track*, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut RB Tematik.

Penajaman selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta melakukan sinergi indikator yang beririsan. Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB dalam *Road Map* RB 2020-2024 sebelum dan setelah penajaman terlihat dalam tabel berikut:

Isu strategis RB yang akan dihadapi adalah Isu Hulu terkait tata kelola pemerintahan dan Isu Hilir terkait agenda prioritas Pembangunan Nasional.

Tabel III.2 Hasil Penajaman Indikator *Road Map* RB 2020-2024

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara dalam *Road Map* RB sebelum penajaman	Kondisi sampai 2021	Dalam *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	Belum tersedia	Indikator 1 tidak dilanjutkan
Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	Sudah tersedia	Indikator 2 dan 3 dilanjutkan, disinergikan dan disederhanakan
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	Belum tersedia	Dilanjutkan dan disinergikan dengan Indikator 5
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengeleolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	Indikator 5-8 sudah tersedia, Indikator 9 belum tersedia	Indikator 5-8 dilanjutkan, disinergikan dan disederhanakan Indikator 9 tidak dilanjutkan
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Sistem Merit 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Indikator 10-12 sudah tersedia	Indikator 10-12 diintegrasikan ke dalam Indikator 11
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator 13-14 sudah tersedia	Indikator 13-14 dilanjutkan, disinergikan, disederhanakan
Pengawasan	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa 19. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indikator 15-19 sudah tersedia	Indikator 15 dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator 13 dan 14 Indikator 16 diintegrasikan dengan Indikator 15 Indikator 17 dilanjutkan dan ditambah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Indikator 18 dilanjutkan, disederhanakan, disinergikan indikator 5 Indikator 19 digantikan dengan Nilai Hasil Survei Penilaian Integritas
Pelayanan Publik	20. Indeks Pelayanan Publik 21. Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 22. Survei Kepuasan Masyarakat	Indikator 20-22 sudah tersedia	Indikator 20 dan 21 dilanjutkan, disinergikan Indikator 22 dilanjutkan, disempurnakan

Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024

RB General

Fokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah **tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi** yang umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani.

RB Tematik

Fokus pada penyelesaian isu hilir yaitu **masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional** yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan.

- **Pengentasan Kemiskinan**
- **Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Fokus Penanganan *Stunting*)**
- **Peningkatan Investasi**
- **Percepatan Prioritas Aktual Presiden (Pemanfaatan Produk Dalam Negeri & Pengendalian Inflasi)**

Pelaksana

Leading Sector
K/L yang memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab menjadi koordinator nasional

Implementing Agency
Instansi Pemerintah yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan program terkait tema

Non Implementing Agency
Instansi Pemerintah selain *implementing agency* dan *leading sector* yang menginisiasi pelaksanaan RB Tematik secara mandiri

panrb
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 dipertegas kembali dalam Permen PAN RB No. 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Kepmenpan RB No. 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Indikator RB General dan RB Tematik sebagai instrumen evaluasi reformasi birokrasi dicantumkan dalam lampiran lembar kerja evaluasi sebagai berikut:

Tabel III.3 Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Penilai	Penjelasan
Indikator RB General					
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	0-100	Evaluator Nasional*)	Menilai kualitas rencana aksi Pembangunan RB General yang dilakukan oleh K/L
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	0-100	Evaluator Nasional	Menilai kualitas implementasi rencana aksi Pembangunan RB General yang telah disusun dengan menganalisis capaian rencana aksi
3.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2,00	0-100	Kementerian PAN RB	Mengukur tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada K/L.
4.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0-5	Kementerian PAN RB	Mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.
5.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	1-5	BPKP	Mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada K/L.
6.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,00	0-3	Kemen PANRB	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM secara rata-rata tiga tahun terakhir pada K/L.
7.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	4,00	0-100	Kemen PANRB	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM secara rata-rata tiga tahun terakhir pada K/L.
8.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,00	0-100	Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS	Mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja pada K/L.
9.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,00	0-5	Kemen PANRB	Mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional pada K/L.
10.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,00	0-100	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Mengukur kualitas implementasi penyelenggaraan kearsipan pada K/L dalam rangka transformasi digital kearsipan.
11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2,00	0-100	Kementerian Keuangan	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan pada K/L.

	Penilaian	Bobot	Range Nilai	Penilai	Penjelasan
12.	Indeks Pengelolaan Aset	2,00	1-4	Kementerian Keuangan	Mengukur kualitas kinerja di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) meliputi pengelolaan, kepatuhan, pengawasan, dan pengendalian, serta keandalan administrasi pada K/L selaku pengguna barang.
13.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	1-5	Kemen PANRB	Mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR! sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada K/L
14.	Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	0-100	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Mengukur kualitas kebijakan publik yang ditetapkan oleh K/L pada proses perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan.
15.	Indeks Reformasi Hukum	1,50	0-100	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM)	Mengukur reformasi hukum pada K/L dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional.
16.	Indeks Pembangunan Statistik	1,50	1-5	Badan Pusat Statistik	Mengukur kualitas kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada K/L.
17.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,00	0-100	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Mengukur kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pada K/L baik dari aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, maupun sistem pengadaan.
18.	Indeks Sistem Merit	4,00	0-410	Komisi Aparatur Sipil Negara	Mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN pada K/L.
19.	Indeks Pelayanan Publik	1,50	0-5	Kementerian PAN RB dan Ombudsman	Mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada K/L.
20.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0-100	Kementerian PAN RB dan Ombudsman	Mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada K/L.
21.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9,00	1-5	Kemen PANRB	Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan K/L dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital.
22.	Capaian Prioritas Nasional	3,00	0-100	Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS	Menghitung kinerja efektivitas output K/L dengan membandingkan capaian dan target RO yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.
23.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	7,00	0-100	Evaluator Nasional	Menghitung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan pada K/L dengan membandingkan Jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU.
24.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	5,00	WTP-WDP-TW-TMP	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Mengukur tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan.
25.	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4,00	0-100	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan.
26.	Indeks BerAKHLAK	4,00	0-100	Kemen PANRB	Mengukur tingkat kematangan implementasi core value ASN BerAKHLAK.
27.	Survei Penilaian Integritas	10,00	0-100	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Mengukur tingkat integritas organisasi pada K/L. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan K/L dalam memetakan risiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi.
28.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100	BPKP	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari K/L
	Indikator RB Tematik				
1.	Pengentasan Kemiskinan	2,00	0-100	Evaluator Nasional	Evaluasi RB Tematik dilakukan kepada K/L dengan mengukur: a. Strategi Pembangunan (upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi) b. Capaian Indikator dampak RB Tematik.
2.	Realisasi Investasi	2,00	0-100		
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan *Stunting*	2,00	0-100		
4.	Prioritas Aktual Presiden: Penggunaan Produk Dalam Negeri	2,00	0-100		
	Prioritas Aktual Presiden: Pengendalian Inflasi	2,00	0-100		

*) Evaluator Nasional adalah tim evaluator yang ditetapkan oleh Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional yang berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

IK Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi digambarkan sebagai ukuran sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan perubahan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Mengingat delapan area perubahan tidak lagi digunakan menjadi dasar penilaian, maka berdasarkan Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi diukur dengan cara melaksanakan evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi Internal dilaksanakan oleh evaluator internal pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan tahap pelaksanaan (*on-going*), sedangkan Evaluasi Eksternal dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*) reformasi birokrasi.

Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Nilai/Angka Permen PANRB 9/2023

AA	Skor » 100	Sangat Memuaskan	B	Skor » 60-70	Baik
A	Skor » 80-100	Memuaskan	CC	Skor » 50-60	Cukup
A-	Skor » 80-100	Memuasakan dengan Catatan	C	Skor » 30- 50	Kurang
BB	Skor » 70-80	Sangat Baik	D	Skor » 0-30	Sangat Kurang

Sumber: Kemen PANRB

Tabel di atas menunjukkan terdapat perubahan interpretasi/ predikat pada penilaian evaluasi RB oleh Kemen PANRB yang ditetapkan dalam beberapa Kategori mulai dari AA hingga D. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Kementerian Luar Negeri meraih Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sebesar 81.55 dengan kategori "A." Hal ini disampaikan melalui Surat Kementerian PAN RB No. B/648/RB.06/2024 tanggal 7 Oktober 2024.

Informasi Kinerja

Tabel III.4 Capaian IK S1.1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri

No.	Kategori	Jumlah
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	Nilai Evaluasi RB dinilai oleh Kemen PANRB	81,55*)

Realisasi	Target	Capaian
81,55*)	81	100.68%

Sumber: AKSI
*) menggunakan nilai tahun 2023

Pada tahun 2024, realisasi IK S1.1 "Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri" tercatat sebesar 81,55 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 81. Dengan demikian, capaian IK mencapai 100.68% dengan catatan Nilai Hasil Evaluasi RB Kemenlu Tahun 2024 belum diperoleh hingga batas waktu penyampaian LKj Kemenlu sehingga Nilai Hasil Evaluasi RB yang digunakan Tahun 2023.

Perbandingan Kinerja

Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri berjalan dengan sangat baik selama lima tahun terakhir, hal ini ditunjukkan melalui tren capaian yang meningkat. Sejalan dengan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri 2020-2024 target di akhir tahun 2023 dapat dicapai dengan nilai 81.55 predikat "A".

Tabel III.5 Target, Realisasi, dan Capaian IK S1. 1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri

S1.1

	Target	Realisasi	Capaian
2020 »	85	76.81	90.36%
2021 »	83	77.88	93,83%
2022 »	81	79.46	98.09%
2023 »	81	81.55	100.68%
2024 »	81	81.55	100.68%

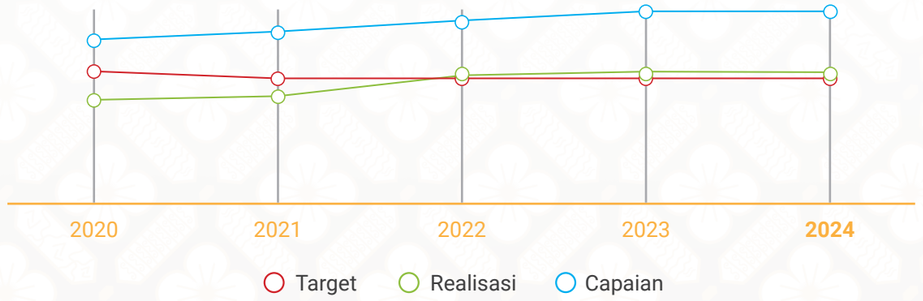

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2022 tidak dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2023 dan seterusnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Sehingga penilaian tahun 2020-2022 tidak bisa ekuivalen dengan penilaian tahun 2023 dan seterusnya.

Target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 84,5 sedangkan target 2024 sesuai PK adalah 81, terdapat perbedaan target Renstra dengan target PK di Tahun 2024 dikarenakan evaluasi dari hasil realisasi dan capaian dari Tahun 2020 - 2023 yang tidak mencapai target maksimal sehingga target Tahun 2024 disesuaikan.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Capaian IK Nilai Evaluasi RB Kemenlu Tahun 2024 di atas target perjanjian kinerja terjadi karena didukung oleh akumulasi capaian yang meningkat pada indikator–indikator RB General dan Tematik.

RB General

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General

Rencana Aksi Pembangunan RB General menilai kualitas rencana aksi Pembangunan RB General yang dilakukan oleh K/L, misalnya legal hukum RB General yang dikeluarkan, bentuk kolaborasi yang dibangun, serta strategi-strategi atas kegiatan utama yang ditetapkan. Kemenlu mendapatkan skor nilai Rencana Aksi Pembangunan RB General sebesar 2,5 dari skala 3.0. Nilai Rencana Aksi Pembangunan RB General belum optimal karena renaksi tiap indikator belum menggambarkan langkah–langkah terinci yang diperlukan untuk dapat meningkatkan target masing–masing indikator.

2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General

Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General diukur dengan menilai kualitas implementasi rencana aksi Pembangunan RB General yang telah disusun dengan menganalisis capaian renaksi. Pada Tahun 2023, Kemenlu memperoleh nilai 85,62. Dalam implementasi Rencana Aksi RB General, Kemenlu telah melaksanakan penyelarasan Rencana Aksi RB Kemenlu dengan Peta Jalan RB 2023-2024 dan diintegrasikan dengan penetapan sasaran strategis Kemenlu. Rencana Aksi yang disusun juga merupakan perencanaan dan realisasi kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator terkait.

3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi

BPO, Pusbinjabfung dan BSDM telah menyelesaikan pengisian PSO dan sistem kerja di akhir September 2024. Sebagaimana telah disampaikan, jumlah Jabatan Administrator (JA) yang berhasil disederhanakan sejumlah **244 JA** sesuai Permenlu No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenlu. Sedangkan, JA yang dipertahankan adalah JA di unit kerja Sekretariat sejumlah **398 JA**. Berdasarkan catatan rekomendasi di tahun 2023, Penyederhanaan Sistem Organisasi yang ditargetkan 100% masih akan sulit dilaksanakan karena beberapa tusi yang tidak dapat dilaksanakan apabila dilakukan penyederhanaan 100% dan tidak adanya *supply* jabatan fungsional. Meskipun demikian, penataan dan penyederhanaan kelembagaan akan tetap terus dilanjutkan.

4. Tingkat Capaian Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi

Indikator ini mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Kementerian Luar Negeri di tahun 2023 memperoleh skor sebesar 4. Struktur organisasi Kemenlu akan dipertahankan dengan konteks nomenklatur jabatan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Adapun upaya yang dilakukan Kemenlu dalam mencapai skor yang lebih tinggi dilakukan dengan beberapa usaha sebagai berikut:

a. Penetapan Sistem Kerja: Kepmenlu No. 14/B/RO/09/2024/01 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
b. Penerapan *Squad Team* : 10 (sepuluh) SK Tim Kerja Lintas Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat maupun Unit Operasional; dan
c. Penyesuaian Proses Bisnis: Kepmenlu No. 05/B/LA/I/2022/01 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

5. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023 adalah 3,2 dimana tahun sebelum Nilai Maturitas SPIP Kemenlu adalah 3,3 masuk pada Level 3 (Terdefinisi). Meskipun hasil yang didapatkan kurang maksimal, pada tahun 2024 Kemenlu berupaya meningkatkan kualitas implementasi SPIP dengan beberapa upaya seperti melaksanakan internalisasi melalui bimbingan teknis penguatan kapasitas SPIP Terintegrasi, sosialisasi kebijakan manajemen risiko, serta menerbitkan KepIrjen No. 01077/B/PW/11/2024/67/11 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Jenderal Kemenlu. Kemenlu terus mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih efektif dengan penajaman penerapan Manajemen Risiko (MR) sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengaduan masyarakat secara lebih baik guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

6. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Pada Tahun 2023, Kemenlu telah berhasil mendorong perluasan pembangunan ZI dengan meraih Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) yaitu Direktorat PWNI dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu KJRI Vancouver. Untuk mendorong keikutsertaan unit/satker dalam pembangunan ZI dan meningkatkan jumlah unit/satker berpredikat WBK/WBBM, Tim TPI ZI telah melakukan Bimtek/Pendampingan/*sharing session* dengan mengundang narasumber dari Kemen PANRB dan unit/satker yang telah meraih predikat WBK/WBBM, disamping itu kunjungan lapangan Pembangunan ZI dengan tujuan penilaian internal yang lebih komprehensif juga dilaksanakan. Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan Kementerian Luar Negeri, terdapat 17 (tujuh belas) unit/satker yang menjadi peserta pembangunan ZI dan 7 unit/satker lolos penilaian untuk diusulkan menuju WBK/WBBM. Pada 2 Desember 2024, Kementerian PAN RB menyampaikan 4 (empat) satker Kemenlu di Perwakilan RI berhasil meraih Predikat WBK yaitu KBRI Dar Es Salaam, KBRI Wina, KJRI Johor Baru, dan KJRI San Fransisco.

Pada Tahun 2023, Kemenlu telah berhasil mendorong perluasan pembangunan ZI dengan meraih Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) yaitu Direktorat PWNI dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu KJRI Vancouver dan di Tahun 2024, terdapat 4 (empat) satker Kemenlu di Perwakilan RI yang berhasil meraih Predikat WBK yaitu KBRI Dar Es Salaam, KBRI Wina, KJRI Johor Baru, dan KJRI San Fransisco.

7. Nilai SAKIP

Pada Tahun 2024, SAKIP Kemenlu memperoleh skor sebesar 80,86 ada peningkatan sebesar 1,71 poin dibandingkan tahun 2023 dengan skor 79,15. Dari komponen penilaian, pelaksanaan SAKIP sudah sangat baik di Kementerian Luar Negeri ditandai dengan mulai terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

8. Indeks Perencanaan Pembangunan

Indeks Perencanaan Pembangunan mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja pada K/L. Pada tahun 2023, Kemenlu memperoleh nilai sebesar 91,83 dan di tahun 2024 Kemenlu meraih hasil penilaian IPPN sebesar 92,44. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenlu telah melakukan tindak lanjut atas catatan rekomendasi yang diberikan Bappenas seperti mengoptimalkan koordinasi K/L dengan mitra K/L sehingga sasaran strategis hingga sasaran kegiatan renja dapat selaras, konsistensi satuan dan target pada sasaran output prioritas renja sesuai dengan sasaran output proyek prioritas, serta meningkatkan sinkronisasi antara nomenklatur dan alokasi anggaran output prioritas sesuai dengan nomenklatur dan alokasi anggaran output proyek prioritas.

9. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE

Sesuai kerangka kerja nasional, penyusunan Arsitektur SPBE terdiri atas 2 tahapan utama yaitu penyusunan Arsitektur SPBE *as is* (kondisi saat ini) dan Arsitektur SPBE *to-be* (kondisi masa depan/ perubahan yang diinginkan). Saat ini, Kemenlu telah menyelesaikan penyusunan *draft* Arsitektur SPBE *as is* Kemenlu yang dapat diakses pada tautan kem. lu/DraftArsitekturSPBE. Draft tersebut telah meraih Nilai 4 dari skala nilai 1-5 dari Kemen PANRB. Disamping itu, Kemenlu sedang melakukan penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat berbagai rencana transformasi digital Kemenlu. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE diharapkan dapat menampung seluruh masukan dan kebutuhan dari Satuan Kerja dan mengedepankan pengembangan TIK yang terintegrasi dan efisien sesuai dengan visi kebijakan nasional SPBE. Capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE di tahun 2023 adalah 1 dari nilai maksimal 4, namun di tahun 2024 diperkirakan capaian Kemenlu meningkat menjadi 2 dengan catatan seluruh K/L maksimal mendapatkan nilai 3 mempertimbangkan keterbatasan kualitas implementasi SPBE.

10. Tingkat Digitalisasi Arsip

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Kementerian Luar Negeri menduduki peringkat ke 25 dengan nilai A (Memuaskan). Skor yang didapatkan pada tahun 2023 sebesar 88,01 meningkat bila dibandingkan skor tahun 2022 sebesar 73,34. Peningkatan ini dapat terlihat dari peningkatan pengelolaan digitalisasi arsip dan peningkatan kapasitas SDM Kearsipan juga sarana dan prasarana dalam pengelolaan kearsipan serta penerapan aplikasi SRIKANDI. Pada tahun 2024, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat digitalisasi arsip adalah pendataan dan pemilahan arsip yang akan dipindahkan ke IKN, verifikasi data audit sistem kearsipan dan melaksanakan pengawasan kearsipan.

11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai IKPA mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan pada K/L. Pada Tahun 2023, Kemenlu memperoleh nilai 92,39 ada peningkatan sebesar 2,77 poin dibandingkan tahun 2022 yaitu dengan raihan nilai 89,62. Pada tahun 2024, Kemenlu telah melaksanakan asistensi *one*

on one meeting bagi satker pusat dan perwakilan di lingkungan Kemenlu dengan menghadirkan narasumber dari Kemenkeu per triwulan dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di unit/satker terkait. Upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi tata cara revisi anggaran bagi Perwakilan RI dan melakukan monitoring dan evaluasi anggaran belanja pemeliharaan unit/satker.

12. Indeks Pengelolaan Aset

Indeks Pengelolaan Aset mengukur kualitas kinerja di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) meliputi pengelolaan, kepatuhan, pengawasan, dan pengendalian, serta keandalan administrasi. Pada Tahun 2023, Kemenlu memperoleh nilai nilai 3,10 ada peningkatan sebesar 0,19 poin dibandingkan tahun 2022 yaitu dengan raihan nilai 2.91 . Kemenlu telah melaksanakan peningkatan kualitas *database* dan invetarisasi BMN, melakukan bimbingan teknis dalam rangka penilaian mandiri IPA, melaksanakan penilaian mandiri IPA Satker Pusat dan Perwakilan serta melaksanakan diseminasi berkala terkait penatausahaan dan pengelolaan BMN pada satker pusat dan perwakilan. Kementerian Luar Negeri di tahun 2024 berhasil menyusun pedoman penilaian mandiri IPA melalui Kepmenlu No. 21/B/PL/08/2024/01 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Tahunan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

13. Tingkat Tindak Lanjut LAPOR! yang diselesaikan

Tingkat Tindak Lanjut LAPOR! yang diselesaikan mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR! sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi RB Tahun 2023, Kemenlu mendapatkan nilai 1 dari skala 1.5. Skor dinilai masih belum maksimal karena mekanisme penghitungan nilai LAPOR didasarkan pada pertimbangan bahwa semakin banyak laporan di sistem LAPOR akan semakin bagus nilainya. Saat ini Setitjen mengampu 5 kanal pengaduan (*whatsapp hotline, email hotline,* telp ***hotline***, LAPOR) yang mendapatkan banyak pengaduan tiap harinya. Sebagai tindak lanjut, pengaduan ke depan akan diarahkan di sistem LAPOR. Adapun upaya-upaya peningkatan kualitas tindak lanjut tersebut dilanjutkan di tahun 2024 melalui penyampaian rencana aksi pengelolaan pengaduan 2020-2024 dan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat.

14. Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan mengukur kualitas kebijakan publik yang ditetapkan oleh K/L pada proses perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Hasil penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN) atas Indeks Kebijakan Publik Kemenlu Tahun 2023 meraih skor 65 naik dibandingkan nilai IKK Kemenlu Tahun 2021 sebesar 51,72 (nilai IKK diukur 2 tahun sekali). Kemenlu di tahun 2024 telah menindaklanjuti catatan rekomendasi diantaranya melakukan analisis dengan memperhatikan komponen penyusunan kebijakan, melakukan formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, mengunggah data dukung yang relevan serta melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan inventarisir dokumen penyusunan produk hukum di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

15. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum mengukur reformasi hukum pada K/L dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional. Pada tahun 2023, Kemenlu memperoleh nilai 87,22 dengan kategori "A" (Sangat Baik) ada peningkatan sebesar 4,57 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dengan raihan nilai 82,65 dengan kategori A (Sangat Baik). Hasill Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 telah diterbitkan pada tanggal 11 November 2024, Kemenlu berhasil meningkatkan kembali raihan nilai menjadi 98.56 dengan kategori "AA" (Istimewa). Prestasi ini dapat dicapai oleh Kemenlu karena telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi dari Kemenkumham diantaranya menyusun *standard operational procedure* (SOP) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), melaksanakan rapat koordinasi dan pengumpulan data dukung dalam penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum, serta mengoptimalkan koordinasi dengan Kemenkumham dalam rangka harmonisasi peraturan perundang–undangan.

16. Indeks Pembangunan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik mengukur kualitas kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada K/L. Nilai Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kemenlu Tahun 2023 adalah 2,05 dengan predikat "Cukup". Namun di tahun 2024 terdapat peningkatan, nilai Indeks Pembangunan Statistik Kemenlu Tahun 2024 adalah 2,68 dengan predikat "Baik". Dari penilaian Badan Pusat Statistik, lima domain yang menjadi pengukuran memiliki nilai hasil penilaian diatas nilai nasional. Rencana aksi yang dilaksanakan Kemenlu di tahun 2024 diantaranya melaksanakan rangkaian pembinaan statistik sektoral dengan inventarisir kegiatan statistik satuan kerja dan melaksanakan persiapan visitasi tim penilai ke Unit Lokus Evaluasi (ULE) Kemenlu tahun 2024 yaitu Direktorat Pelindungan WNI.

17. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks Tata Kelola Pengadaan mengukur kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pada K/L baik aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun sistem pengadaan. Pada tahun 2023, Kemenlu memperoleh nilai 56.01 ada peningkatan sebesar 28.01 poin dibandingkan tahun 2022 yaitu nilai 28. Dalam usaha meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang jasa, Kemenlu telah menyelenggarakan bimbingan teknis implementasi Sistem Pengadaan Barang/ Jasa (SI PBJ) bagi Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pusat dan Perwakilan RI, pendampingan perencanaan pelaksanaan PBJ melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), pemenuhan SDM pengelola PBJ yang bersertifikat dan berkompetensi, pengisian formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan PBJ ahli pertama dengan alih jabatan pelaksana, serta penyusunan rancangan Permenlu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) masih dalam tahap pembahasan.

18. Indeks Sistem Merit

Pada Tahun 2023, Kementerian Luar Negeri berhasil mendapatkan 3 (tiga) kategori penghargaan, yaitu:

a. Indeks Nilai Sistem Merit sebesar 343,5 atau 0,84 dengan predikat "Sangat Baik"
b. Indeks Kualitas Pengisian JPT sebesar 88,8 dengan predikat "Baik"
c. Tingkat kepatuhan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku dengan nilai 343 atau 0,87 predikat "Patuh".

Dengan mendapatkan penilaian predikat Sistem Merit Sangat Baik, Kementerian Luar Negeri diberikan kesempatan untuk melakukan pengisian JPT melalui *talent pool*, Biro SDM Kemenlu juga telah memiliki *Human Capital Development Plan* sebagai bentuk rencana suksesi yang disesuaikan dengan pola karir instansi. Upaya baik ini dilanjutkan di tahun 2024 dengan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait penerapan pemberian tunjangan kinerja yang dikaitkan dengan kinerja pegawai, mengembangkan manajemen talenta pegawai, pelaksanaan uji potensi dan kompetensi bagi seluruh pegawai, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional ampuan Kemenlu termasuk penyusunan kamus kompetensi.

19. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada K/L. Pada tahun 2023, nilai Indeks Pelayanan Publik Kemenlu sebesar 4,15, dan pada Tanggal 18 Oktober 2024, Kemenlu berhasil meraih nilai Indeks Pelayanan Publik sejumlah 4,53 dengan kategori "A". Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai ULE Kemenlu tahun 2024 juga berhasil menjadi organisasi penyelenggara pelayanan publik dengan predikat "Pelayanan Prima" pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024.

Kementerian Luar Negeri mengoptimalkan implementasi pelayanan publik dengan penerapan budaya pelayanan prima, melakukan inovasi layanan melalui transformasi digital dan pengembangan SDM, serta melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas upaya-upaya pelayanan yang telah dilaksanakan. Kementerian Luar Negeri memberikan dorongan yang lebih besar ke seluruh satuan kerja di Pusat dan Perwakilan RI untuk menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009. Tak hanya itu, Kemenlu juga melaksanakan PEKPPP Mandiri di 8 (delapan) Perwakilan RI yaitu KBRI Den Haag, KBRI London, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Singapura, KBRI Tokyo, KJRI Hongkong, KJRI Jeddah, dan KJRI Los Angeles. Sejumlah unit/satker pusat Kemenlu juga menginisiasikan pelaksanaan forum konsultasi publik dalam rangka reviu standar pelayanan antara lain Biro Perencanaan dan Organisasi, Direktorat PWNI, dan Museum Konperensi Asia Afrika. Sekretariat Ditjen Protokol dan Konsuler memberikan inovasi dalam implementasi pelayanan publik yaitu dengan menginisiasikan pelatihan pelayanan publik inklusif bagi unit/satker Kemenlu. Saat ini, BPO masih dalam proses menyusun Kepmenlu tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI, hal ini bertujuan agar UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 dapat diturunkan menjadi payung hukum yang lebih universal di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI.

20. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023 oleh Kemen PANRB, penilaian pada kriteria Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan dimana Direktorat Konsuler menjadi ULE oleh Ombudsman RI, Kementerian Luar Negeri menduduki peringkat pertama dengan nilai 94,85. Sementara itu, Direktorat PWNI menjadi Unit Lokus Evaluasi (ULE) di bidang pelayanan jasa dengan nilai 4,15 (A-). Pada tahun 2024, Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kemenlu Tahun 2024 meraih nilai 93,27 dengan kategori "A" dan opini "Kualitas Tertinggi". Direktorat Konsuler sebagai ULE Kemenlu Tahun 2024 mendapat nilai sempurna pada 5 dimensi penilaian dari 6 total dimensi penilaian. Direktorat Konsuler terbukti telah melaksanakan perbaikan atas rekomendasi penilaian tahun sebelumnya dan monitoring evaluasi pelaksanaan pelayanan legalisasi dokumen secara berkala.

21. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator Indeks SPBE mengukur keberhasilan K/L dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Capaian Indeks SPBE Kemenlu Tahun 2024 adalah sebesar 3,93 dengan predikat ¨Sangat Baik¨, atau meningkat dari periode sebelumnya di Tahun 2023 yang mendapatkan nilai 3,26 dengan predikat ¨Baik¨. Kemenlu telah telah menerapkan kebijakan internal tata kelola SPBE, aspek perencanaan strategis SPBE, aspek teknologi informasi dan komunikasi, aspek penyelenggara SPBE, dan aspek layanan administrasi pemerintah serta aspek layanan publik berbasis elektronik. Fokus Kemenlu saat ini adalah menyusun Arsitektur dan

Peta Rencana SPBE. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat berbagai rencana transformasi digital Kemenlu. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE diharapkan dapat menampung seluruh masukan dan kebutuhan dari Satuan Kerja dan mengedepankan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dan efisien sesuai dengan visi kebijakan nasional SPBE.

22. Capaian Prioritas Nasional

Kementerian Luar Negeri memperoleh skor 98,7 pada tahun 2023. Skor ini dicapai berdasarkan hasil rencana aksi tiap satker yang dipantau secara efektif tiap triwulan melalui monev dan bimtek. Kinerja Kementerian Luar Negeri masuk dalam kategori Baik berdasarkan efektivitas IKU K/L dan Efektivitas RO K/L dalam mendukung Prioritas Nasional.

23. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kementerian Luar Negeri memperoleh skor 100 pada tahun 2023. Capaian IKU ini dihitung dengan membandingkan jumlah IKU yang capaianya >90% dengan total IKU. Dengan demikian, dapat disimpulkan Kementerian Luar Negeri hampir seluruh IKU-nya di tahun 2023 memiliki capaian >90%.

24. Opini BPK

Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri dapat meraih predikat WTP selama 7 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan Kemenlu melalui upaya rutin kegiatan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan bagi para pejabat penyusun laporan keuangan pada seluruh satker Kementerian Luar Negeri dan evaluasi data dukung penyusunan laporan keuangan seluruh satker. Pada tahun 2024, upaya ini dilanjutkan dengan adanya pelaksanaan Pra Reviu dan Pra Penelitan Renja-K/L dan RKA-K/L Perwakilan RI TA 2025, Bimtek Penyusunan Renja-K/L dan RKA-K/L Perwakilan TA 2025, Penelitian dan Reviu Dokumen RKA-K/L Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan RI TA 2025, serta Pembahasan Perubahan Permenlu No 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Akutansi Kementerian Luar Negeri.

25. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Kemenlu memperoleh nilai sebesar 82,9 di tahun 2023. Kemenlu selalu dan terus melaksanakan update data dukung tindak lanjut Itjen pada aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Internal Kementerian Luar Negeri (SIPIK) dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL BPK) setiap triwulan. Disamping itu juga dilakukan *entry meeting* dan *one on one meeting* antara auditor dan unit organisasi untuk meningkatkan koordinasi tindak lanjut rekomendasi BPK.

26. Indeks BerAkhlak

Hasil Indeks Berakhlak Kemenlu di tahun 2023 memperoleh nilai 58,7 dengan kategori B "Cukup Sehat" masih di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2024, Kemenlu melaksanakan sosialisasi dan Bimtek *core values* ASN Berakhlak di lingkungan Kementerian Luar Negeri dengan mengundang narsum dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) guna berbagi praktik baik terkait pelaksanaan *core values* ASN Berakhlak di Kemenko Marves kepada semua wakil eselon II di lingkungan Kemenlu dan melalui pelaksanaan *zoom meeting* dengan mengundang perwaklan Sesditjen/Sesbadan.

27. Survei Penilaian Integritas

Pada Tahun 2023, Kemenlu telah berhasil meraih nilai 80,54 turun sebesar 4.53 poin jika dibandingkan nilai SPI Tahun 2022 sebesar 85,07. Namun Kemenlu masih menduduki peringkat ke-3 Nasional. Untuk meningkatkan pemahaman terkait Survei Penilaian Integritas, di tahun 2024 Kemenlu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Hasil SPI 2023 dan Rencana SPI 2024 yang mengundang narasumber dari KPK. Kemenlu juga menyelenggarakan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada unit organisasi PWNI, BSKLN, dan pemberian materi serupa pada diklat persiapan penempatan bagi pejabat dinas luar negeri. Sosialisasi Kepatuhan Pengisian LHKPN juga diselenggarakan kepada seluruh pejabat/staf yang memiliki kewajiban pelaporan LHKPN sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Penyusunan Peraturan Menteri Luar Negeri terkait Pengendalian Gratifikasi juga telah dilakukan melalui Permenlu No.10 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI.

28. Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi RB Tahun 2023, Kemenlu mendapatkan nilai 88,69. Skor dinilai masih belum maksimal sehingga dapat terus ditingkatkan dimasa mendatang dengan melaksanakan evaluasi tindak lanjut. Di tahun 2024, Kemenlu melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SKM untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman staf terhadap isu terkait, penyelenggaraan *sharing best practice* juga dilakukan oleh Direktorat Konsuler dan PWNI pada unit organisasi kesetjenan.

RB Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan

RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/ kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Investasi

RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/ kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan *stunting*.

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Telah ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu: Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Percepatan Prioritas Aktual Presiden.

Kemenlu mendukung terobosan Kementerian PANRB dalam pelaksanaan RB Tematik yang berfokus pada penyelesaian isu nasional guna percepatan agenda pembangunan nasional. Kemenlu menjadikan agenda pembangunan nasional sebagai rujukan sasaran dan melaksanakan RB Tematik berfokus pada penguatan sinergi dan kolaborasi diplomasi dengan *stakeholders* terkait penyusunan progam dan kegiatan, advokasi regulasi/ kebijakan/ norm *setting* ditingkat nasional, regional dan multilateral.

A. Pengentasan Kemiskinan

1. Pembukaan Lapangan Pekerjaan melalui promosi investasi sektor Prioritas

- Tahun 2022 - Pembukaan lapangan pekerjaan melalui promosi investasi sektor prioritas kepada mitra bilateral dan regional, khususnya dalam Presidensi G20 2022
- Tahun 2023 - Pembukaan lapangan pekerjaan khususnya dalam keketuaan ASEAN 2023, f*lagship event ASEAN-Indo Pacific Forum* (AIPF)

2. Pengembalian Hak – Hak Finansial PMI di Luar Negeri

Kemenlu berupaya secara konsisten memperjuangkan hak - hak finansial PMI diantaranya gaji yang ditahan majikan, klaim asuransi kecelakaan dan kematian, kompensasi, uang diyat, dan lainya yang berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan di daerah-daerah kantong PMI. Anggaran yang digunakan adalah anggaran Pelindungan WNI di Perwakilan RI.

Pada tahun 2023, sebanyak Rp 94,6 Milyar telah berhasil dikembalikan kepada WNI/PMI, ahli waris, dan keluarga di tanah air. Hal ini secara tidak langsung telah membantu mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah kantong PMI seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung.

Pada Tahun 2024, Kementerian Luar Negeri berhasil memperjuangkan pengembalian hak–hak finansial WNI di Luar Negeri sebesar Rp 159.932.772.502. Angka tertinggi yang berhasil diperjuangkan berasal dari KBRI Phnom Penh sebesar Rp 32.925.000.000. Total angka pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dengan demikian total hak–hak finansial WNI yang berhasil diperjuangkan periode tahun 2020-2024 berjumlah Rp 689.097.190.586.

3. Penguatan Rekomendasi Kebijakan Implementasi *Sustainable Development Goals* pada Isu Pengentasan Kemiskinan dan *Stunting*

Peran aktif melalui penyampaian prakarsa/rekomendasi pada forum Regional dan Multilateral dalam perundingan, perumusan, dan implementasi *Sustainable Development Goals* termasuk didalamnya isu Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan *Stunting*. Merujuk Pasal 4 Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, strategi nasional percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan untuk mencapain target SDG's pada tahun 2030.

Kemenlu terlibat aktif dalam pelaksanaan kerja sama kesehatan dan kependudukan dalam kerangka kerja sama multilateral termasuk Penanganan isu *stunting* (gangguan pertumbuhan pada anak), yaitu dengan melaksanakan kerja sama dengan K/L teknis termasuk Kemenkes, BKKBN, NGOs serta Badan-badan PBB di Indonesia seperti UNFPA.

Sejumlah kegiatan terkait penanganan stunting telah dilaksanakan dalam bentuk dialog dan kerja sama dengan mitra, mendorong pembentukan norma global, serta advokasi potensi Kerja Sama Selatan-Selatan.

B. Peningkatan Realisasi Investasi

1. Peningkatan Investasi pada Infrastruktur Hijau dan Rantai Pasok

- Koordinator : Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
- Pelaksana : TPPE, Direktorat Asia Tengah, Direktorat Kerja Sama ASEAN
- Capaian Anggaran : 99,99%
- Realisasi *Output* : 81 Potensi Kerja Sama senilai US$ 11,700,000,000

2. Peningkatan Investasi pada Transformasi Digital

- Koordinator : Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
- Pelaksana : TPPE, Direktorat Asia Tengah, Direktorat Kerja Sama ASEAN
- Capaian Anggaran : 99,99%
- Realisasi *Output* : 8 Potensi Kerja Sama senilai US$ 2,600,000,000

3. Peningkatan Investasi pada *Sustainable Financing*

- Koordinator : Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
- Pelaksana : TPPE, Direktorat Asia Tengah, Direktorat Kerja Sama ASEAN
- Capaian Anggaran : 99,99%
- Realisasi *Output* : 4 Potensi Kerja Sama senilai US$ 729,900,000

4. Peningkatan Realisasi Investasi pada *Business Matching* dan Promosi Investasi

- ***Business Matching* :** Komitmen investasi merupakan kesepakatan tertulis dengan negara mitra oleh Perwakilan RI dalam bentuk investasi *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, forum kerja sama. Di tahun 2023, tercatat terdapat 471 Komitmen yang berhasil diperoleh Perwakilan RI.
- **Realisasi Komitmen dari Wilayah Akreditasi Perwakilan RI :** Meningkatkan peranan guna memberikan kontribusi lebih intensif pada upaya peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia serta menjaring lebih luas investor untuk dapat menanamkan modal di Indonesia, Promosi Investasi dari seluruh Perwakilan RI terealisasi sebesar US$ 36,941,000,000.
- **Promosi Investasi :** Forum/ Kegiatan/ Pameran Investasi Internasional yang dilaksanakan Perwakilan RI dapat memberikan banyak informasi strategis kepada investor mengenai peluang investasi (*outbound atau inbound*) yang dapat dilakukan di Indonesia.
- **Komitmen Investasi dalam Forum Multilateral :** Komitmen Jepang dalam melakukan investasi untuk mendukung proses transisi energi di Indonesia dalam rangka AZEC *Cooperation* dengan investasi senilai US$ 500,000,000.

C. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

1. Sistem Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri

- Portal Peduli WNI diluncurkan untuk memfasilitasi fitur Lapor Diri, Pelayanan Administrasi dan Persuratan, Penanganan Kasus dan berbagai pelayanan kekonsuleran secara *online*.
- Safe Travel untuk WNI yang berpergian ke Luar Negeri bukan untuk menetap, aplikasi ini menyediakan informasi interaktif bagi WNI yang akan atau sedang berada di luar negeri, termasuk informasi negara, himbauan perjalanan, dan tombol darurat.

Dengan adanya Portal Peduli WNI dan aplikasi *Safe Travel*, WNI di luar negeri dapat mengakses layanan dan informasi kapanpun dan dimanapun secara mudah, murah, aman, dan cepat. *Platform* digital ini memberikan berbagai manfaat bagi WNI di luar negeri, antara lain:

- Kemudahan akses: WNI tidak perlu datang langsung ke Perwakilan RI.
- Efisiensi biaya: Menghemat biaya transportasi, akomodasi, dan fotokopi dokumen.
- Ketersediaan 24/7: Layanan dapat diakses kapanpun dan dimanapun.
- Integrasi data: Memudahkan Kemenlu dan Perwakilan RI dalam memberikan pelayanan dan perlindungan yang cepat dan tepat.

2. Inovasi Pelayanan Publik di Tahun 2023 di Perwakilan RI

- Si Cool KBRI Singapura - Sistem Cashless Online, Ontime, Less Contact KBRI Singapura Tangguh dan berOrientasi Pelayanan
- SIPERMIT KBRI Kuala Lumpur - Sistem Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Malaysia Terintegrasi
- JALA IKAN KBRI Tawau - Jemput Bola Layanan Akhir Pekan

3. Digital Layanan Data Diplomasi Ekonomi dan Administrasi Pemerintahan

- INA-Access: untuk *business matching* potensi pedagangan dan investasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI
- *Single Platform* Diplomasi Ekonomi yang terintegrasi
- SIM-SDM : pengelolaan sumber daya manusia
- SIM-KEU: pengelolaan keuangan/anggaran
- Kemenlu Sign terintegrasi dengan aplikasi Tanda Tangan Elektronik
- AKSI Kemenlu: menilai capaian kinerja organisasi Unit Kerja Pusat dan Perwakilan

4. Digitalisasi Administrasi *Service Level Agreement*

- Aplikasi Flight Clearance Information System (FCIS). Flight Clearance Application System (FCAS), Electronic Clearance Approval for Indonesian Territory (E-CAIT) dan Ijin Masuk Khusus Kapal Pesiar Yatch
- Aplikasi Penerbitan Ijin Melintas di udara dan laut RI
- Aplikasi Sistem Informasi Terpadu (SIT) Protokol Konsuler penerbitan paspor dinas dan diplomatik, ijin tinggal, fasilitas resiprokal diplomatik

D. Prioritas Presiden (Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri)

Pengendalian Inflasi

- Tahun 2022 - Dokumen ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2023 - 2027 didorong untuk diadopsi dalam ASEAN Post Ministerial Conference (10+1)
- Tahun 2023 - Kemenlu mendukung Mekanisme Ketahanan Ekonomi Kawasan dan Global (Forum multilateral dan ASEAN dengan menjaga stabilitas keuangan kawasan Asia Tenggara, Konektivitas Pembayaran, Transaksi Mata Uang Lokal di ASEAN.

  Norm-Setting pada forum Multilateral:

  a. Upaya terkoordinasi dalam rangka menstabilkan pasar global dan mengatasi ketidakseimbangan ekonomi
  b. Menyuarakan kebutuhan financing dan investasi bagi negara berkembang
  c. Menyuarakan *Right to Development* (Hak atas Pembangunan) di berbagai forum multilateral
  d. Mendorong Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Bilateral & Multilateral
  e. Menyuarakan sistem pendanaan khususnya arsitektur dan restukturisasi utang yang lebih adil

- 10 prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di forum regional maupun multilateral terkait upaya menjaga stabilitas ekonomi kawasan dan global, yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) Prakarsa/rekomendasi terkait konektivitas pembayaran dan transaksi mata uang *local* di ASEAN pada KTT ASEAN ke-42 (10-11 Mei 2023) dan KTT ASEAN ke-43 (5-7 September 2023), yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di dalam negeri a.l. dalam bentuk:
     - Penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan penggunaan mata uang *local* dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra, antara Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS. (5 September 2023).
     - Peresmian implementasi interkoneksi pembayaran QR antara Indonesia (Bank Indonesia) dengan Singapura (Monetary Authority Singapore), pada tanggal; 17 November 2023.

- 8 (delapan) Prakarsa/rekomendasi dalam sejumlah forum G20, COP 28 dan *Climate Ambition Summit* terkait pengembangan ekonomi hijau maupun transisi energi, termasuk kerangka pembiayaan, yang diharapkan tidak berdampak pada kenaikan inflasi melainkan justru mendorong stabilitas ekonomi; telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di dalam negeri a.l. dalam bentuk:
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ POJK.04/2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon
  - Peraturan Menteri Keuangan No 103/ 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan
  - Penerbitan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia oleh OJK pada Februari 2024.

Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Promosi Produk Dalam Negeri melalui hibah/kerja sama teknik
   Kemenlu turut mendorong penggunaan produk-produk Indonesia dalam hibah Pemerintah RI kepada negara sahabat. Beberapa produk dalam negeri yang telah dimanfaatkan dalam proses pemberian hibah antara lain produk farmasi dan alat kesehatan, vaksin dan transportasi. Dalam kurun waktu 2020-2024, setidaknya telah dilakukan pemberian hibah yang melibatkan produk Indonesia dalam 7 (tujuh) hibah dengan nilai sebesar Rp. 59.744.667.966,000.

2. Promosi Perdagangan (ekspor) produk unggulan Indonesia di Luar Negeri
   Kemenlu terus melakukan strategi penguatan diplomasi secara berkesinambungan guna mendukung performa ekspor nasional, melalui promosi produk-produk unggulan di luar negeri. Langkah tersebut tentunya juga dilaksanakan dalam rangka mendukung agenda nasional dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri guna menopang industri nasional. Pada tahun 2023, upaya Kemenlu dan Perwakilan RI dalam melakukan promosi, fasilitasi dan akselerasi ekspor, berhasil merealisasikan 381 komitmen perdagangan dengan negara mitra dengan nilai USD 36 miliar. Capaian tersebut meningkat signifikan dibanding pencapaian tahun 2022 yaitu 234 komitmen perdagangan dengan nilai USD 6,3 miliar.

3. Promosi Produk dalam negeri unggulan Indonesia melalui *Platform* Digital Ina-Access
   Kolaborasi promosi antar pemangku kepentingan nasional juga didukung dengan inovasi digital yang dilakukan Kemenlu. Melalui website www.ina-access.com, Kemenlu memfasilitasi kerja sama para pelaku usaha dengan lebih terarah. Kedepan website ini diproyeksikan menjadi portal perdagangan Indonesia dengan seluruh negara mitra dari berbagai kawasan. Utilisasi Ina-Access diperkuat dengan penyelenggaraan forum-forum bisnis berorientasi kawasan, seperti *Indonesia-Europe Business Forum* (IEBF) dan Indonesia-Latin *America and the Caribbean Business Forum* (INA-LAC BF).

4. Optimalisasi Penggunaan Belanja PDN pada Belanja Kemenlu
   Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri, diantaranya melalui penerbitan 13 (tiga belas) etalase katalog sektoral Kemenlu, dimana satu diantaranya adalah etalase "Galeri Nusantara" yang menampung produk khas Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh Satker Perwakilan RI di luar negeri untuk mempromosikan produk khas Indonesia di luar negeri. Selama 2023, tercatat 4.127 produk tayang pada katalog sektoral Kemenlu, dimana 98,8% produk listing tersebut merupakan produk dalam negeri. Adapun transaksi pada katalog sektoral Kemenlu tersebut di tahun 2023 mencapai Rp 50,03 Milyar.

   Berdasarkan catatan LKPP, total perencanaan PDN Kemenlu pada tahun 2023 (*exclude* belanja pengadaan Satker Perwakilan RI di luar negeri) adalah sebesar Rp 494,1 Milyar atau 76,38% dari pagu belanja pengadaan Satker Pusat Kemenlu sebesar Rp 896,8 Milyar. Adapun tingkat realisasi PDN terhadap komitmen PDN mencapai 81,60% atau sebesar Rp 558,9 Milyar.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam rangka merealisasikan IK Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2024:

1. Rapat Reviu Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan RB Tahun 2024;
2. Rapat Evaluasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023 dan Persiapan PEKPP Tahun 2024;
3. Rapat Pembahasan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), Standar Pelayanan (SP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rangka Fasilitasi Pelayanan Publik;
4. Rapat Monitoring Pengisian SINOVIK Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Unit Kerja dan Perwakilan Kementerian Luar Negeri;
5. Rapat Pengusulan Lokus Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan Tahun 2024;

6. Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu Tahun 2024
7. *Workshop* Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu Tahun 2024;
8. Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kepmenlu tentang Pedoman Sistem Kerja dalam rangka Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
9. Rapat Koordinasi Evaluasi RB Tahun 2024 dan Persiapan Pelaksanaan RB Tahun 2025;
10. Bimbingan Teknis *Training of Trainers* Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat;
11. Rapat Pembahasan Rancangan Kepmenlu Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kemenlu dan Perwakilan RI;
12. Rapat Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Luar Negeri 2024;
13. Rapat Teknis Pengisian Portal RB 2024.

Kendala dan Tantangan

Sejumlah kendala tantangan yang dihadapi Kemenlu dalam upaya mencapai sasaran dan target RB yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Koordinasi kerja Tim RB di masing-masing Unit (Satker Eselon I) dengan Sekretariat BPO masih belum optimal;
2. Kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi RB General dan RB Tematik perlu ditingkatkan lagi;
3. Menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai dokumen perencanaan strategis berisi rencana transformasi digital Kemenlu dan menyusun Arsitektur *To-Be* sebagai visi sistem informasi Kemenlu di waktu mendatang;
4. Memperluas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) ke Satker Perwakilan RI dan meningkatkan pengelolaannya, memastikan terlindunginya hak-hak pelapor terkait tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan *Whistle Blowing System* (WBS), menjadikan LHKASN dan LHKPN sebagai bagian dari *know your employee*, membangun *forum sharing knowledge* untuk mengatasi permasalahan intensitas mutasi pegawai;
5. Belum adanya standarisasi pelayanan dan terkait penyelenggaran pelayanan publik yang dilakukan oleh satuan/unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
6. Mempertajam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mengoptimalkan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka mengindentifikasi pengguna jasa dan publik, memanfaatkan SKM dan FKP untuk kemajuan, meningkatkan budaya pelayanan prima.

Upaya Perbaikan

Untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam upaya pencapaian RB Kemenlu, hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Menyampaikan reminder ke seluruh Unit (Unor Eselon I) Kemenlu setiap awal tahun paralel dengan rapat koordinasi Tim Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik/ Tim RB Kemenlu pada level Organisasi/Pusat;
2. Menyelenggarakan rapat teknis serta koordinasi terkait pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RB General dan Tematik;
3. Melakukan harmonisasi dan reviu peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenlu yang telah ditetapkan dan masih berlaku serta mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang perlu dicabut, diubah, atau dibentuk baru;
4. Meningkatkan pemahaman tentang penerapan SPBE khususnya pada domain arsitektur bisnis, data dan informasi, arsitektur layanan untuk menuju layanan Pemerintahan yang terintegrasi;
5. Menyampaikan *reminder* ke Satker Perwakilan RI terkait pembentukan UPG serta melakukan koordinasi pemantauan peningkatan penguatan pengawasan pada unit organisasi di Kemenlu (pengelolaan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan benturan kepentingan, pembangunan ZI, serta pelaporan LHKPN dan LHKASN);
6. Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan acuan atau standar kepada unit kerja pusat dan perwakilan dalam menyusun standar pelayanan, maklumat pelayanan, Forum Kebijakan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat.

Proyeksi Kedepan

Sebagai langkah ke depan, Kemenlu akan melakukan sejumlah upaya agar implementasi RB dapat terus ditingkatkan:

1. Melaksanakan internalisasi dan diseminasi informasi secara berkelanjutan kepada Tim RB Internal Kemenlu Tahun 2023-2024 yang terdiri atas wakil/penanggung jawab RB dari seluruh Unit Kerja, guna memastikan informasi dan implementasi RB terlaksana secara menyeluruh;
2. Melanjutkan internalisasi *Road Map* RB Kemenlu 2023-2024 pada RB General dan RB Tematik yang menjadi ampuan tiap unit kerja dan memiliki dampak bagi percepatan prioritas program pembangunan nasional;
3. Meneruskan dan memperkuat reformasi administrasi yang selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*;
4. Memastikan terselenggaranya praktik administrasi publik yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, tidak diskriminatif, profesional, dan berbasis pada kepentingan publik dan memberikan dampak kepada masyarakat luas;
5. Mendorong inovasi pada unit organisasi di Kemenlu, khususnya pada inovasi pemberian pelayanan publik yang memberikan dampak kepada masyarakat yang optimal sesuai dengan hasil dari SKM dan FKP yang mendorong inovasi sistem pelayanan publik yang lebih baik;
6. Semakin bertambahnya jumlah unit/saturan kerja yang memenuhi standarisasi Penyelenggaraan pelayanan publik sesuai acuan Undang-undang No. 25 Tahun 2009;
7. Mendorong peningkatan kesadaran kinerja pada unit/ satuan kerja sehingga capaian yang sudah diraih dari tingkat unit terendah dapat diklaim menjadi capaian organisasi baik dari sisi RB General maupun RB Tematiu;
8. Mengupayakan peningkatan jumlah perolehan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang baru kedepannya;
9. Mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan utama dan rencana aksi khususnya terkait 28 indikator penilaian RB dengan menyesuaikan dengan parameter dan standar yang telah ditetapkan oleh instansi meso.

Dokumentasi

Gambar III.1 Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Sekretariat Jenderal, Pembahasan tentang Peningkatan Nilai RB General Kementerian Luar Negeri (Jakarta, 5 Maret 2024).

Gambar III.2 Pertemuan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam rangka dukungan terkait RB dan Pelayanan Publik, di Kantor Kementerian PANRB (Jakarta 20 Maret 2024).

Gambar III.3 Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu Tahun 2024 bersama Asdep Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia serta Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (8 Agustus 2024).

Gambar III.4 *Workshop* Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu Tahun 2024 (Jakarta 2-5 September 2024)

Gambar III.5 Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kepmenlu tentang Pedoman Sistem Kerja dalam rangka Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (Bogor, 6-7 September 2024).

Gambar III.6. Rapat Evaluasi Terhadap 28 Indikator RB General Tahun 2024, Penetapkan Lokus Evaluasi RB Tahun 2025 dan Penginputan Terhadap Portal RB (Bandung, 25-28 September 2024).

Gambar III.7 Pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam rangka konsolidasi penerapan RB di lingkungan Kementerian Luar Negeri (Jakarta, 4 Oktober 2024).

Gambar III.8. Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia mewakili Kementerian Luar Negeri telah berpartisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2024 dan mendapat penghargaan sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Predikat “Pelayan Prima” (Jakarta, 8 Oktober 2024).

Gambar III.9. *Workshop* Reviu Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 -2024 dan Persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 (Jakarta, 13 November 2024).

Gambar III.10. Direktorat Konsuler mewakili Kementerian Luar Negeri telah berpartisipasi dalam proses Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI dan meraih Peringkat 3 dengan nilai 93,27 (Jakarta, 14 November 2024)

Gambar III.11. Heru H. Subolo, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat di Luar Negeri sedang menerima Penghargaan Peringkat 3 Penganugerahan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Jakarta, 14 November 2024).

Gambar III.12. Sosialisasi dan *Sharing Knowledge* Kebijakan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI (Semarang, 26 November 2024).

Analisis IK S1.2

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri

Deskripsi IK

IK S1.2 Nilai Evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada IK ini akan diukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah berhasil melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kemen PANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Luar Negeri yang berpedoman pada Permen PANRB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari pelaksanaan evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran dari evaluasi AKIP adalah:

a. Memperoleh infomasi mengenai implementasi AKIP;
b. Menilai tingkat implemetasi SAKIP;
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan AKIP; dan
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Kemen PANRB secara rutin melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Luar Negeri setiap tahunnya sesuai dengan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi yang dilakukan meliputi 4 (empat) komponen dengan bobot sebagai berikut:

Tabel III.6. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akintabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Dari data diatas akan ditemukan hasil akhir nilai AKIP Satker dengan klasifikasi sebagai berikut:

AA	Skor » 90-100	Sangat Memuaskan	CC	Skor » 50-60	Cukup
A	Skor » 80-90	Memuaskan	C	Skor » 30- 50	Kurang
BB	Skor » 70-80	Sangat Baik	D	Skor » 0-30	Sangat Kurang
B	Skor » 60-70	Baik			

Informasi Kinerja

Berikut ini pencapaian IK S1.2 Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu tahun 2024:

Tabel III.7. Capaian IK S1.2 Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian IK*)
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	Nilai evaluasi AKIP yang ditetapkan oleh Kemen PANRB	**80,86 (A)**

Realisasi 2024	Target 2024	Capaian
80,86 (A)	79.80 (BB)	101,33 %

Sumber: AKSI

Tabel di atas mencatat bahwa realisasi nilai evaluasi AKIP Kemenlu tahun 2024 mencapai 80,86, yang menandai pertama kalinya Kemenlu memenuhi target Nilai AKIP pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebesar 79,80. Dengan pencapaian ini, capaian AKIP Kemenlu tahun 2024 tercatat sebesar 101,33%. Berdasarkan hasil evaluasi, Kemenlu memperoleh nilai **80,86** atau predikat **"A" (Memuaskan)** sebagaimana tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/613/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kemenlu Tahun 2024. Evaluasi tersebut menunjukkan implementasi SAKIP yang baik pada tingkat Kementerian/Lembaga dan sebagian besar unit kerja, di mana instansi pemerintah dan unit kerja berhasil memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Nilai evaluasi AKIP Kemenlu didukung oleh nilai masing-masing komponen. Rincian nilai per komponen yang mendukung peningkatan nilai evaluasi AKIP Kemenlu tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perolehan realisasi Nilai AKIP Kemenlu Tahun 2024, menandai pertama kalinya Kemenlu memenuhi target PK dan target Renstra Nilai AKIP pada 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel III.8. Perbandingan Nilai AKIP Kemenlu Tahun 2023 dan Tahun 2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP	
		2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	25,79	26,41
Pengukuran Kinerja	30	21,98	22,36
Pelaporan Kinerja	15	13,39	13,48
Evaluasi Akintabilitas Kinerja Internal	35	17,99	18,61
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		79,15	80,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

Kemen PANRB menyampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa Implementasi SAKIP pada Kementerian Luar Negeri sudah **"Memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.**

Kenaikan perolehan nilai evaluasi AKIP di Tahun 2024, diperoleh juga dari tindak lanjut sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang telah dilakukan di Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Menyempurnakan pohon kinerja dengan memetakan kinerja yang berkaitan antar unit kerja maupun instansi lain.
b. Mengoptimalkan pengisian aplikasi AKSI dan mengintegrasikannya dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.
c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP seluruh unit kerja terutama pada unit kerja yang belum berpredikat ¨BB¨.
d. Melaksanakan sosialisasi revisi Perjanjian Kinerja (PK) dalam hal penetapan target kinerja agar memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
e. Menerbitkan Keputusan Menteri Luar Negeri No. 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
f. Sedang mengembangkan sistem teknologi informasi terkait pelaksanaan evaluasi AKIP internal Kementerian Luar Negeri.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.9 Target, Realisasi, dan Capaian IK S1. 2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri

S1.2

	Target	Realisasi	Capaian
2020	78	77,83	99,78%
2021	79	78,59	99,48%
2022	79,5	78,81	99,13%
2023	79,80	79,15	99,19%
2024	79,80	80,86	101,33%

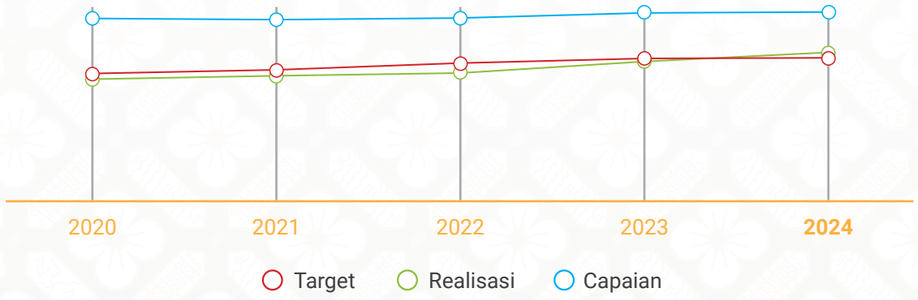

Melihat realisasi hasil evaluasi AKIP Kemenlu diatas, dapat dilihat bahwa nilai evaluasi AKIP Kemenlu terus mengalami peningkatan, tergambar perolehan nilai evaluasi AKIP tersebut terus meningkat. Pada Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Nilai yang didapatkan akhirnya mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Kemenlu selalu melakukan perbaikan dari rekomendasi yang diberikan dan juga peningkatan akuntabilitas kinerja dari Kemenlu.

Disamping peningkatan nilai evaluasi AKIP Kemenlu, terlihat juga bahwa capaian Kemenlu meskipun mengalami penurunan pada 4 tahun belakang, namun akhirnya capaian Kemenlu mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 99,78% (2020), 99,48% (2021), 99,13% (2022), 99,19% (2023), dan 101,33% (2024) hal tersebut dikarenakan selain peningkatan akuntabilitas kinerja dan juga tindak lanjut rekomendasi dari Kemen PANRB, Kemenlu juga terus meningkatkan target pencapaian nilai evaluasi AKIP pada tahun berikutnya. Dapat dilihat bahwa target Kemenlu selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Kemenlu akan terus berupaya untuk melakukan peningkatan dan upaya perbaikan guna peningkatan nilai evaluasi AKIP.

Target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 80,5 sedangkan target 2024 sesuai PK adalah 79,80, terdapat perbedaan target Renstra dengan target PK di Tahun 2024 dikarenakan evaluasi dari hasil realisasi dan capaian dari Tahun 2020 - 2023 yang tidak mencapai target maksimal sehingga target Tahun 2024 disesuaikan. Namun demikian, jika dilihat dari realisasi Tahun 2024 sebesar 80,86 sudah melebihi dari target akhir Renstra Tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Kemenlu senantiasa meningkatkan *awwarness* dan mengimplementasikan SAKIP dalam pelaksanaan kegiatan pada unit organisasi masing-masing. Terbukti dengan peningkatan nilai AKIP dari tahun ke tahun pada dan kenaikan jumlah predikat yang lebih baik pada Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan RI di luar negeri sebagai berikut:

Tabel III.10. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi dan Perwakilan RI

2020	2021	2022	2023/2024
A : 1 Pusat	A : 3 Pusat	A : 5 Pusat	A : 17 Pusat
BB: 10 Pusat; 116 Perwakilan	BB: 7 Pusat; 118 Perwakilan	BB: 5 Pusat; 123 Perwakilan	BB: 52 Pusat; 129 Perwakilan
B : 12 Perwakilan	B : 6 Perwakilan	B : 6 Perwakilan	B : 1 Perwakilan
CC: 1 Perwakilan	CC: 5 Perwakilan	CC: 0 Perwakilan	CC: 0 Pusat dan Perwakilan
C : 2 Perwakilan	C : 2 Perwakilan	C : 1 Perwakilan	C : 0 Pusat dan Perwakilan

Dalam rangka pencapaian target nilai hasil evaluasi AKIP, Kemenlu terus menerus berupaya mengimplementasikan SAKIP sepanjang tahun 2024, hal-hal yang menjadi fokus Kemenlu dalam pengimplementasian SAKIP meliputi beberapa aspek, antara lain:

» **Perencanaan kinerja Kemenlu**
- Kemenlu telah mendukung upaya optimalisasi kebijakan luar negeri melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini dijabarkan ke dalam penjenjangan kinerja dan dituangkan dengan baik dalam Perjanjian Kinerja (PK) di setiap level. Setiap PK mencakup empat perspektif utama, yaitu perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis, perspektif keuangan, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

» **Pengukuran kinerja Kemenlu**
- Kemenlu secara rutin melakukan pengukuran kinerja dan pengumpulan data terkait realisasi kinerja serta rencana aksi melalui AKSI. Pemantauan penggunaan anggaran juga dilakukan setiap triwulan hingga tingkat perwakilan.

» **Pelaporan Kinerja Kemenlu**
- Kemenlu telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 untuk tingkat Kementerian dan Perwakilan. Laporan ini telah direviu oleh tim Inspektorat sebelum diunggah ke situs web masing-masing, sehingga format dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

» **Evaluasi Kinerja Internal Kemenlu**
- Pada tahun 2024, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP di seluruh unit kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kendala dan Tantangan

Meskipun hasil evaluasi nilai AKIP Kemenlu belum mencapai target yang ditetapkan, namun nilai AKIP Kemenlu selalu meningkat setiap tahun. Kemenlu selalu mencoba menetapkan target yang tinggi dengan harapan dapat mendorong peningkatan upaya perbaikan dan juga inovasi dalam hal akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI. Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain:

» **Perencanaan Kinerja**
Penjabaran kinerja masih belum sepenuhnya mencerminkan kerangka logis yang mendukung pencapaian target kinerja, dan hubungan lintas fungsi antar unit kerja maupun antar instansi terkait belum terjalin secara optimal. Selain itu, Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab Kemenlu juga belum dijabarkan hingga ke tingkat paling bawah.

» **Pengukuran Kinerja**
Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal dalam menetapkan target untuk tahun berikutnya. Selain itu, pemberian Tunjangan Kinerja yang didasarkan pada pencapaian kinerja organisasi dan individu belum diterapkan secara merata kepada seluruh pegawai Kemenlu, sehingga dampak dari pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi prioritas bagi seluruh pegawai Kemenlu. Proses interkoneksi aplikasi e-Kinerja 2.0/AKSI (Aplikasi Kinerja Organisasi) Kemenlu dan MonSakti berjalan lebih lama daripada *timeline* yang ditentukan.

» **Pelaporan Kinerja Kemenlu**
Belum semua laporan kinerja unit kerja mencantumkan analisis mendalam mengenai penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja, serta strategi yang akan dilakukan ke depan untuk mencapai sasaran organisasi. Selain itu, laporan kinerja juga belum secara rinci menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja.

» **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
Pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara rutin, sehingga belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja di tingkat Kementerian maupun unit kerja. Selain itu, hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat untuk memberikan penghargaan dan sanksi di lingkungan internal unit kerja.

Upaya Perbaikan

Berdasarkan Rekomendasi yang disampaikan Kemen PANRB pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, Kemenlu telah melakukan tindak lanjut secara progresif sebagai upaya perbaikan atas rekomendasi tersebut, antara lain:

» **Perencanaan Kinerja**
Kemenlu telah memetakan kinerja melalui pendekatan lintas instansi (*crosscutting*) sebagai bentuk kolaborasi dalam pencapaian kinerja hingga tingkat perwakilan. Pemetaan ini dituangkan dalam dokumen *cascading* yang tersedia dalam aplikasi AKSI, yang digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Penyusunan *cascading* telah disesuaikan hingga tingkat operasional dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga menyusun rencana aksi guna memastikan setiap anggaran dan kegiatan mendukung tercapainya target kinerja.

Kemenlu telah memetakan kinerja melalui pendekatan lintas instansi (*crosscutting*) sebagai bentuk kolaborasi dalam pencapaian kinerja hingga tingkat perwakilan.

» **Pengukuran Kinerja**
Hasil pengukuran kinerja ini dimanfaatkan sebagai dasar perhitungan untuk pemberian tunjangan kinerja di Kementerian Luar Negeri, di mana nilai organisasi dari setiap unit kerja menjadi acuan dalam menentukan predikat individu yang berpengaruh pada tunjangan kinerja bagi sebagian besar pegawai.

» **Pelaporan Kinerja**
Laporan kinerja pada tingkat Kementerian dan unit organisasi menyajikan analisis mendalam yang mencakup realisasi kinerja, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, pencapaian terhadap target jangka menengah, serta tolok ukur capaian nasional dan internasional. Selain itu, laporan ini juga menyertakan analisis program kegiatan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaannya.

» **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
Kementerian telah menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil evaluasi internal, yang diumumkan secara publik dan dilaporkan kepada pimpinan tertinggi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai AKIP setiap tahunnya.

Analisis Program Pendukung Capaian

Berikut adalah capaian utama Kementerian Luar Negeri pada tahun 2024 yang mendukung ketercapaian target untuk IK S1.2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri:

1. Perencanaan Kinerja:
Dalam menindaklanjuti peningkatan nilai evaluasi AKIP pada perencaan kinerja, Kemenlu telah melakukan kegiatan berikut:
a. Dialog Kinerja Organisasi pada level Kemenlu-*wide* yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri maupun Wakil Menteri Luar Negeri.
b. Penetapan target kinerja Kemenlu-*wide* yang dituangkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja Menlu yang selanjutnya *cascading* ke level Kemenlu-*one* (Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI) serta level Kemenlu-*two* (Unit Organisasi Eselon II). Penetapan target kinerja organisasi menjadi acuan dalam penetapan target kinerja di level individu.
c. Penyelarasan perencanaan kinerja organisasi dengan sasaran strategis dalam penjenjangan kinerja melalui penyusunan pohon kinerja pada tingkat Pusat dan Perwakilan.
d. Penyelarasan target kinerja melalui revisi informasi kinerja yang tertuang pada aplikasi nasional Kemenkeu dan Bappenas, sehingga target kinerja dan pelaksanaannya lebih riil sesuai kondisi di lapangan dan terukur.

Dialog Kinerja Organisasi pada level Kemenlu-*wide* dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri maupun Wakil Menteri Luar Negeri.

2. Pengukuran Kinerja
Kegiatan yang telah dilakukan Kemenlu terkait pengukuran kinerja sebagai berikut:
a. Revisi ketentuan sistem manajemen kinerja Kemenlu sesuai ketentuan terkini
b. Penentuan *tagging* anggaran yang menggunakan Standar Biaya Khusus pada satuan kerja Kemenlu di Pusat
c. Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam jumlah dan kapasitas SDM Evaluator APIP, termasuk bimtek evaluasi implementasi SAKIP
d. Pemanfaatan aplikasi AKSI untuk pelaporan dan pengukuran capaian kinerja organisasi.

3. Pelaporan Kinerja
Pada tahap pelaporan, Kemenlu telah melakukan beberapa kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas yaitu:
a. Penguatan kapasitas pemahaman pengelolaan kinerja dan anggaran serta penginputan aplikasi perencanaan, pelaporan dan monev kinerja secara rutin-berkala kepada SDM Pengelola Kinerja (a.l. operator, MKO/SMKO, MKP Satker Pusat/ Perwakilan)
b. Kemenlu juga telah memberikan asistensi khusus *one-on-one* bagi Perwakilan guna meningkatkan kualitas pelaporan kinerja. Hasilnya, peningkatan jumlah Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan dengan kategori nilai AKIP A dan BB
c. *Sharing knowledge* mengenai pedoman penyusunan LKj Kemenlu bagi K/L lain. Kemenlu telah hadir pada kegiatan *Kick-Off Meeting* Penyusunan LKj LKPP untuk *sharing knowledge* mengenai langkah-langkah dan proses penyusunan laporan kinerja yang dapat dijadikan *benchmark* bagi LKPP.
d. Bimtek Renja dan RKA K/L untuk menyelaraskan program kegiatan seluruh unit organisasi Pusat dan Perwakilan RI pada Juni 2023.
e. Bimtek perencanaan dan monev kinerja melibatkan seluruh unsur pengelola kinerja di Pusat dan Perwakilan RI
f. Pemberian panduan mengenai pelaporan capaian kinerja/ anggaran pada aplikasi monev kinerja AKSI, SMART, e-monev
g. Penyusunan Panduan Manajemen Kinerja 101 sebagai rujukan bagi Manajer Kinerja dalam melaksanakan tugas manajemen kinerja
h. Penyempurnaan Aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi (AKSI)

Kemenlu telah memberikan asistensi khusus *one-on-one* bagi Perwakilan guna meningkatkan kualitas pelaporan kinerja. Sehingga memperoleh hasil peningkatan jumlah Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan dengan kategori nilai AKIP "A" dan "BB".

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
a. Pelaksanaan evaluasi AKIP untuk seluruh Unit Organisasi, Unit Kerja dan Perwakilan RI yang memadai, merujuk pada Keputusan Inspektur Jenderal (Kepirjen) No. 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021.
b. Kemenlu telah memberikan penghargaan kepada Unit Organisasi/Unit Kerja Pusat dan Perwakilan dengan nilai AKIP tertinggi berdasarkan hasil evaluasi sistem AKIP di tahun 2021.

Proyeksi Kedepan

Peningkatan nilai AKIP terus diupayakan oleh Kemenlu setiap tahunnya dan Kemenlu juga berkomitmen untuk tetap mendapatkan nilai A (memuaskan). Dengan adanya rekomendasi atas Hasil Evaluasi AKIP Kemenlu, menjadi pedoman bagi Kemenlu untuk selalu melakukan berbagai upaya perbaikan kedepannya.

Beberapa proyeksi kedepan Kemenlu untuk meningkatkan kualitas implementasi AKIP yaitu:

» **Perencanaan Kinerja**
Kemenlu akan memastikan rencana aksi yang disusun sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru serta melakukan peninjauan terhadap rencana aksi satuan kerja, dengan memastikan bahwa seluruh kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) didukung oleh langkah-langkah yang selaras untuk mencapai target kinerja tersebut.

» **Pengukuran Kinerja**
Kemenlu akan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja bagi seluruh pegawai serta sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi. Selain itu, Kemenlu juga akan mengoptimalkan penggunaan aplikasi kinerja untuk memastikan informasi yang tersedia dapat digunakan dalam menyesuaikan target selama tahun berjalan.

» **Pelaporan Kinerja**
Kemenlu akan memaksimalkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai acuan dalam memperbaiki penetapan target, strategi, dan aktivitas dalam perencanaan kinerja, sehingga realisasi pencapaian kinerja dapat terus meningkat setiap tahunnya.

» **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
Kemenlu akan meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal pada unit kerja yang dievaluasi. Selain itu, Kemenlu akan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP internal, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Dokumentasi

Gambar III.13. Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri dan seluruh Pejabat Eselon I (Jakarta, 5 Februari 2024).

Gambar III.14. Kegiatan Pembahasan Indikator dan Target RPJMN 2025 – 2029 serta Sinkronisasi Target Kinerja Pusat dan Perwakilan RI Tahun 2024 (Bogor, 19 – 23 Maret 2024).

Gambar III.15. Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2023 dan Triwulan I TA 2024 serta Bimbingan Teknis Perencanaan dan Monev Kinerja (Jakarta, 22-25 April 2024).

Gambar III.16. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Tematik Nasional Berdimensi Hubungan Luar Negeri yang Diampu oleh Kemenlu s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan Sosialisasi Kepmenlu Juknis Penyusunan dan Pengelolaan *Data Economic Intelligence* (DEI) Perwakilan RI (Jakarta, 9-11 September 2024).

Analisis IK S1.3

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Deskripsi IK

Merujuk Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. 5 Tahun 2021, dalam rangka memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) telah mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka diperlukan adanya penilaian maturitas (tingkat kematangan) SPIP terintegrasi yang dilakukan secara mandiri oleh K/L/D. Penilaian tingkat maturitas Kemenlu dilakukan dengan tujuan untuk dapat memperoleh tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun 2023-2024. Adapun manfaat dari penentuan nilai Maturitas SPIP ini diharapkan dapat berguna bagi upaya penguatan pencegahan praktek indikasi korupsi di lingkungan internal Kemenlu, dan sekaligus dapat menciptakan sistem pengendalian intern guna pencegahan tindakan koruptif.

IK Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan, serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan organisasi, dan semakin berkualitas birokrasi. Merujuk Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021, disampaikan bahwa Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan penilaian atas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK). MRI sendiri merupakan indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Sedangkan IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Rincian pembobotan untuk masing-masing nilai disajikan pada tabel sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021, Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan penilaian atas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Tabel III.11. Bobot Komponen, Unsur dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen Unsur dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/Subunsur	Bobot Komponen
Penetapan Tujuan		**40.00%**
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
Sub Jumlah Perencanaan	100%	
Struktur dan Proses		**30.00%**
Lingkungan Pengendalian		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	

Komponen Unsur dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/Subunsur	Bobot Komponen
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	
Penilaian Risiko		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
Kegiatan Pengendalian		
Reviu atas Kinerja Instans1 Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungs1 (3.6)	2.27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%	
Informasi dan Komunikasi		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
Pemantauan		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%	
Sub Jumlah Struktur dan Proses	100%	
Pencapaian Tujuan		**30.00%**
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi		
Capaian *Outcome*	15%	
Capaian *Output*	15%	
Keandalan Pelaporan Keuangan		
Opini LK	25%	
Pengamanan atas Aset		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan		
Temuan Ketaatan	20%	
Sub Jumlah Hasil	100%	
Total Bobot		100%

Tabel III.12. Pembobotan Komponen dan Area Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen
Perencanaan		**40.00%**
Kualitas Perencanaan	40%	
Kapabilitas		**30.00%**
Kepemimpinan	5.00%	
Kebijakan Manajemen Risiko	5.00%	
Sumber Daya Manusia	5.00%	
Kemitraan	2.50%	
Proses Manajemen Risiko	12.50%	
Hasil		**30.00%**
Aktivitas Penanganan Risiko	18.75%	
Outcomes	11.25%	
Total Bobot		100%

Tabel III.13. Pembobotan Pilar dan Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Pilar/Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	-	**48%**
Kebijakan Antikorupsi	9.60%	
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7.20%	
Dukungan Sumber Daya	7.20%	
Power (Kuasa & Wewenang)	14.40%	
Pembelajaran Antikorupsi	9.60%	
Penerapan Strategi Pencegahan	-	**36%**
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9.00%	
Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	3.60%	
Kepemimpinan Etis	9.00%	
Integritas Organisasional	7.20%	
Iklim Etis Prinsip	7.20%	
Penanganan Kejadian Korupsi	-	**16%**
Investigasi	8.00%	
Tindakan Korektif	8.00%	
Total Bobot		100%

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Kepala (Perka) BPKP No. 5 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.14 Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Bobot Pilar
Rintisan	1	1,0 < Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 < Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 < Nilai < 4,0
Terkelola/Terukur	4	4,0 < Nilai < 4,5
Optimum	5	Pada Nilai > 4,5

Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Optimum (Level 5)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Terkelola dan Terukur (Level 4)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Terdefinisi (Level 3)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Berkembang (Level 2)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya mash belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.

Rintisan (Level 1)

Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.

Prosedur penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen sampai dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP untuk kemudian dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Evaluator dari BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Pada tanggal 12 Desember 2024, tim evaluator BPKP menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 melalui Surat No. PE.09.03/SP-146/D2/02/2024. Laporan Hasil Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri telah **sesuai** dengan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D (**skor 88,97%**), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.15. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

No.	Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Rata-rata Tertimbang
1.	Persiapan	90,97%	20%	18,19%
2.	Pelaksanaan	88,57%	60%	53,14%
3.	Penyusunan Laporan Penilaian	88,18%	20%	17,64%
Rata-Rata Skor				**88,97%**

Dan Hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.16. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

No.	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,860
2.	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	3,294
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,910

Tingkat maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh Kemenlu berada pada level 3 atau tingkat "terdefinisi". Tingkat SPIP Kemenlu pada Level 3 berarti bahwa Kemenlu telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dan pengendalian intern telah dilaksanakan namun masih perlu ditingkatkan dalam hal efektivitasnya.

Prosedur penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen sampai dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP untuk kemudian dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Evaluator dari BPKP.

Informasi Kinerja

Tabel III.17. Capaian IK S1.3 Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2024

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Tingkat Maturitas SPIP	Nilai Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Luar Negeri dinilai oleh BPKP	**3,860 (Skala 5)**

Realisasi	Target	Capaian
3,860 (Skala 5)	3,6 (Skala 5)	107,22%

Sumber: AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK S1.3 Tingkat Maturitas SPIP tercatat sebesar 3,860 (Skala 5), dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 3,6 (skala 5). Dengan demikian, capaian IK mencapai 107,22%.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.18. Target, Realisasi, dan Capaian IK S1. 3 Tingkat Maturitas SPIP

IK S1.1 "Tingkat Maturitas SPIP" baru diadopsi pada tahun 2024 setelah adanya perubahan arah kebijakan pimpinan. Selain itu, IK tersebut juga merupakan amanat dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Perka BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada K/L/D dikeluarkan tahun 2021 dan disosialisasikan kepada K/L/D pada tahun 2022 sehingga Kemenlu baru melaksanakan evaluasi SPIP kembali pada tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kemenlu memperoleh Nilai 3,2. Mempertimbangkan pentingnya dan kontribusi Satker Pusat dan Perwakilan terhadap penilaian SPIP Terintegrasi Kemenlu serta berdasarkan hasil evaluasi SPIP 2023 maka SPIP Terintegrasi menjadi IK pada Satker BPO tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk target akhir Renstra Tahun 2024 tidak ada.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Capaian IK Nilai Tingkat Maturitas SPIP Kemenlu Tahun 2024 berada di atas target Perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena didukung oleh pelaksanaan penerapan SPIP Terintegrasi sehingga memenuhi seluruh komponen penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP. Namun demikian, Kemenlu terus berupaya menerapkan penyelenggaraan SPIP dengan mengintegrasikan pengelolaan risiko dalam proses perencanaan strategis, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target organisasi secara lebih terukur dan terstruktur yang mendorong Kemenlu untuk menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada manajemen risiko di seluruh tingkat organisasi, sehingga risiko dapat dikelola secara sistematis dan konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil Evaluasi Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai berikut:

A. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Kemenlu RI telah mampu merumuskan kinerja serta indikator dan targetnya dan telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

1) Kualitas Sasaran Strategis

Kemenlu RI memiliki peran penting dalam melaksanakan Prioritas Nasional (PN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, pada PN 7 yaitu "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" serta turut berkontribusi untuk pencapaian PN 1, yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Untuk mendorong realisasi target nasional tersebut, Kemenlu RI menyusun peta strategi menggunakan metode kerangka kerja *Balanced Scorecard* (BSC) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Luar Negeri No. 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI. Peta Strategi Kemenlu RI menerjemahkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan strategi yang terdapat pada Renstra dan Renja ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *Stakeholder, Customer, Internal Business Process,* serta *Learning and Growth*.

Pada tahun 2024, Kemenlu RI menetapkan 8 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kerja (IK) yang digambarkan dalam setiap perspektif, sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective* yang terdiri atas 3 (tiga) SS;
2. *Customer Perspective* yang terdiri atas 2 (dua) SS;
3. *Internal Business Process Perspective* yang terdiri atas 2 (dua) SS;
4. *Learning and Growth Perspective* memiliki 1 (satu) SS yang terdiri dari 4 (empat) elemen.

Hasil penilaian atas kualitas sasaran strategis diperoleh bahwa:

a. 8 (delapan) sasaran strategis tersebut **sudah** berorientasi hasil;
b. 20 (dua puluh) IK sasaran strategis **sudah** tepat dan baik yaitu indikator kinerja jelas, SMART, dapat diukur secara objektif, realistis, cukup, terkait langsung dan mendukung sasaran.
c. Hampir seluruh target kinerja strategis **sudah** baik, hanya beberapa target kinerja strategis yang belum memperhatikan capaian periode sebelumnya.

2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Hasil penilaian atas kualitas program dan kegiatan diperoleh bahwa:

a. Semua sasaran program **sudah** berkaitan dengan sasaran strategis K/L dan **sudah** tepat;
b. Semua indikator kinerja program **sudah** berorientasi hasil (*outcome*);
c. Hampir seluruh target kinerja strategis **sudah** baik, hanya beberapa penetapan target kinerja program tidak SMART karena target kinerja tidak sesuai dengan target dalam Perjanjian Kinerja TA 2024.
d. Beberapa target kinerja kegiatan yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya
e. Beberapa indikator Rincian *Output* (RO) belum ditetapkan secara spesifik karena tidak cukup menggambarkan sasaran kinerjanya.
f. Beberapa target RO belum ditetapkan dengan SMART

B. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian. Uraian hasil pengujian komponen struktur proses secara umum disimpulkan sebagai berikut:

1) Unsur Lingkungan Pengendalian

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum manajemen Kemenlu RI telah melakukan upaya untuk menjaga lingkungan organisasi yang positif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, namun kebijakan dan implementasi pengendalian intern tersebut perlu dievaluasi secara berkala, terdokumentasi, dan dilakukan untuk menangani *residual risk* dalam memastikan perbaikan kinerja yang lebih baik.

2) Unsur Penilaian Risiko

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa manajemen Kemenlu RI telah memulai implementasi manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Namun identifikasi risiko belum mencakup seluruh unit kerja dan belum melekat pada proses manajemen di Kemenlu. Selain itu, kebijakan manajemen risiko sesuai Peraturan Menteri Luar Negeri No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia belum mengatur mengenai selera risiko dan pengelolaan risiko kemitraan serta penetapan kriteria dampak dan kemungkinan belum spesifik.

3) Unsur Kegiatan Pengendalian

Hasil evaluasi atas unsur kegiatan pengendalian menunjukkan bahwa manajemen Kemenlu RI telah membangun sejumlah kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan dalam merespon risiko-risiko organisasi. Selanjutnya parameter pada setiap sub unsur kegiatan pengendalian memerlukan peningkatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi secara terstruktur dan terjadwal.

4) Unsur Informasi dan Komunikasi

Hasil evaluasi atas unsur Informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa manajemen Kemenlu RI telah menggunakan informasi yang berkualitas dalam mendukung pengendalian intern organisasi, namun implementasi unsur informasi dan komunikasi belum dilakukan evaluasi secara terstruktur dan berkala untuk menjamin efektivitas komunikasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi.

5) Unsur Pemantauan

Secara umum, manajemen Kemenlu RI telah melakukan pemantauan atas kinerja organisasi secara berkala, namun belum melakukan upaya yang komprehensif atas reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja yang telah diimplementasikan secara memadai.

C. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut,

1) Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

Hasil evaluasi capaian *outcome* atas rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis Kementerian diperoleh skor 3,5 dan hasil evaluasi capaian *output* atas rata-rata pencapaian indikator *output* dari kegiatan satuan kerja diperoleh skor 4. Hal ini disebabkan masih terdapat indikator kinerja yang belum tepat dan baik yaitu Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Jumlah Kesepakatan di Bidang Politik, Keamanan, dan Maritim yang belum berorientasi hasil serta belum semua capaian sasaran program masuk dalam perhitungan rata-rata pencapaian indikator kinerja dari sasaran program Kemenlu RI.

2) Keandalan Pelaporan Keuangan

Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI dalam 5 tahun terakhir yaitu atas tahun anggaran 2019 sampai tahun 2023 bahwa Kemenlu RI telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut namun masih terdapat temuan berulang dengan klasifikasi temuan berupa SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap (terjadi selama 5 tahun berturut-turut) dan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaat dan Penatausahaan Kas Belum Memadai (berulang selama 4 tahun terakhir).

3) Pengamanan Aset Negara

Penilaian atas kualitas pengamanan BMN diperoleh dengan mengidentifikasi catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait temuan aset dalam 5 tahun terakhir yaitu atas tahun anggaran 2019 sampai tahun 2023 bahwa Kemenlu RI telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut namun masih terdapat temuan/catatan terkait aset dalam setiap LHP BPK tersebut.

4) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penilaian banyaknya temuan atas ketidakpatuhan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI pada tahun anggaran 2023 yaitu terdapat dua temuan yang dilaporkan terkait proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang serta tidak ada keterjadian korupsi pada periode evaluasi.

D. Penilaian atas Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Penilaian atas Manajemen Risiko Indeks (MRI) dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu aspek perencanaan, kapabilitas, dan hasil. Hasil evaluasi atas MRI menunjukkan bahwa aspek kapabilitas pada area proses manajemen risiko masih memerlukan perbaikan infrastruktur pengendalian intern.

Penilaian atas Manajemen Risiko Indeks (MRI) dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu aspek perencanaan, kapabilitas, dan hasil.

E. Penilaian atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
Penilaian atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi. Hasil evaluasi atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menunjukkan bahwa aspek kapabilitas pengelolaan risiko korupsi masih memerlukan perbaikan infrastruktur pengendalian intern.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan Maturitas SPIP. Dalam rangka merealisasikan IK Nilai Maturitas SPIP, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024:

1. Pelaksanaan Internalisasi dan Bimbingan Teknis SPIP–MR Terintegrasi untuk persiapan Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK) dan Evaluasi Maturitas (EM) SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 (Bulan Maret 2024)
2. Rapat Koordinasi Persiapan PM, PK dan EM SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 (Bulan Mei 2024)
3. Rapat Koordinasi Finalisasi PM, PK, dan EM SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 serta Bimbingan Teknis/Sosialisasi Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 di Lingkungan Kemenlu (Bulan Mei-Juni 2024).
4. Rapat Koordinasi Finalisasi PM Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 pada Aplikasi e-integrity SPIP (Bulan Juni 2024).
5. Rapat Pelaksanaan PK atas PM SPIP Terintegrasi Kemenlu Tahun 2024 (Bulan Juli 2024).
6. Pelaksanaan *Training of Trainers* (ToT) Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (MR) di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Bulan Agustus 2024).
7. Rapat entry meeting BPKP terkait pelaksanaan evaluasi atas hasil PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kemenlu Tahun 2024 (Bulan September 2024)
8. Rapat Penyampaian Notisi Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 (Bulan Oktober 2024).
9. Rapat Penyusunan tanggapan Hasil Notisi Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 (Bulan Oktober 2024).

Penilaian atas Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi

Kendala dan Tantangan

Sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi Kemenlu dalam upaya mencapai sasaran dan target Maturitas SPIP yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Kurangnya *awareness* dan pemahaman substansi wakil dari setiap unit organisasi dalam rangka penyusunan laporan SPIP dan MR;
2. Tantangan dalam melakukan internalisasi dan atau bimtek kepada unit organisasi sehingga adanya keseragaman format dan terpenuhinya kelengkapan dokumen-dokumen yang perlu untuk dipersiapkan;
3. Belum terpenuhinya secara keseluruhan dokumentasi data dukung yang diperlukan;
4. Tantangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
5. Dokumen perencanaan yang belum terintegrasi dengan baik sehingga adanya ketidaksinambungan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya.

Upaya Perbaikan

Kemenlu telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengurangi dampak kendala dan tantangan yang ada sehingga IK dapat tetap tercapai, upaya tersebut antara lain:

1. Menyelenggarakan rapat teknis serta koordinasi terkait pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
2. Kebijakan manajemen risiko dikomunikasikan kepada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja, tingkat strategis unit kerja, dan tingkat strategis K/L melalui rapat koordinasi dan DKO;
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pendukung pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
4. Melakukan reviu dokumen SPIP dan MR sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenlu yang telah ditetapkan untuk peningkatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
5. Melakukan pemantauan dan pendampingan secara berkelanjutan terhadap dokumen-dokumen Laporan SPIP-MR dari seluruh Satker Pusat/Perwakilan sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) dengan menyusun rekapitulasi penyampaian dokumen laporan SPIP-MR dari UPR dan analisis serta memonitor pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

Proyeksi Kedepan

Sebagai langkah ke depan, Kemenlu akan melakukan sejumlah upaya agar implementasi Maturitas SPIP dapat terus ditingkatkan:

1. Melaksanakan bimtek/internalisasi terkait SPIP–MR secara berkelanjutan bagi Satker, melalui pemberian diseminasi informasi atau bimbingan teknis secara berkala sesuai kebutuhan dalam setiap tahun yang berjalan. Penekanan informasi atas kepatuhan penyampaian laporan dalam batas waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan, akan dapat membantu pencapaian target persentase rekapitulasi dokumen laporan yang lebih optimal;
2. Melakukan koordinasi bersama Itjen selaku APIP K/L pembahasan peluang menggunakan sistem/mekanisme *punishment* bagi Unit kerja yang tidak menaati/melaksanakan pemenuhan dokumen yang diperlukan;
3. Meningkatkan evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian intern;
4. Meningkatkan upaya tidak terjadinya temuan terkait pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, khususnya dari pihak eksternal;
5. Melakukan evaluasi secara berkala dalam hal meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penyusunan dan penetapan kebijakan pembinaan SDM, serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait;
6. Perlunya dilakukan reviu secara berkala untuk memastikan proses manajemen risiko mendukung inovasi dan diidentifikasi untuk memaksimalkan peluang dan dijadikan bahan pembelajaran;
7. Perlu dilakukan analisis risiko strategis pada setiap layer tingkatan mulai dari unit kerja hingga tingkat K/L; dan
8. Kebijakan manajemen risiko dikomunikasikan kepada seluruh pegawai pada tingkat operasional unit kerja, tingkat strategis unit kerja, dan tingkat strategis K/L.

Dokumentasi

Gambar III.17. Pelaksanaan Internalisasi dan Bimtek SPIP MR Terintegrasi serta Persiapan PM, PK, EM, SPIP Terintegrasi Kemenlu 2024 (Bogor, 14-16 Maret 2024).

Gambar III.18. Rapat *entry meeting* dengan BPKP dalam penyusunan Maturitas SPIP Terintegrasi Kemenlu Tahun 2024 (Jakarta, 3 Mei 2024)

Gambar III.19. Kegiatan Rapat Koordinasi Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK), dan Evaluasi Maturitas (EM) SPIP serta Sosialisasi Aplikasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024 (Bogor, 28 Mei – 1 Juni 2024).

Gambar III.20. Kegiatan Rapat Koordinasi Finalisasi Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 pada Aplikasi e-Integrity SPIP (Bogor, 27–28 Juni 2024).

Gambar III.21. Pelaksanaan *Training of Trainers* (ToT) Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (MR) di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Jakarta, 26-30 Agustus 2024).

Customer Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* atau pengguna layanan merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

BPO memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja dalam memenuhi harapan *customer* dan/atau harapan organisasi terhadap *customer.*

Sasaran Kegiatan (C1) Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi yang Prima

IK C1.1 : Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi

IK ini untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan Biro Perencanaan dan Organisasi yang diberikan kepada penerima jasa.

Realisasi

2023	3,54
2024	3,43

Sasaran Kegiatan (C2) Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik

IK C2.1 : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal

IK ini untuk mengukur sejauh mana Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Realisasi

2023	80,40
2024	81,05

Sasaran Kegiatan (C1) Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi yang Prima

Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi yang prima merupakan upaya Biro Perencanaan dan Organisasi untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga mengakomodasi kebutuhan dan harapan *customer* untuk mendapatkan layanan yang lebih baik.

Sasaran Kegiatan C1 diukur berdasarkan capaian pada 1 (satu) IK C1.1: Indeks Kepuasan Layanan BPO dimana layanan yang diterima sesuai dan/atau lebih baik daripada yang diharapkan oleh penerima jasa.

Analisis IK C1.1

Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi

Deskripsi IK

Indeks kepuasan layanan BPO merupakan *cascading* dari Sekretaris Jenderal "Layanan Sekretariat Jenderal yang Prima" dimana dengan adanya IK tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik "Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat

Sesuai dengan arahan Presiden pada sambutan Kegiatan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik "Pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran di tengah masyarakat, pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika kita biarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara".

Dalam hal ini, BPO bukan merupakan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat umum. Namun demikian, BPO merupakan ujung tombak pelayanan terhadap seluruh unit organisasi baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga memerlukan alat ukur berupa survei kepuasan sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan. Di dalam survei kepuasan layanan BPO, digunakan skala linkert yang memiliki indikator kepuasan:

Skala 1	Tidak Puas	Skala 3	Puas
Skala 2	Kurang Puas	Skala 4	Sangat Puas

Indikator kepuasan tersebut digunakan untuk mengukur kepuasan layanan yang diberikan oleh BPO berupa:
1. Layanan dalam perencanaan, penyusunan dan evaluasi kinerja serta anggaran unit organisasi (termasuk penggunaan aplikasi internal dan eksternal)
2. Layanan organisasi dan kelembagaan serta ketatalaksanaan unit organisasi

Informasi Kinerja

Tabel III.19. Capaian IK C1.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai
Indeks Kepuasan Layanan BPO	Indeks Kepuasan Layanan BPO	3,43

Realisasi	Target	Capaian
3,43	3,6	95,28%

sumber: AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK C1.1 Indeks Kepuasan Layanan BPO tercatat sebesar 3,43 dari target yang ditetapkan sebesar 3,6 dengan capaian 95,28%. Indeks tersebut diperoleh dari 510 responden dengan pemetaan sebagai berikut:

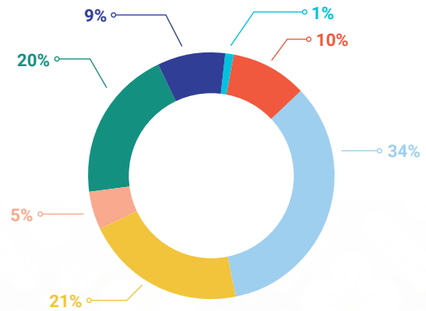

Jabatan

- Kepala Perwakilan (6 orang)
- Jabatan Struktural (26 orang)
- HOC (49 orang)
- Jabatan Fungsional (101 orang)
- MKP/MKO/SMKO (173 orang)
- Lain-lain (47 orang)
- Penata Kaneselerai (108 orang)

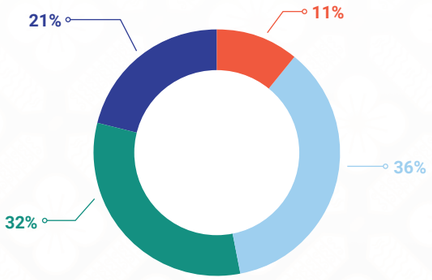

Usia

- 20-30 Tahun (57 orang)
- 31-40 Tahun (184 orang)
- 41-50 Tahun (160 orang)
- 51-60 (109 orang)

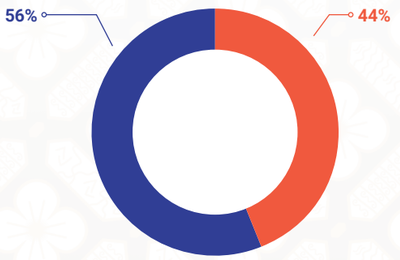

Jenis Kelamin

- Perempuan (222 orang)
- Laki-laki (288 orang)

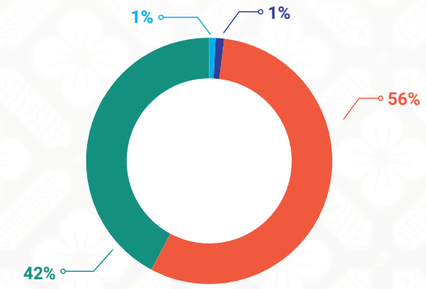

Riwayat Pendidikan

- Diploma III (4 orang)
- S2 (215 orang)
- S1 (287 orang)
- S3 (4 orang)

Berdasarkan Sampel Morgan dan Krejcie (Permen PANRB No.14 Tahun 2017) untuk sampel jumlah responden survei layanan BPO Tahun 2024 sudah melebihi jumlah sampel yaitu 217 orang dari jumlah populasi 500 orang, dimana jumlah populasi didapat dari jumlah pejabat yang terkait dengan jenis layanan yang diberikan. Dalam hal ini, pejabat yang dilayani berjumlah 534 orang (Perwakilan RI 396 orang, Eselon I 20 orang, Eselon II 118 orang) yang terdiri dari HOC, MKP/MKO/SMKO, PK, Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

Perbandingan Kinerja

Adapun Indeks Kepuasan Layanan BPO selama 5 tahun (2020 2024) secara detail dapat tergambarkan dari tabel berikut:

Tabel III.20. Target, Realisasi, dan Capaian IK C1.1 Indeks Kepuasan Layanan BPO

C1.1

	Target	Realisasi	Capaian
2020	N/A	N/A	N/A
2021	N/A	N/A	N/A
2022	4 (skala 4)	3,92	98%
2023	3,6 (skala 4)	3,54	98,33%
2024	3,6 (skala 4)	3,43	95,28%

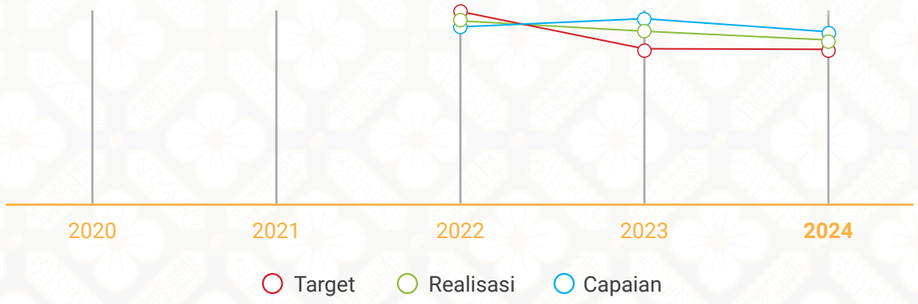

Terjadi penurunan realisasi indeks kepuasan layanan BPO di Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 0,38 yaitu dari 3,92 (2022) dibanding 3,54 (2023). Namun demikian, jika dilihat dari nilai capaian yang diperoleh di Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sama yaitu di angka 98% dikarenakan terdapat penurunan nilai target sebesar 0,4 dari 4 (2022) menjadi 3,6 (2023). Sehingga dapat dikatakan untuk nilai indeks kepuasan layanan BPO di Tahun 2022 dan Tahun 2023 sama.

Sedangkan untuk realisasi Indeks Kepuasan Layanan BPO di Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,11 dibandingkan dengan Tahun 2023. Secara keseluruhan di Tahun 2024, responsivitas dan pendampingan BPO ke satuan kerja memuaskan. Namun demikian, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi layanan BPO yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna layanan terkait *deadline* pengumpulan/penginputan data yang terlalu singkat, seperti:

a. *Deadline* dari *Stakeholder* terkait 50% blokir menjelang akhir tahun anggaran (di luar kalender perencanaan) dan bersamaan dengan revisi anggaran yang harus dilaksanakan seluruh satuan kerja menjelang akhir tahun anggaran yang berakibat lambatnya proses revisi sehingga berdampak pada revisi lainnya.
b. *Deadline* dari *Stakeholder* terkait bahan masukan penyusunan RPJMN 2025-2029 karena pergantian Pemerintahan di Bulan Oktober 2024.
c. Adanya percepatan nasional terkait RPJMN 2025-2029 sehingga *Stakeholder* meminta penyusunan Peraturan Presiden Kemenlu paralel dengan penyusunan Permenlu Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang berakibat permintaan bahan masukan dari satuan organisasi lainnya harus dipercepat.

Target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 4 (skala 4) sedangkan target 2024 sesuai PK adalah 3,6 (skala 4), terdapat perbedaan target Renstra dengan target PK di Tahun 2024 dikarenakan evaluasi dari hasil realisasi dan capaian Tahun 2022 serta Tahun 2023 yang tidak mencapai target sehingga terdapat penyesuaian penurunan target di Tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Selama 2 tahun, BPO telah melakukan survei layanan BPO dengan menggunakan 7 (tujuh) unsur pelayanan indeks kepuasan yang berdasarkan pada Keputusan Menteri PANRB No. 63/KEP/M.PAN/7/2003). Mengingat rujukan peraturan yang sudah lama, BPO perlu mengubah rujukan peraturan terbaru yaitu Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat UPP dengan menggunakan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat dijadikan sebagai dasar indikator dalam menyusun pertanyaan kuesioner.

Merujuk Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 terdapat 9 (sembilan) unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang dapat dijadikan sebagai dasar indikator dalam menyusun pertanyaan kuesioner.

Persyaratan
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan

Waktu Penyelesaian
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

Biaya/Tarif *)
Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

*) Dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Kompetensi Pelaksana
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

*) Dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis *website*.

Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

*) Dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis *website*.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin)

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Analisis Program yang Mendukung Capaian

Dalam upaya melakukan perbaikan layanan BPO kepada unit organisasi baik di dalam negeri maupun luar negeri, BPO telah mengikuti beberapa kegiatan selama Tahun 2024 seperti:

1. Pada tanggal 18-19 Mei 2024, telah mengikuti kegiatan rapat pembahasan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), Standar Pelayanan (SP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rangka Fasilitasi Pelayanan Publik Kemenlu TA 2024. Dalam rapat tersebut diperoleh informasi bahwa perlunya unit organisasi memiliki standar pelayanan dengan memperhatikan kebijakan dan parameter dalam pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan.

2. Pada tanggal 8 Agustus 2024, telah mengikuti kegiatan forum kebijakan publik penyusunan standar pelayanan Kemenlu, kegiatan tersebut merupakan sosialisasi tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun informasi yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah perlunya mengelola ekspektasi publik sehingga dapat selaras dengan kemampuan penyelenggaraan pelayanan (mempertimbangkan SDM yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia) sehingga meminimalisir pelayanan/ persepsi yang buruk yang dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara.

3. Pada tanggal 14-15 Oktober 2024, BPO telah mengikuti Bimtek *Training of Trainers* (ToT) Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat. Dari kegiatan tersebut diperoleh gambaran terkait mekanisme penghitungan survei kepuasan masyarakat di aplikasi serta pentingnya dalam menentukan jumlah populasi dan sampel di awal tahun serta pengumpulan data survei harus memenuhi jumlah sampel minimum yang telah ditetapkan. Ke depannya, hal tersebut dapat dijadikan bekal untuk melakukan penginputan survei layanan BPO oleh pengguna layanan maupun penghitungan survei layanan pada aplikasi.

Kendala dan Tantangan

Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan layanan BPO kepada satuan organisasi adalah:

1. Pemberian *deadline* dari pihak eksternal (*stakeholder*) yang cukup singkat dan diluar dari kalender perencanaan, mengakibatkan permintaan/penginputan/pengumpulan data/ dokumen harus dipercepat.

2. Batas waktu pengumpulan/penginputan data/dokumen bersamaan dengan batas waktu pengumpulan/penginputan data/dokumen dengan unit organisasi Kesetjenan yang lain, berakibat menimbulkan tekanan terhadap pejabat pengampu yang ada di satuan organisasi di luar negeri meningkat.

3. Perbedaan waktu satuan organisasi di luar negeri yang cukup panjang, terutama di wilayah Amerika menjadi tantangan dalam pemberian layanan BPO, baik dalam layanan pendampingan, pemberian materi bimtek dan responsivitas dalam menanggapi dan menjawab pertanyaan/permasalahan belum sesuai dengan harapan pengguna layanan unit organisasi di luar negeri.

Upaya Perbaikan

Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh BPO dalam mengatasi kendala dan tantangan dalam memberikan layanan BPO kepada unit organisasi:

1. Koordinasi yang cukup intensif dengan pihak eksternal (*stakeholder*) untuk info awal apabila terdapat *deadline* yang memiliki durasi waktu yang cukup singkat dan diluar kalender perencanaan.

2. Melalui pemegang desk, menyampaikan *reminder* awal dan kalender perencanaan ke satuan organisasi di luar negeri agar satuan organisasi dapat mengerjakan secara bertahap dan lebih awal.

3. Menyampaikan panduan tata cara pengoperasian aplikasi, materi bimtek dan rekaman zoom sebagai salah satu solusi dalam menjembatani perbedaan waktu unit organisasi di luar negeri.

Proyeksi Kedepan

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi survei layanan BPO di Tahun 2024 serta peningkatan kualitas layanan BPO. BPO akan menggunakan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai indikator rujukan dalam menyusun pertanyaan kuesioner sesuai dengan Permen PANRB No. 14 Tahun 2017. Selanjutnya mempertajam pertanyaan kuesioner pada form survei layanan BPO namun masih dalam batas 9 unsur SKM.

Membuat videografis dan panduan tata cara pengoperasian aplikasi serta materi bimtek untuk meningkatkan pemahaman satuan organisasi baik di aplikasi internal maupun eksternal, sehingga mengurangi pertanyaan/permasalahan yang ada di satuan organisasi di luar negeri.

Dokumentasi

Gambar III.22. Keikutsertaan BPO dalam Kegiatan Forum Kebijakan Publik Penyusunan Standar Pelayanan Kemenlu (Jakarta 8 Agustus 2024).

Gambar III.23. Keikutsertaan BPO dalam *Workshop* Penyusunan Standar Pelayanan Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 (Jakarta 2-5 September 2024).

Gambar III.24. Keikutsertaan BPO dalam Sosialisasi Kebijakan dan *Sharing Knowledge* Pelayanan Publik (Semarang 26 November 2024).

Sasaran Kegiatan (C2) Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik

Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang baik merupakan salah satu unsur dari infrastruktur diplomasi yang kuat yang merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.

Sasaran Kegiatan C2 diukur berdasarkan capaian pada 1 (satu) IK C2.1: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal yang merupakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP).

Analisis IK C2.1

Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal

Deskripsi IK

Nilai evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal merupakan nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan guna mencapai misi organisasi. Akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dituangkan secara rinci dalam laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Evaluasi AKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal merujuk pada Keputusan Irjen No. 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Juknis Evaluasi AKIP di Lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI, yang mengacu pada Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi yang dilakukan meliputi 4 (empat) komponen dengan bobot sebagai berikut:

> **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.**

Tabel III.21. Komponen dan Bobot Penilaian AKIP

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akintabilitas Kinerja Internal	3	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Hasil perhitungan dari komponen tersebut menghasilkan nilai akhir AKIP Satker yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Kriteria Evaluasi AKIP

AA	Skor » 90 - 100	Sangat Memuaskan	CC	Skor » 50 - 60	Cukup
A	Skor » 80 - 90	Memuaskan	C	Skor » 30 - 50	Kurang
BB	Skor » 70 - 80	Sangat Baik	D	Skor » 0-30	Sangat Kurang
B	Skor » 60 - 70	Baik			

Pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk:

a. Mengukur implementasi SAKIP pada unit organisasi dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
b. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja unit organisasi.
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Untuk tahun 2024, klaim realisasi nilai AKIP menggunakan nilai yang tertuang pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Jenderal Kemenlu atas implementasi SAKIP unit organisasi dengan menggunakan nomenklatur periode "2023/2024" yang menggambarkan periode evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 hingga perencanaan kinerja pada Tahun 2024.

Target Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal pada tahun 2024 adalah 80,45 atau berpredikat A. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Itjen Kemenlu pada tahun 2023/2024, Sekretariat Jenderal memperoleh nilai 81,05 atau dengan kategori penilaian A (Memuaskan). Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel III.22. Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2023/2024

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai AKIP Tahun 2023/2024
Perencanaan Kinerja	30%	24,60
Pengukuran Kinerja	30%	23,70
Pelaporan Kinerja	15%	12,75
Evaluasi Akintabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
Nilai Hasil Evaluasi AKIP	100%	81,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber:
Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Jenderal, Kemenlu.

Informasi Kinerja

Tabel III.23. Capaian IK C2.1 Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	Nilai Evaluasi AKIP yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemenlu	81,05

Realisasi	Target	Capaian
81,05	80,45	100,75%

Sumber: AKSI

Pada tahun 2023/2024, realisasi IK C2.1 Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal adalah sebesar 81,05 atau masuk dalam kategori Memuaskan (A) dari target sebesar 80,45 (A), sehingga capaian IK sebesar 100,75%.

Kenaikan nilai evaluasi AKIP tersebut diperoleh karena Sekretariat Jenderal telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra Tahun 2020-2024) dan jangka pendek/tahunan (Renja Tahun 2023 dan 2024). Rencana kinerja tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dan 2024 yang memuat sasaran strategis dan target kinerja yang akan dicapai pada masing-masing Indikator Kinerja serta Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

Selain itu, Sekretariat Jenderal telah melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan sasaran strategis dan target kinerja yang akan dicapai dengan menyusun manual IK yang didalamnya telah menjelaskan definisi operasional dan mekanisme pengumpulan data kinerja yang jelas dan dapat diandalkan pada tingkat Perwakilan. Sekretariat Jenderal juga telah menyusun laporan kinerja (LKj) tahun 2023 yang mengungkapkan informasi atas pencapaian kinerja. Laporan Kinerja telah disampaikan secara tepat waktu dan juga telah dipublikasikan melalui *website* Kementerian Luar Negeri.

Untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan secara komprehensif mencakup seluruh komponen evaluasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Salah satunya dengan pelaksanaan program monitoring dan evaluasi secara rutin yang dilaksanakan setiap triwulan serta pelaksanaan dialog kinerja setiap semester. Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal menjadi penggerak dialog kinerja organisasi guna sinkronisasi kinerja antar Pusat dan Perwakilan.

Sekretariat Jenderal menjadi penggerak Dialog Kinerja Organisasi guna sinkronisasi kinerja antar Pusat dan Perwakilan.

Tabel III.24. Target, Realisasi dan Capaian IK C2. 1 Nilai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal

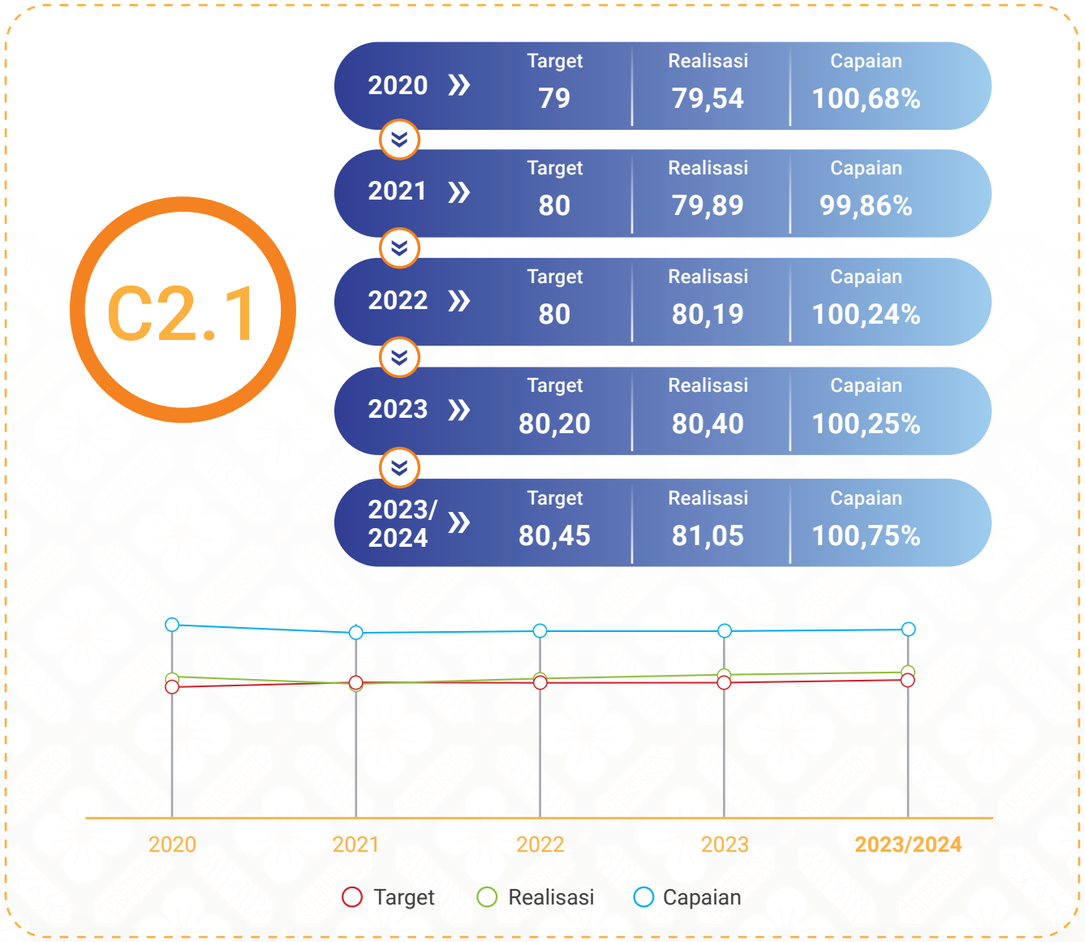

Berdasarkan tabel perbandingan lima tahun di atas, meskipun pada tahun 2021 capaian realisasi terhadap target mengalami penurunan, nilai target dan realisasi tetap menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, meskipun kenaikannya tidak signifikan. Hal tersebut disebabkan karena tepatnya Sekretariat Jenderal dalam menentukan target, serta upaya koordinasi dari Sekretariat Jenderal ke Unit Organisasi di level Eselon II untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi dari Inspektorat Jenderal selaku APIP Kemenlu.

Adapun peningkatan realisasi Tahun 2023/2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena pemenuhan tindak lanjut yang direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kemenlu, antara lain: penyusunan pohon kinerja, penetapan target Indikator Kinerja secara lebih cermat, perbaikan Laporan Kinerja serta pelaksanaan evaluasi kinerja internal secara menyeluruh.

Target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 83 sedangkan target 2024 sesuai PK adalah 80,45, terdapat perbedaan target Renstra dengan target PK di Tahun 2024 dikarenakan evaluasi dari hasil realisasi dan capaian Tahun 2021 belum mencapai target sehingga terdapat penyesuaian target di Tahun 2022-2024 yang disesuaikan dengan realisasi Tahun 2022-2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Penyebab keberhasilan pencapaian IK C2.1 antara lain karena:

1. Sekretariat Jenderal telah menyusun kerangka logis penjabaran kinerja Sekretariat Jenderal dan unit eselon II di bawahnya dalam desain pohon kinerja.
2. Sekretariat Jenderal telah menetapkan target Indikator Kinerja secara lebih cermat dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya serta perkembangan situasi internal dan eksternal.
3. Penyusunan LKj telah dilakukan perbaikan sebagai berikut:
   a. Laporan Kinerja memperhatikan target yang akan dicapai terhadap 2 IK.
   b. Laporan kinerja telah menyajikan analisis/narasi perbandingan kenaikan/penurunan dengan tahun-tahun sebelumnya.
   c. Laporan kinerja telah menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dengan mencakup sumber daya lainnya (selain penyerapan anggaran) seperti SDM dan perlengkapan (sarana/prasarana); dan
   d. Laporan kinerja telah dilengkapi dengan kodefikasi data dukung realisasi setiap IK pada matriks informasi kinerja.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan untuk seluruh komponen evaluasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Sekretariat Jenderal telah melakukan pemenuhan tindak lanjut yang direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kemenlu, antara lain: penyusunan Pohon Kinerja, penetapan target Indikator Kinerja secara lebih cermat, perbaikan Laporan Kinerja serta pelaksanaan evaluasi kinerja internal secara menyeluruh.

Analisis Program Pendukung Capaian

Untuk mendukung capaian kinerja IK C2.1, Sekretariat Jenderal telah berupaya melaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan perolehan nilai evaluasi AKIP mulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Sekretariat Jenderal sebagai suatu forum pemantauan kinerja organisasi serta upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama internal. DKO dilaksanakan sebayak tiga (3) kali selama tahun 2024 dengan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. DKO pertama dilaksanakan pada 10-13 Januari 2024 dengan menghasilkan dokumen butir rencana aksi untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sepanjang tahun 2024. DKO selanjutnya dilaksanakan pada 6 Maret 2024 dengan agenda penandatanganan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2024. Selanjutnya, pada 27-30 Juli 2024 telah dilakukan DKO guna membahas pencapaian isu strategis, kinerja dan rencana aksi organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku pengampu Sasaran Strategis "Infrastruktur Diplomasi". Melalui DKO ini, seluruh unit organisasi dapat melakukan pemutakhiran langkah dan strategi guna pencapaian renaksi tahun 2024, penajaman rencana kerja tahun 2024 dan penyusunan postur diplomasi sebagai rujukan infrastruktur diplomasi Kemenlu untuk periode jangka panjang.
2. Sebagai lanjutan dari rangkaian kegiatan penyusunan RPJMN 2025-2029, pada tanggal 19-23 Maret 2024 telah dilaksanakan kegiatan pembahasan Indikator dan Target RPJMN 2025-2029. Dalam kegiatan tersebut, Bappenas merekomendasikan agar Kemenlu dapat melakukan identifikasi dan *exercise* indikator pada level Agenda Pembangunan - Program Pembangunan - Kegiatan Pembangunan - Proyek Pembangunan serta identifikasi RO. Selanjutnya, atas hasil identifikasi tersebut, Kemenlu melalui BPO akan menyampaikan dan membahas *cascading* RPJMN tersebut dengan Bappenas.
3. Pelaksanaan Penyusunan Konsep Awal Teknokratik Renstra Kemenlu 2025-2029 pada tanggal 22-24 Januari 2024. Agenda utama kegiatan tersebut yaitu menjaring masukan dari Tim Penyusun Renstra Kemenlu atas konsep awal Teknokratik Renstra Kemenlu 2025-2029.
4. Pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) oleh Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri dan seluruh Pejabat Eselon I pada tanggal 5 Februari 2024 sebagai wujud akuntabilitas dan tata pemerintahan yang berorientasi hasil. Selain sebagai bentuk komitmen yang dijabarkan dalam target kinerja dari pimpinan yang lebih rendah kepada pimpinan yang lebih tinggi, PK organisasi merupakan dokumen rujukan utama penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
5. Pelaksanaan penyusunan penjenjangan kinerja di seluruh unit organisasi Pusat Kemenlu pada tanggal 19 September 2024. Pemutakhiran dimaksud sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan akan dilampirkan pada Laporan Kinerja setiap unit organisasi Kemenlu.

6. Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya, BPO akan mensosialisasikan Keputusan Menteri Luar Negeri No. 27/B/PR/08/2024/01 Tahun 2024 sebagai pengganti Peraturan Menteri Luar Negeri No. 4 Tahun 2018.
7. Pelaksanaan Forum Koordinasi Perencanaan Kinerja Diplomasi yang bertujuan untuk mendalami *cross-cutting* kinerja K/L dengan Kemenlu dalam program dan kegiatan yang berdimensi politik luar negeri. Dengan adanya pemetaan kinerja dari setiap K/L terkait akan membantu upaya sinergi diplomasi dan identifikasi dukungan teknis dari Kemenlu yang selanjutnya akan mempermudah dalam penyusunan penjenjangan kinerja *cross-cutting* satker.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri dan seluruh Pejabat Eselon I pada tanggal 5 Februari 2024 sebagai wujud akuntabilitas dan tata pemerintahan yang berorientasi hasil.

Kendala dan Tantangan

Meskipun Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal telah melampaui target di tahun 2024, implementasi SAKIP tentunya tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan yang perlu diperhatikan dan diupayakan dalam rangka perbaikan dan peningkatan pengelolaan dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, diantaranya:

1. Belum optimalnya *awareness* pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyampaikan hasil penilaian kinerja individu atau dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) beserta kaitannya terhadap penilaian komponen perencanaan kinerja.
2. Pemantauan dan pengukuran capaian kinerja Sekretariat Jenderal dan unit di bawahnya secara berjenjang masih belum optimal.
3. Tuntutan terhadap penginputan aplikasi monitoring kinerja dan anggaran yang secara rutin dan terus bertambah serta cukup kompleks/teknis.
4. Sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran/kinerja yang masih *rigid* dan belum terintegrasi, serta terlalu dinamis (berubah-ubah setiap waktu), sehingga menyebabkan kendala teknis di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan dilakukannya proses penginputan data capaian kinerja secara berulang-ulang dalam berbagai aplikasi yang berbeda.

Upaya Perbaikan

Dalam rangka mitigasi dampak dari kendala dan tantangan yang dihadapi, Sekretariat Jenderal secara intensif melakukan berbagai upaya perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilakukan, antara lain:

1. Sekretariat Jenderal c.q BPO selaku Manajer Kinerja Organisasi Pusat (MKOP) secara aktif menghimbau pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyusun dan menetapkan perencanaan kinerja individu (SKP) Tahun 2023 serta melaporkan realisasinya pada aplikasi e-kinerja BKN.
2. Sekretariat Jenderal telah menginisiasi kegiatan bimbingan teknis penyusunan dokumen Penjenjangan Kinerja pada level Sekretariat Jenderal dan seluruh Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan unit organisasi lain di Kemenlu.
3. Sekretariat Jenderal juga telah melakukan koordinasi penyusunan dokumen Penjenjangan Kinerja pada level Sekretariat Jenderal dan seluruh Unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Penyusunan Penjenjangan Kinerja Kemenlu dimaksud turut melibatkan seluruh unit organisasi pusat dan Kemen PANRB.
4. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja Sekretariat Jenderal salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Pusat dan Perwakilan RI.
5. Penyempurnaan sistematika penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kemenlu dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 yang akan dijadikan panduan dan suatu rujukan teknis bagi Sekretariat Jenderal dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun berikutnya.
6. Penyempurnaan aplikasi AKSI terutama terkait perhitungan target dan capaian kinerja, perbaikan dalam penginputan rencana aksi serta penambahan fitur penjenjangan kinerja dan juga fitur penyusunan dan review Perjanjian Kinerja.
7. Sekretariat Jenderal secara aktif melakukan koordinasi untuk mensinkronisasi target kinerja pusat dan perwakilan RI agar penetapan target kinerja dapat selaras dengan hasil capaian tahun sebelumnya.

Proyeksi Kedepan

Pada tahun mendatang, penyusunan panduan manajer kinerja akan disusun untuk membantu mendorong proses *transfer knowledge* sehingga para manajer kinerja yang terpilih dapat segera menjalankan tugasnya secara optimal. Sosialisasi atas Kepmenlu No. 27/B/PR/08/2024/01 Tahun 2024 sebagai pengganti Peraturan Menteri Luar Negeri No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI akan dilakukan agar pengelolaan kinerja pada Kemenlu dapat optimal selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait. Pembaharuan berkelanjutan atas aplikasi yang digunakan serta inisiasi untuk mengintegrasikan data dengan aplikasi nasional juga akan menjadi perhatian untuk tahun mendatang. Selain itu, dalam rangka peningkatan capaian kinerja IK C2.1 pada periode selanjutnya, Sekretariat Jenderal akan melaksanakan beberapa upaya berikut:

1. Terkait dengan IK yang targetnya belum tercapai, telah dilakukan penyempurnaan dengan tetap memastikan target yang menantang namun tetap realistis dan *achievable*.
2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pegawai untuk penyusunan dan penyampaian SKP secara tepat waktu, termasuk proses uploading di aplikasi SIMSDM.
3. Berkoordinasi dengan Kemen PANRB terkait penyempurnaan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja.
4. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kedepan, Sekretariat Jenderal berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyusunannya.
5. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas internal dengan melakukan pembahasan terkait aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja maupun monitoring dan evaluasi akan senantiasa dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal secara berkala melalui DKO yang melibatkan unsur Pimpinan dan Pelaksana.

Dokumentasi

Gambar III.25. Kegiatan Penyusunan Konsep Awal Teknokratik Renstra Kemenlu 2025 – 2029 (Bogor 22 – 24 Januari 2024).

Gambar III.26. Kegiatan Finalisasi Revisi Permenlu No. 4 Tahun 2018 dan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rensta Kemenlu 2025-2029 (Bandung, 26-28 Februari 2024).

Gambar III.27. Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Sekretariat Jenderal (Jakarta, 5 Maret 2024).

Gambar III.28. Kegiatan Forum Koordinasi Perencanaan Kinerja Diplomasi dalam rangka pembahasan cross-cutting kinerja K/L dengan Kemenlu pada program dan kegiatan yang berdimensi politik luar negeri (Jakarta, 14-16 Juli 2024).

Gambar III.29. Sekretariat Jenderal Memperoleh Penghargaan sebagai Peringkat Kedua atas Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi Eselon I Kementerian Luar Negeri Tahun 2023/2024 (Jakarta, 10 September 2024).

Internal Business Process Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer (value chain)*.
BPO memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dalam memenuhi rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer.*

Sasaran Kegiatan (B1) Manajemen Kinerja dan Anggaran yang Berkualitas

IK B1.1 : Jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan Predikat Minimal ¨SANGAT BAIK¨ (BB)

IK ini untuk mengukur seberapa banyak Unit Eselon I dan Perwakilan RI yang telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Realisasi
2023 » 133
2024 » 139

IK B1.2 : Persentase Alokasi Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Memiliki Catatan Blokir pada Halaman IV DIPA

IK ini untuk mengetahui seberapa baik perencanaan anggaran Kementerian Luar Negeri dan untuk mengetahui persentase alokasi anggaran yang terblokir.

Realisasi
2023 » 0%
2024 » 1,29%

IK B1.3 : Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI

IK ini untuk mengetahui berapa persen usulan revisi anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan

Realisasi
2023 » 100%
2024 » 93,90%

Sasaran Kegiatan (B2) Hasil Analisis terkait Organisasi yang Optimal

IK B2.1 : Persentase Analisis terkait Organisasi yang Dimanfaatkan

IK ini untuk memastikan setiap rencana analisis yang disusun dimanfaatkan hingga akhirnya mengeluarkan hasil analisis beserta rekomendasi-rekomendasinya.

Realisasi
2023 » 100%
2024 » 100%

Sasaran Kegiatan (B1) Manajemen Kinerja dan Anggaran yang Berkualitas

Manajemen kinerja adalah pendekatan manajemen yang berorientasi pada tujuan organisasi untuk mendukung pelaksanaan strategi menuju pencapaian hasil yang diinginkan melalui pendelegasian target organisasi.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, perencanaan kinerja merupakan proses menentukan/merancang tindakan masa depan yang tepat mengenai hasil kerja di masa depan baik secara kualitas maupun kuantitas. Perencanaan kinerja yang dimaksud dalam hal ini adalah perencanaan kinerja sebuah unit organisasi.

Perencanaan Kinerja dalam hal ini meliputi penyusunan Rencana Strategis (dokumen rencana unit organisasi periode 5 tahun), Perjanjian Kinerja ataupun Rencana Kerja (dokumen rencana unit organisasi periode 1 tahun), beserta dokumen pendukungnya (Rencana Aksi), serta dokumen perencanaan lain yang tercakup ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perencanaan Anggaran berarti suatu proses pembuatan rencana kerja terinci dan sistematis yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang (biasanya 1 tahun).

Sasaran Kegiatan B1 diukur berdasarkan capaian pada 3 (tiga) IK yaitu:

1. **IK B1.1: Jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan Predikat Minimal ¨SANGAT BAIK¨ (BB).**

   Evaluasi untuk implementasi SAKIP pada Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal yang mengacu pada Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenlu No. 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

   Berdasarkan Nota Dinas No. 01757/PW/05/2024/69/11, Nilai Evaluasi AKIP untuk Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI dengan predikat minimal ¨SANGAT BAIK¨ (BB) sebanyak 139 unit.

2. **IK B1.2: Persentase Alokasi Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Memiliki Catatan Blokir pada Halaman IV DIPA**

   Catatan Blokir merupakan salah satu pengisian catatan dalam halaman IV DIPA yang merupakan pencantuman penjelasan tentang rincian belanja yang memerlukan perlakuan khusus dan/atau persyaratan tertentu pada saat proses pencairan dana. Terdapat faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi catatan blokir tersebut.

   Berdasarkan sistem aplikasi Satu DJA dan SAKTI, perolehan persentase alokasi anggaran Kemenlu yang memiliki catatan blokir pada halaman IV DIPA adalah 1,29%.

3. **IK B1.3 : Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI**

   Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Revisi anggaran dapat dilakukan untuk menyesuaikan informasi kinerja dan rincian anggaran dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

   Berdasarkan sistem aplikasi Satu DJA dan SAKTI, perolehan nilai revisi anggaran Kementerian dan Perwakilan RI adalah 93,90%.

Analisis IK B1.1

Jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan Predikat Minimal “Sangat Baik” (BB)

Deskripsi IK

IK B1.1 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengamanatkan setiap instansi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri, melakukan evaluasi AKIP setiap tahun.

Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Nilai evaluasi AKIP Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan RI menjadi indikator *outcome* keberhasilan Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dalam mengoordinasikan perencanaan serta monev kinerja dan anggaran Kemenlu dan Perwakilan RI.

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Nilai evaluasi AKIP Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan RI menjadi indikator *outcome* keberhasilan Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dalam mengoordinasikan perencanaan serta monev kinerja dan anggaran Kemenlu dan Perwakilan RI. Selain itu, IK ini diadopsi untuk mengetahui seberapa banyak Jumlah unit organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki nilai evaluasi AKIP dengan predikat “Sangat Baik” (BB).

Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan kegiatan Evaluasi AKIP Tahun 2023/2024 terhadap 199 (seratus sembilan puluh sembilan) unit organisasi yang terdiri dari 69 Unit Organisasi Pusat dan 130 Unit Organisasi Perwakilan RI. Evaluasi AKIP mengacu kepada Keputusan Inspektur Jenderal No. 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi AKIP dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Klasifikasi Nilai Evaluasi AKIP

AA	Skor » 90 - 100	Sangat Memuaskan	CC	Skor » 50 - 60	Cukup (Memadai)
A	Skor » 80 - 90	Memuaskan	C	Skor » 30 - 50	Kurang
BB	Skor » 70 - 80	Sangat Baik	D	Skor » 0-30	Sangat Kurang
B	Skor » 60 - 70	Baik			

Berdasarkan tabel di atas, Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki nilai evaluasi AKIP dengan predikat ”Sangat Baik” adalah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang mendapatkan nilai 70 (tujuh puluh) atau predikat BB ke atas.

Informasi Kinerja

Tabel III.25. Capaian IK B1. 1 Jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan Predikat ¨Sangat Baik¨ (BB)

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja Nilai Capaian IK	Nilai
Jumlah unit organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki nilai evaluasi AKIP dengan predikat “Sangat Baik” (BB)	Jumlah unit organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki nilai evaluasi AKIP dengan predikat “Sangat Baik” (BB)	139

Realisasi	Target	Capaian
139	135	102,96 %

Sumber: AKSI

Tahun ini merupakan tahun kedua implementasi evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP. Dengan demikian, nilai hasil Evaluasi AKIP tahun ini (2023/2024) dapat dibandingkan dengan nilai Evaluasi AKIP tahun lalu (2022).

Sebagai catatan, pada tahun ini, Kementerian Luar Negeri menggunakan nomenklatur periode “2023/2024” yang lebih menggambarkan periode evaluasi yakni untuk akuntabilitas kinerja pada 2023 hingga perencanaan kinerja pada 2024.

Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023/2024 pada Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI adalah sebagai berikut:

No.	Predikat	Unit Organisasi (Eseon I)	Perwakilan RI
1	AA (Sangat Memuaskan)	-	-
2	A (Memuaskan)	8	-
3	BB (Sangat Baik)	2	129
4	B (Baik)	-	1
5	CC (Cukup (Memadai))	-	-
6	C (Cukup)	-	-
7	D (Sangat Kurang)	-	-

Berdasarkan tabel di atas, pada hasil evaluasi AKIP 2023/2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenlu terdapat 8 Unit Organisasi Eselon I yang mendapatkan nilai A dengan predikat Memuaskan, 2 Unit Organisasi Eselon I mendapatkan nilai BB dengan predikat Sangat Baik, 129 Perwakilan RI yang mendapatkan nilai BB dengan predikat Sangat Baik dan 1 Perwakilan RI yang mendapatkan nilai B dengan predikat Baik. Sehingga realisasi IK B1.1 “Jumlah unit organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki nilai evaluasi AKIP dengan predikat Sangat Baik (BB)” adalah sejumlah 139 unit organisasi atau tercapai 102.96% dari jumlah target 135 unit organisasi.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.26. Target, Realisasi dan Capaian IK B1. 1 Jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan Predikat ¨Sangat Baik¨ (BB)

B1.1

	Target	Realisasi	Capaian
2020	112	126	112,50%
2021	122	131	107,38%
2022	130	128	98,46%
2023	130	133	102,31%
2024	135	139	102,96%

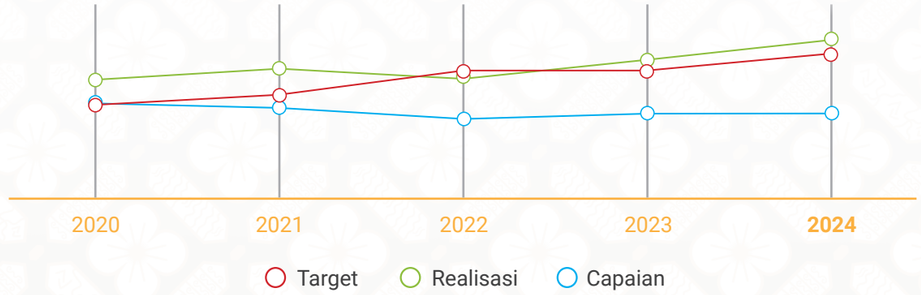

Kenaikan target 2020-2022 didasarkan pada realisasi Tahun 2020-2021. Namun demikian terjadi penurunan realisasi di Tahun 2022 yang menyebabkan target Tahun 2022 sama dengan target 2023. Penurunan realisasi tersebut, tidak menurunkan semangat BPO dalam mendampingi unit organisasi di Pusat maupun Perwakilan RI untuk menyusun dan mengevaluasi dokumen kinerja masing-masing unit organisasi. Hasil nyata pendampingan tersebut adalah kenaikan realisasi Tahun 2023 melebihi realisasi di Tahun 2020-2022, sehingga BPO menetapkan target lebih tinggi di Tahun 2024.

Adapun peningkatan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, salah satunya dengan tidak adanya unit organisasi yang memiliki predikat “Cukup” (CC) dan hanya ada 1 unit organisasi yang memiliki predikat “Baik” (B). Hal tersebut dikarenakan adanya pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal sebagai APIP Kemenlu yang dilakukan oleh masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI. BPO selaku Manajer Kinerja Organisasi Pusat (MKOP) senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan kinerja yang akuntabel dengan melakukan koordinasi yang erat dengan Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan RI.

Target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 141 sedangkan target 2024 sesuai PK adalah 135, terdapat perbedaan target Renstra

dengan target PK di Tahun 2024 dikarenakan evaluasi dari hasil realisasi dan capaian Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang belum bisa mencapai target 140 Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan RI. Namun demikian, bisa dilihat dari tabel di atas terjadi peningkatan target secara terus menerus dari Tahun 2020-2024.

Pada Tahun 2024 tidak ada unit organisasi yang memiliki predikat "Cukup" (CC) dan hanya ada 1 unit organisasi yang memiliki predikat "Baik" (B).

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Perkembangan Unit Eselon I dan Perwakilan RI dengan akuntabilitas kinerja "Sangat Baik" terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Hingga dengan Tahun 2024, peningkatan nilai akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenlu cukup signifikan. Terdapat 10 Unit Eselon I dan 129 Perwakilan RI dengan nilai AKIP yang memperoleh nilai di atas 70 dengan predikat Sangat Baik ke atas. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan jumlah Unit Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki nilai evaluasi AKIP dengan predikat minimal "Sangat Baik" (BB) antara lain:

1. Meningkatnya persentase Unit Eselon I dan Perwakilan RI yang menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi APIP Tahun sebelumnya;
2. Meningkatnya *awareness* Unit Eselon I dan Perwakilan RI untuk mempublikasikan seluruh dokumen AKIP pada portal masing-masing;
3. Unit Eselon I dan Perwakilan RI telah menyusun pohon kinerja serta penjenjangan kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
4. Penetapan target Indikator Kinerja secara lebih cermat dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya serta perkembangan situasi internal dan eksternal.
5. Penguatan kapasitas pemahaman pengelolaan kinerja dan anggaran serta penginputan aplikasi secara rutin-berkala kepada SDM Pengelola Kinerja (antara lain operator, MKO/ SMKO, MKP Unit Organisasi Pusat/ Perwakilan);
6. Monitoring dan evaluasi kinerja yang terukur dan dilaporkan secara berkala pada aplikasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang digunakan oleh Kemenlu yaitu SAKTI (Kemenkeu), eMonev (Bappenas) dan AKSI (Kemenlu).
7. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada sebagian besar Unit Eselon I dan Perwakilan RI telah mengungkapkan informasi atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dengan mencakup sumber daya lainnya, kelengkapan data dukung untuk setiap IK serta informasi terkait penyebab keberhasilan/kegagalan serta langkah solutif yang dilakukan.
8. Pemanfaatan informasi capaian kinerja yang tertuang pada dokumen AKIP sebagai rujukan pengambilan kebijakan dan upaya pencapaian target kinerja di tahun berjalan melalui Dialog Kinerja Organisasi secara berkala.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Untuk mendukung capaian kinerja IK B1.1, BPO telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan perolehan nilai evaluasi AKIP mulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang melibatkan seluruh Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan RI. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan penyusunan penjenjangan kinerja di seluruh unit organisasi Pusat Kemenlu pada tanggal 19 September 2024. Pemutakhiran dimaksud sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan akan dilampirkan pada Laporan Kinerja setiap unit organisasi Kemenlu.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan penjenjangan kinerja Perwakilan RI pada tanggal 23 September – 4 Oktober 2024 yang di sela-sela pelaksanaan Kegiatan Bimtek Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kemenlu Triwulan III.
3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Perencanaan Kinerja Diplomasi yang bertujuan untuk mendalami *cross-cutting* kinerja K/L dengan Kemenlu dalam program dan kegiatan yang berdimensi politik luar negeri. Dengan adanya pemetaan kinerja dari setiap K/L terkait akan membantu upaya sinergi diplomasi dan identifikasi dukungan teknis dari Kemenlu yang selanjutnya akan mempermudah dalam penyusunan penjenjangan kinerja *cross-cutting* unit organisasi.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) bagi Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan Tahun 2024, tanggal 21 - 26 November 2024.
5. Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Internal baik tingkat Pusat maupun Perwakilan RI, yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
6. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP.

Kendala dan Tantangan

Meskipun target Jumlah Unit Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal "Sangat Baik" (BB) berhasil diperoleh dengan maksimal, namun masih terdapat 1 Perwakilan RI yang mendapat nilai evaluasi AKIP dengan predikat "Baik" (B). Selain itu, BPO masih menghadapi banyak kendala dan tantangan yang perlu diantisipasi ke depannya, antara lain:

1. Adanya tuntutan terhadap penginputan aplikasi monitoring kinerja dan anggaran yang secara rutin dan terus bertambah serta cukup kompleks/teknis.
2. Penginputan data capaian kinerja seringkali harus dilakukan berulang kali di berbagai aplikasi yang berbeda karena sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran/kinerja yang belum terintegrasi dan sering mengalami kendala teknis.
3. Masih terdapat Unit Eselon I dan Perwakilan RI yang belum menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi APIP Tahun sebelumnya. Selain itu, tindak lanjut dan pemanfaatan rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP sebagai sarana perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja masih belum optimal.
4. Masih terdapat penyusunan LKj pada Unit Eselon I dan Perwakilan RI yang belum secara lengkap mengungkapkan informasi atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian kinerja Tahun berjalan dengan Tahun sebelumnya, analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dengan mencakup sumber daya lainnya, kelengkapan data dukung untuk setiap IK serta informasi terkait penyebab keberhasilan/kegagalan serta langkah solutif yang dilakukan.
5. Tingginya tingkat mutasi pegawai yang mengakibatkan terhambatnya proses *transfer of knowledge* terkait manajemen kinerja/ pengelolaan kinerja.
6. Tingkat kompleksitas Perwakilan RI yang berbeda sehingga beberapa Perwakilan RI yang memiliki bobot pekerjaan lebih kompleks membutuhkan waktu yang lama dalam menyusun pelaporan kinerjanya.

Proyeksi Kedepan

Hingga akhir tahun 2024 masih terdapat 1 (satu) Perwakilan RI yang masih memiliki Nilai Evaluasi AKIP di bawah 70 atau berpredikat "B". Oleh karena itu, agar pencapaian target pada periode jangka menengah selanjutnya dapat lebih baik serta untuk mengoptimalkan implementasi AKIP di lingkungan Kemenlu, BPO akan melaksanakan serangkaian upaya di masa mendatang, diantaranya:

1. Penyempurnaan aplikasi terkait monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkelanjutan dan berupaya untuk dapat menginterkoneksikan dengan aplikasi nasional yang dapat dimanfaatkan sebagai alat pengukuran kinerja yang andal.
2. Penyempurnaan format dan sistematika LKj dan menyusun panduan publikasi LKj agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.
3. BPO akan terus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja di lingkungan Kemenlu, melakukan bimbingan serta asistensi secara intensif, serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang komprehensif serta berkala.
4. Pengembangan panduan manajer kinerja akan disusun untuk membantu mendorong proses *transfer of knowledge* sehingga para manajer kinerja yang terpilih dapat segera menjalankan tugasnya secara optimal.
5. BPO akan terus melakukan pemantauan atas hasil evaluasi AKIP seluruh Unit Organisasi dan melakukan pendampingan bagi Unit Organisasi yang belum mencapai nilai maksimal.

Dokumentasi

Gambar III.30. Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu (Jakarta, 26-28 Maret 2024).

Gambar III.31.Pemutakhiran Penjenjangan Kinerja Kementerian Luar Negeri pada Aplikasi AKSI (Jakarta, 25–26 dan 28 November 2024)

Gambar III.32. Rapat Koordinasi Satker Sampling dalam Rangka Persiapan Tindak Evaluasi AKIP Kemenlu 2024 (Jakarta, 26 November 2024).

Analisis IK B1.2

Persentase Alokasi Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Memiliki Catatan Blokir pada Halaman IV DIPA

Deskripsi IK

IK ini merupakan persentase alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri yang memiliki catatan blokir pada halaman IV DIPA digunakan untuk mengetahui seberapa baik perencanaan anggaran Kementerian Luar Negeri dan untuk mengetahui persentase alokasi anggaran yang terblokir.

Adanya catatan pada Halaman IV DIPA menunjukkan adanya alokasi anggaran yang terblokir. Alokasi anggaran yang terblokir tersebut tidak dapat langsung digunakan. Penggunaannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kementerian Keuangan melalui proses revisi anggaran.

Catatan blokir pada halaman IV DIPA dapat dipengaruhi oleh keadaan internal maupun kebijakan eksternal. Kriteria pencantuman catatan dimaksud telah diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kriteria pencantuman catatan blokir di Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Informasi Kinerja

Tabel III.27. Capaian IK B1.2 Persentase Alokasi Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Memiliki Catatan Blokir pada Halaman IV DIPA

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai
Persentase alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri yang memiliki catatan blokir pada halaman IV DIPA	(Jumlah Anggaran yang dicatat pada Halaman IV DIPA/Alokasi Anggaran) x 100%	1,29%

Realisasi	Target	Capaian	Batas Toleransi
1,29%	9%	185,62%	120%

Sumber: AKSI

Realisasi IK Persentase Alokasi Anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2024 yang memiliki catatan blokir pada halaman IV DIPA adalah sebesar 1,29% dari target yang ditetapkan sebesar 9%, sehingga capaian untuk IK ini adalah sebesar 120%.

Sisa angka blokir TA 2024 adalah sebesar Rp118.021.367.000 dari total pagu akhir Kementerian Luar Negeri sebesar Rp9.118.292.894.000. Dengan demikian, capaian IK “Persentase Alokasi Anggaran Kementerian Luar Negeri yang memiliki catatan blokir pada halaman IV DIPA adalah 185.62% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%”.

Perbandingan Kinerja

Adapun perbandingan Persentase Alokasi Anggaran Kementerian Luar Negeri selama periode Renstra 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel III.28. Target, Realisasi, dan Capaian IK B1.2 Persentase Alokasi Anggaran Kementerian Luar Negeri yang Memiliki Catatan Blokir pada Halaman IV DIPA

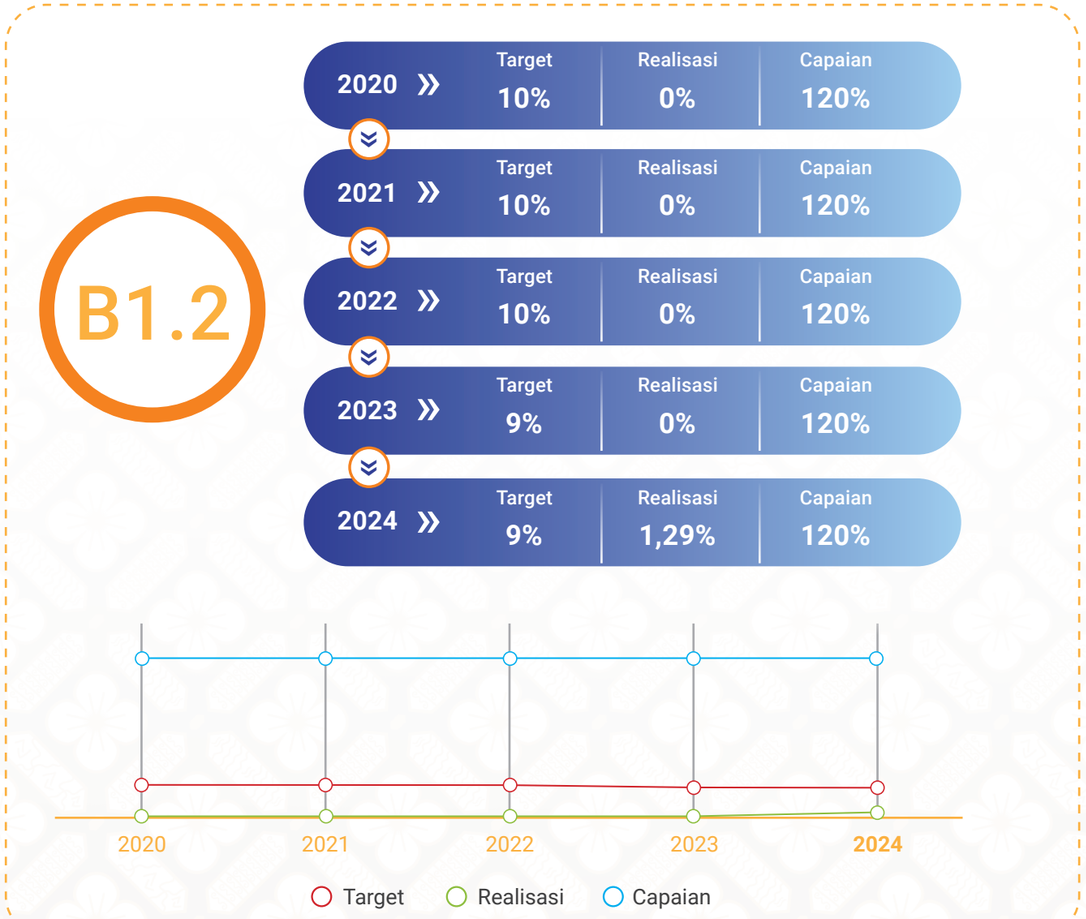

Capaian IK "Persentase alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri yang memiliki catatan blokir pada halaman IV DIPA" sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 juga tercatat memiliki realisasi IK sebesar 120%. Dengan demikian, BPO pada TA 2024 berhasil mempertahankan nilai maksimal capaian IK ini sejak TA 2020.

Target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 8% sedangkan target 2024 sesuai PK adalah 9%, terdapat perbedaan target Renstra dengan target PK di Tahun 2024 dikarenakan adanya tren penetapan target selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan peningkatan jumlah blokir di Tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya.

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian IK ini utamanya didukung oleh sumber daya manusia yang berkontribusi besar dalam mengoordinasikan pelaksanaan revisi pemanfaatan dan/atau penghapusan anggaran blokir dimaksud melalui aplikasi SAKTI untuk pelaksanaan revisi tersebut.

Kendala dan Tantangan

1. Adanya kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) blokir anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2024. Alokasi Anggaran Kementerian Luar Negeri pada TA 2024 sebesar Rp9.118.292.894.000 dengan rincian: 1) Pusat Rp3.169.925.781.000 dan 2) Perwakilan Rp5.948.367.113.000.

   Pada perkembangannya, Kementerian Keuangan melalui Surat No. S-1082/MK.02/2023 tentang *Automatic Adjustmen*t (AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 telah menetapkan blokir pagu anggaran Rupiah Murni Kementerian Luar Negeri TA 2024 sebesar Rp616.251.537.000.

2. Sebagaimana arahan Presiden RI dalam sidang kabinet tanggal 23 Oktober 2024 agar Kementerian/Lembaga dapat melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas, Menteri Keuangan melalui Surat No. S-1023/MK.02/2024 memberlakukan pembatasan Belanja Perjalanan Dinas melalui mekanisme pencantuman dalam catatan halaman IV DIPA atau blokir anggaran.

Upaya Perbaikan

Solusi/upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi berbagai kendala dan tantangan selama tahun 2024, antara lain:

1. Kementerian Luar Negeri melalui Surat No. 257/PR/06/2024/03/01 tanggal 28 Juni 2024 telah mengajukan usulan pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* (AA) Tahap I sebesar Rp380.037.175.000.
2. Menanggapi surat diatas, Kementerian Keuangan melalui Surat No. S-175/MK.2/2024 tanggal 30 Juli 2024, antara lain menyampaikan dapat mempertimbangkan usul pemanfaatan buka blokir *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp310.704.321.000.
3. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri melalui Surat No. 389/PR/09/2024/03/01 tanggal 4 September 2024 telah menyampaikan Usulan Pembukaan Blokir AA Tahap II sebesar Rp305.547.216.000.
4. Menanggapi Surat diatas, Kementerian Keuangan melalui Surat No. S-291/MK.2/2024 tanggal 20 September 2024 menyampaikan pertimbangan pemanfaatan buka blokir AA Tahap II sebesar Rp156.605.349.000.
5. Kemudian, Kementerian Luar Negeri melalui Surat No. 451/KU/10/2024/03/01 tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan usulan Pembukaan Blokir AA Tahap III sebesar Rp119.417.040.000 dari sisa anggaran blokir sebesar Rp148.941.867.000.
6. Menanggapi Surat diatas, Kementerian Keuangan melalui Surat No. S-385/MK.2/2024 tanggal 7 November 2024 menyampaikan pertimbangan positif pemanfaatan Pembukaan Blokir AA Tahap III sebesar Rp86.375.074.000.
7. Adapun perihal penghematan Belanja Perjalanan Dinas, Kementerian Luar Negeri melalui Surat No. 02950/PR/11/2024/03 menyampaikan permohonan relaksasi target pemotongan Belanja Perjalanan Dinas dari Rp77.597.917.000 menjadi Rp50.327.279.000.

Analisis Program Pendukung Capaian IK

Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri juga telah menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan Renja-K/L dan RKA-K/L Perwakilan RI secara daring yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dokumen Renja-K/L dan RKA-K/L pada satker Perwakilan sehingga menghindari revisi yang berulang kali serta dapat mengoptimalkan anggaran;
2. Merancang penganggaran dan target yang konkrit;
3. Memberikan pemahaman tentang struktur anggaran dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang baru; dan
4. Memberikan pemahaman atas Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Penyusunan RKA-K/L dan Standar Biaya Masukan untuk TA 2024.

Kegiatan tersebut menghasilkan Berita Kesepakatan antara Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan yang menjadi salah satu rujukan dalam proses penganggaran pada tahun 2024 yang antara lain mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki dari dokumen Renja-K/L dan RKAK/L Perwakilan TA 2024 yang telah disusun. Dengan demikian, ketidaksesuaian dokumen RKA-K/L dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku diharapkan bisa diminimalisir dan tidak terdapat blokir anggaran dari Ditjen Anggaran dan Kementerian Keuangan.

Berita Kesepakatan antara Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan pada Bimbingan Teknis penyusunan Renja-K/L dan RKA-K/L dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam proses penganggaran pada tahun 2024.

Proyeksi ke Depan

Seiring dengan semakin meratanya pemahaman penyusunan RKA-K/L oleh Unit Organisasi baik Pusat maupun Perwakilan serta antisipasi linimasa proses pembicaraan RKAK/L dengan Komisi I DPR RI, diharapkan target IK ini dapat terus tercapai dan terlampaui pada tahun-tahun berikutnya. Pencapaian IK ini menggambarkan proses perencanaan anggaran Kementerian Luar Negeri yang mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Dokumentasi

Gambar III.33. Rapat Koordinasi Proses Pemindahan Infrastruktur dan Data CAWI dari STIS BPS ke Kementerian Luar Negeri (Bandung, 18–20 Januari 2024)

Gambar III.35. Rapat Koordinasi Penelaahan dan Reviu RKA K/L Alokasi Anggaran TA 2025 (Bogor, 2-4 Oktober 2024).

Gambar III.34. Pendampingan BPO dalam Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Luar Negeri RI dan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI (Jakarta, 5 Juni 2024).

Analisis IK B1.3

Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI

Deskripsi IK

Revisi Anggaran adalah perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berupa penyesuaian rincian anggaran dan/ atau informasi kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenaan.

Nilai Revisi Anggaran digunakan untuk mengetahui berapa persen usulan revisi anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan.

Revisi Anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Perhitungan realisasi IK diperoleh dari Nilai Revisi DIPA berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Keuangan.

Revisi Anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Informasi Kinerja

Tabel III.29. Capaian IK B1.3 Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai
Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI	Nilai Revisi DIPA berdasarkan IKPA Kementerian Keuangan	93,90%

Realisasi	Target	Capaian
93,90%	81%	115,93%

Sumber: AKSI

Perhitungan realisasi IK diperoleh dari Nilai Revisi DIPA berdasarkan IKPA Kementerian Keuangan. Realisasi IK Nilai Revisi Anggaran Satker Kementerian dan Perwakilan adalah sebesar 93,90% dari target yang ditetapkan sebesar 81%, sehingga capaian untuk IK ini adalah sebesar 115,93%.

Perbandingan Kinerja

Perbandingan Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI selama periode Renstra 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel III.30. Target, Realisasi, dan Capaian IK B1.3 Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI

B1.3

	Target	Realisasi	Capaian
2020	95%	100%	105,26%
2021	4 (skala 5)	4	100%
2022	99%	99,91%	100,92%
2023	99%	100%	101,01%
2024	81%	93,90%	115,93%

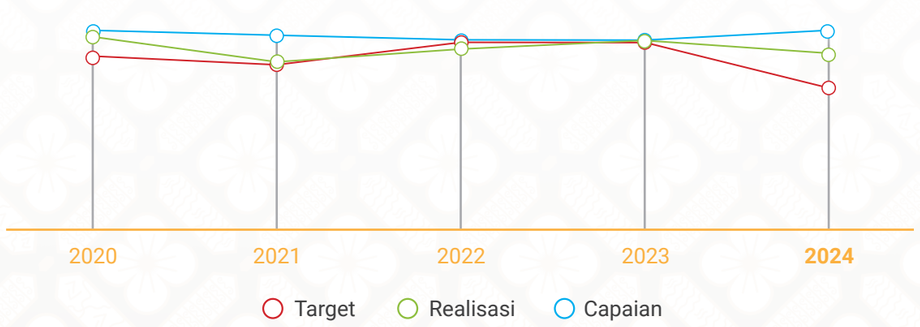

Perhitungan realisasi IK dilakukan dengan memperhitungkan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran yang memerlukan pemutakhiran oleh Kanwil DJPb.

Capaian IK "Nilai Revisi DIPA berdasarkan IKPA Kementerian Keuangan" pada TA 2023 tercatat sebesar 101,01%. Jika dibandingkan dengan capaian pada TA 2024, maka BPO berhasil untuk meningkatkan capaian menjadi 115,93%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan target Tahun 2024 sebagai bentuk upaya penyesuaian Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mengakibatkan perubahan perhitungan nilai revisi anggaran dari tahun sebelumnya.

Target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 4 (skala 5) sedangkan target 2024 sesuai PK adalah 81%, terdapat perbedaan satuan target Renstra dengan target PK di Tahun 2024 dikarenakan penyempurnaan nomenklatur dari "indeks" menjadi "nilai" untuk menyesuaikan level *outcome* di Eselon II.

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Dari jumlah nilai persentase realisasi yang diperoleh yaitu 93,90% dan capaian IK sebesar 115,93% dapat dianalisa bahwa terdapat perubahan perhitungan nilai revisi anggaran dari tahun sebelumnya dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan di Tahun 2024, sehingga menyebabkan adanya perbaikan sistem revisi pada aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI kerap diperbarui oleh Kementerian Keuangan secara berkala untuk memberikan kemudahan bagi Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan dalam melakukan proses revisi serta mengurangi kendala teknis pada saat pengoperasian aplikasi tersebut.

Selain itu, Biro Perencanaan dan Organisasi senantiasa melakukan koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran, Dit. Pelaksanaan Anggaran dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan), Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan baik dalam hal perencanaan dan penyusunan anggaran serta pada saat tahun anggaran berjalan. BPO menerapkan *Standar Operating Procedure (SOP)* yaitu pada saat unit organisasi mengajukan usulan revisi anggaran, BPO melakukan pemeriksaan atas data dukung usulan revisi dimaksud dan memberikan tanggapan secara tertulis terhadap setiap usulan revisi yang telah diajukan unit organisasi. Dengan melaksanakan strategi-strategi tersebut, BPO berhasil meraih capaian IK B1.3 Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan dengan baik.

Kendala dan Tantangan

Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi Biro Perencanaan dan Organisasi dalam mencapai target IK ini diantaranya:

1. Adanya dinamika kondisi global dan terjadinya hal-hal yang belum dapat diprediksi, seperti terjadinya perang, bencana alam, serta musibah yang mempengaruhi kondisi anggaran pada Unit Organisasi Perwakilan RI dan mendesak dilakukannya revisi anggaran.
2. Fluktuasi nilai tukar USD terhadap Rupiah dan mata uang negara setempat.
3. Kurang pahamnya mekanisme alur dan proses perencanaan anggaran secara utuh di masing-masing unit organisasi, sehingga diperlukannya perbaikan atau revisi anggaran pada unit organisasi bersangkutan.
4. Di akhir tahun 2024, terdapat revisi anggaran akibat kebijakan penghematan Belanja Perjalanan Dinas dan revisi anggaran perihal pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai yang cukup berdekatan waktunya yang berdampak pada proses pengesahan revisi yang memakan waktu lebih lama dari biasanya.

Upaya Perbaikan

Untuk dapat mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi, Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan beberapa upaya perbaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan pemberian pembekalan terkait perencanaan dan penyusunan anggaran serta pelatihan sertifikasi penyusunan RKA K/L.
2. Efisiensi pelaksanaan revisi dengan menggabungkan beberapa mekanisme revisi anggaran sekaligus pada saat pengajuan revisi kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai pemegang kewenangan revisi anggaran tertinggi.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran, Dit. Pelaksanaan Anggaran dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan).
4. Meningkatkan peran dan kewenangan Unit Eselon I (Sekretaris Jenderal) untuk dapat melakukan realokasi anggaran secara terpusat sebagai upaya peningkatan kinerja anggaran dan mengurangi potensi SIAR.

Analisis Program Pendukung Capaian IK

Analisa beberapa program/kegiatan pendukung capaian pada IK ini diantaranya yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi telah melaksanakan kegiatan reviu dan penelaahan Renja dan RKA-K/L pada T-1 untuk memastikan anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan.

2. Di samping itu, Biro Perencanaan dan Organisasi juga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran setiap triwulan untuk memastikan progres dan mengantisipasi kebutuhan anggaran pada unit organisasi.

Proyeksi Kedepan

Beberapa program yang direncanakan pada tahun mendatang yaitu:

1. Pelaksanaan sosialisasi tata cara revisi anggaran TA 2025.
2. Kegiatan reviu dan penelaahan Renja dan RKA-K/L TA 2026.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran setiap triwulan pada TA 2025.
4. Evaluasi revisi anggaran pada akhir TA 2025.

Dokumentasi

Gambar III.36. Bimbingan Teknis Penyusunan Renja-K/L dan RKA-K/L Perwakilan RI TA 2025 di (Kreo, 3-14 Juni 2024).

Gambar III.37. Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran untuk Perwakilan RI (Bandung, 21-24 Agustus 2024)

Gambar III.38. Rapat Pembahasan Usulan Kenaikan Gaji Pegawai Setempat (Jakarta, 2 September 2024).

Gambar III.39. Rapat Evaluasi Penerapan FSR dan Dampak Revisi Anggaran Terhadap Penerapan FSR (Batam, 19-21 September 2024).

Sasaran Kegiatan (B2) Hasil analisis terkait organisasi yang optimal

Ruang lingkup hasil analisis ini berupa kajian terhadap organisasi guna mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin terjadi yang ditelaah dan dikaji lebih lanjut guna menghasilkan Analisis Pemenuhan Indikator Nilai RB melalui Penyederhanaan Birokrasi.

Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menemukan dan mencari hasil analisis yang dapat digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan maupun digunakan secara langsung dalam pengambilan keputusan.

Sasaran Kegiatan B2 diukur berdasarkan capaian pada 1 (satu) IK B2.1: Persentase Analisis Terkait Organisasi yang Dimanfaatkan.

Analisis IK B2.1

Persentase Analisis Terkait Organisasi yang Dimanfaatkan

Deskripsi IK

Analisis terkait Organisasi yang dimanfaatkan digunakan untuk memastikan setiap rencana analisis yang disusun dimanfaatkan hingga akhirnya mengeluarkan hasil analisis beserta rekomendasi-rekomendasinya sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

IK ini digunakan untuk memastikan setiap rencana analisis yang disusun dimanfaatkan hingga akhirnya mengeluarkan hasil analisis beserta rekomendasi-rekomendasinya sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Perhitungan IK diperoleh dari persentase analisis terkait organisasi yang dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah analisis berdasarkan kebutuhan kemudian dikali 100%.

Informasi Kinerja

Tabel III.31. Capaian IK B2.1 Persentase Analisis terkait Organisasi yang Dimanfaatkan

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Analisis terkait Organisasi yang Dimanfaatkan	Persentase analisis terkait organisasi yang dimanfaatkan dengan jumlah analisis berdasarkan kebutuhan	100%

Realisasi	Target	Capaian	Batas Toleransi
100%	82%	121.95%	120%

Sumber: AKSI

Dari tabel di atas, diperoleh informasi untuk realisasi IK B2.1 "Persentase Analisis Terkait Organisasi yang Dimanfaatkan" sebesar 100%, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 82%. Dengan demikian, capaian IK mencapai 121.95% dengan batas toleransi capaian sebesar 120%.

Pada Tahun 2024, BPO telah melaksanakan 26 analisis terkait organisasi untuk dimanfaatkan oleh pimpinan. Dari ke 26 analisis tersebut, terdapat 4 analisis yang menjadi produk hukum yaitu:

1. **Analisis Penyesuaian Besaran Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri**
   Penyesuaian ADTLN perlu ditetapkan untuk masing-masing kota dimana Perwakilan berkedudukan. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan perbedaan tingkat kemahalan yang signifikan antar kota dalam suatu negara. Penyesuaian Besaran ADTLN diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan tingkat kemahalan yang dihadapi di Perwakilan RI. Dengan demikian negara dapat memberikan dukungan penghidupan yang layak bagi para pegawai di Perwakilan RI sesuai dengan tuntutan profesi dan postur diplomat, sebagai representasi resmi bangsa dan negara di negara akreditasi. Analisis ini menghasilkan produk hukum berupa Peraturan Presiden No. 84 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2019.

2. **Analisis terkait Penyusunan Peraturan Presiden tentang Kementerian Luar Negeri**
   Analisis ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur Kementerian Luar Negeri agar mampu memenuhi tuntutan dinamika global dan nasional serta menjalankan mandat koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri secara efektif, dan menopang pelaksanaan prioritas nasional yang diamanatkan pada Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebutuhan tersebut, maka diterbitkannya Peraturan Presiden No. 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri.

3. **Analisis Penyusunan Petunjuk Teknis dan SOP *Data Economic Intelligence* (DEI)**
   Berdasarkan hasil Audit Kinerja Diplomasi Ekonomi Tahun Anggaran 2022, Kementerian Luar Negeri menerima rekomendasi untuk menyusun standar penilaian dan pemanfaatan *Data Economic Intelligence* (DEI). Menindaklanjuti hal tersebut, BPO bersama dengan Unit Regional Ditjen Aspasaf, Ditjen Amerop dan BSKLN menyusun analisis Petunjuk Teknis (Juknis) dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) DEI yang memuat tentang tata cara penyusunan, SOP, penilaian dan juga cara pemanfaatan dari DEI pada Perwakilan RI yang dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Luar Negeri No. 04/B/PR/08/2024/01 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan *Data Economic Intelligence* Perwakilan RI di Kemenlu dan Perwakilan RI.

4. **Analisis Pemenuhan Indikator Nilai RB melalui Penyederhanaan Birokrasi**
   Dalam rangka mencapai target Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri khususnya RB General pada indikator penyederhanaan birokrasi, Kementerian Luar Negeri c.q. BPO telah melakukan analisis penyederhanaan birokrasi. Selanjutnya guna memberikan pedoman kepada unit organisasi dan pimpinan di lingkungan Kemenlu dalam rangka efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan yang lebih terfokus pada kompetensi teknis, maka disusunlah Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. 14/B/RO/09/2024/01 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Di Tahun 2024, terdapat 4 (empat) analisis yang menjadi Produk Hukum.

Analisis yang terkait organisasi tidak hanya dilakukan setahun sekali, namun juga ada yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali setahun dengan tema yang sama namun lingkup yang berbeda. Selebihnya beberapa analisis yang terkait organisasi yang dimanfaatkan oleh pimpinan di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Analisis Penyusunan Pedoman Postur Diplomasi**
   Untuk memberikan arah bagi Kementerian Luar Negeri dalam menyiapkan kelembagaan dan infrastruktur (SDM, anggaran, dan fisik) di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dalam mencapai visi Indonesia emas 2045.

2. **Analisis terkait Penyusunan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri**
   Penataan organisasi dan tata kerja Kemenlu diarahkan untuk menciptakan struktur organisasi, nomenklatur, serta rumusan tugas dan fungsi yang mampu mencerminkan peran strategis Kementerian Luar Negeri.

3. **Analisis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Perwakilan RI**
   Penataan kelembagaan Perwakilan RI dilaksanakan agar pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri dapat berjalan secara efektif, efisien serta dapat menjawab tantangan serta dinamika global yang ada.

4. **Analisis Pembukaan Perwakilan RI di Chengdu, RRT**
   Guna meningkatkan kehadiran Indonesia, meningkatkan peluang strategis Indonesia untuk memperluas pasar dan penguatan pelindungan WNI di Tiongkok khususnya di bagian tengah.

5. **Analisis Penyederhanaan Program Kementerian Luar Negeri**
   Untuk menyederhanakan struktur kinerja dan memperjelas penjabaran *outcome* strategis K/L ke dalam struktur organisasi baik pada level eselon I maupun eselon II, menyelaraskan program antara Pusat dan Perwakilan RI sehingga memudahkan identifikasi dan kolaborasi rencana kerja, serta penyederhanaan birokrasi dalam proses optimalisasi anggaran.

6. **Analisis Evaluasi Standar Biaya Masukan Lainnya untuk Fasilitas Sewa Rumah**
   Pada perkembangannya, harga sewa rumah di sejumlah negara telah mengalami kenaikan setelah Pandemi Covid-19 atau pada saat besaran Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) tersebut diterapkan pada tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian besaran SBML pada sejumlah Perwakilan.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.32. Target, Realisasi, dan Capaian IK B2. 1 Persentase Analisis Terkait Organisasi yang Dimanfaatkan

B2.1

	Target	Realisasi	Capaian
2020	N/A	N/A	N/A
2021	N/A	N/A	N/A
2022	70%	100%	142,86%
2023	80%	100%	125%
2024	82%	100%	121,95%

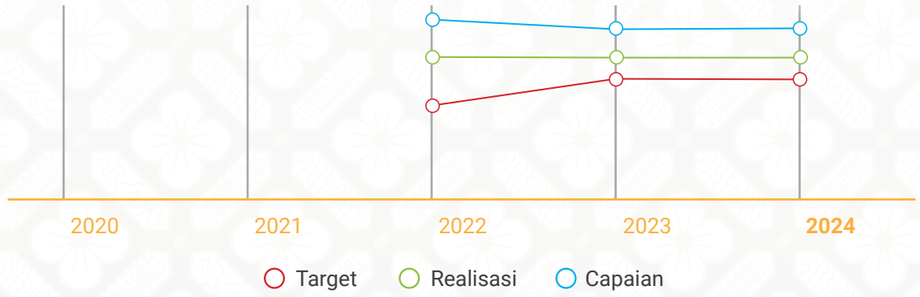

IK B2.1 "Persentase Analisis Terkait Organisasi yang Dimanfaatkan" baru diimplementasikan pada tahun 2022 untuk mengukur capaian analisis yang berkaitan dengan organisasi yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dengan lebih optimal. Dengan demikian, IK B2.1 tidak memiliki target akhir Renstra Tahun 2024 dan realisasi IK di tahun 2024 hanya dapat dibandingkan dengan realisasi IK tahun 2023 dan 2022.

Target IK tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 82% dari yang sebelumnya 80% pada tahun 2023. Target tahun 2024 ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan capaian IK Tahun 2023 yang melampaui target, serta untuk memacu performa kinerja analisis terkait organisasi target yang menantang namun tetap *achievable.*

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Terdapat 26 analisis terkait organisasi yang disampaikan dan dimanfaatkan secara penuh oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan. Analisis tersebut dijadikan *policy memo* yang disampaikan Biro Perencanaan dan Organisasi bagi pimpinan sebagai bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian IK ini antara lain:

1. Terjalinnya koordinasi erat antara seluruh unsur pemegang kepentingan seperti satuan kerja di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan instansi-instansi terkait lainnya.
2. Telah tersedianya anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan yang berkaitan dengan analisis tentang organisasi.
3. Kapasitas SDM yang mumpuni untuk dapat melakukan analisis, salah satu contohnya adalah kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dengan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) sebagai *think tank* dalam analisis penyusunan pedoman postur diplomasi Kementerian Luar Negeri.

Analisis yang disampaikan Biro Perencanaan dan Organisasi dijadikan *policy memo* bagi pimpinan sebagai bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Target IK dapat tercapai karena dukungan dan koordinasi yang berjalan dengan baik dari semua unsur di BPO serta Kementerian Luar Negeri. Adapun beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan berdampak terhadap capaian IK antara lain:

1. Program/Kegiatan terkait Penyusunan Pedoman Postur Diplomasi
- Diskusi Terpumpun Pembahasan Lini Masa Kegiatan dan Sub Tema Postur Diplomasi Tahun 2024
- Diskusi Terpumpun Lanjutan Penyusunan Postur Diplomasi
- Rapat Persiapan *Forum Group Discussion* Penyusunan Pedoman Postur Diplomasi
- *Forum Group Discussion* Penyusunan Pedoman Postur Diplomasi
- Dialog Konsultasi Tata Kelola Infrastruktur Diplomasi pada Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Afrika Selatan dalam rangka Penyusunan Pedoman Postur Diplomasi
- Rapat Persiapan Dialog Konsultasi Tata Kelola Infrastruktur Diplomasi pada Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Afrika Selatan dalam rangka Penyusunan Postur Diplomasi
- Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi dan Penajaman Postur Diplomasi
- *Focus Group Discussion* Arah Kebijakan Luar Negeri dalam rangka Penyusunan Postur Diplomasi Indonesia 2045
- Pertemuan Penyampaian Draf Final Pedoman Postur Diplomasi
- Pertemuan Penyesuaian Draf Final Pedoman Postur Diplomasi

2. Program/Kegiatan terkait Penyusunan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri
- Rapat Koordinasi Internal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait Pembahasan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kemenlu
- Rapat Pembahasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri
- Rapat Lanjutan Pembahasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri
- Rapat Finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri

3. Program/Kegiatan terkait Pembukaan Perwakilan RI di Chengdu
- Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembukaan KJRI Chengdu
- Rapat Koordinasi Pembahasan Konsep Naskah Akademik Pembukaan Konsulat Jenderal RI di Chengdu dan Kelengkapan Dokumen Administrasi Lainnya
- Rapat Persiapan Untuk Pembahasan Konsulat Jenderal RI di Chengdu
- Rapat Pembahasan Validasi Isian Kuesioner Indeksasi KJRI Chengdu dan Pembaharuan Data Pejabat Penugasan Pertahanan dan Teknis pada Perwakilan RI
- Rapat Koordinasi Pembukaan Konsulat Jenderal RI di Chengdu (KJRI Chengdu)

Kendala dan Tantangan

Kendati capaian IK B2.1 pada tahun 2024 telah mencapai target, Biro Perencanaan dan Organisasi menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang berasal dari faktor eksternal dalam pelaksanaan analisis yang berkaitan dengan organisasi. Kendala dan tantangan tersebut antara lain:

1. Sebagai bagian dari infrastruktur pendukung *core business* Kementerian Luar Negeri, dalam penyusunan analisis dimaksud, Biro Perencanaan dan Organisasi kerap dihadapkan pada isu-isu substantif dan teknis yang berada di luar tugas dan fungsi Biro.

2. Terkait isu substantif dan teknis diluar tugas dan fungsi BPO, guna memenuhi kebutuhan dimaksud, BPO meminta pandangan dan masukan dari unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan RI. Berkaitan dengan hal tersebut, BPO acap kali menerima pandangan atau masukan melebihi tenggat waktu yang diberikan. Sehingga, mempengaruhi penyelesaian analisis yang dilakukan BPO.

3. Pada perkembangannya, jumlah analisis yang dilaksanakan oleh BPO setiap tahun semakin meningkat. Sehingga, kebutuhan akan pemenuhan sumber daya manusia untuk melaksanakan analisis terkait organisasi turut meningkat.

4. Dengan adanya dinamika perubahan pemerintahan pada Tahun 2024 berimbas pada fokus Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyesuaikan beberapa Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan organisasi dan tata kerja. Hal ini secara langsung mempengaruhi lini masa penyelesaian beberapa analisis yang dilaksanakan oleh BPO.

5. Koordinasi pertemuan dengan mitra K/L yang cukup menantang dalam hal penjadwalan pertemuan. Sehingga, dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi lini masa penyelesaian analisis yang telah dibuat sebelumnya.

Upaya Perbaikan

Biro Perencanaan dan Organisasi berkomitmen untuk selalu melaksanakan pembinaan kepada seluruh pegawai untuk menjaga kualitas hasil analisis serta pemahaman substansinya. Biro Perencanaan dan Organisasi juga mengedepankan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai pada proses penempatan di bagian-bagian. Sehingga, dapat terjalin harmonisasi dan membangun integritas yang tinggi guna mendukung kinerja unit organisasi.

Guna menjawab kendala dan tantangan yang dihadapi yang berkaitan dengan koordinasi antar K/L, Biro Perencanaan dan Organisasi selalu berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh mitra K/L. Salah satu contohnya adalah pendekatan dengan mitra dari Kementerian PANRB berkaitan dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Perwakilan RI serta hal-hal yang terkait dengan organisasi Kementerian Luar Negeri. Pada Tahun 2024, Biro Perencanaan dan Organisasi telah mengadakan beberapa kali pertemuan khusus dengan mitra K/L dimaksud untuk berdiskusi dan berkoordinasi lebih intens serta menjaga hubungan baik yang telah terjalin dalam kerangka pencapaian tujuan Kementerian Luar Negeri.

Proyeksi Kedepan

Pada Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Organisasi akan melaksanakan beberapa analisis yang masih memerlukan tindak lanjut dari Tahun 2024, di antaranya :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Kementerian Luar Negeri.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Perwakilan RI.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.
4. Analisis Pembukaan Perwakilan RI di Chengdu, RRT
5. Analisis penyusunan Grand Strategi dan Regulasi terkait Postur Diplomasi.
6. Analisis Pengajuan Usulan Penyesuaian Standar Biaya Masukan Lainnya untuk Fasilitas Sewa Rumah untuk 15 kota.

Selain analisis sebagaimana disebutkan di atas, Biro Perencanaan dan Organisasi juga akan melaksanakan analisis terkait organisasi sesuai dengan perencanaan kinerja dan program prioritas Kementerian Luar Negeri. Lebih lanjut, Biro Perencanaan dan Organisasi terus mengupayakan penyusunan analisis yang berkualitas yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan.

Dokumentasi

Gambar III.40. Kegiatan *Focus Group Discussion* Arah Kebijakan Luar Negeri dalam rangka Penyusunan Postur Diplomasi Indonesia 2045 (Bandung, 19-22 Juni 2024)

Gambar III.41. Rapat Panitia Antar Kementerian dan Non-Kementerian (PAK) Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi Perwakilan RI (R-Perpres OPRI), (Jakarta, 24 Juni 2024).

Gambar III.42. Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kepmenlu tentang Pedoman Sistem Kerja dalam rangka Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (Bogor 6-7 September 2024).

Gambar III.43. Rapat Finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Bandung, 31 Oktober – 3 November 2024)

Gambar III.44. Rapat Konsolidasi dan Pemutakhiran Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), (Jakarta, 5-6 Desember 2024)

Learning and Growth Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan dan dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh BPO dalam menjalankan proses bisnis untuk mewujudkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan.

Sasaran Kegiatan (L1) Tata Kelola Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi yang Baik

IK L1.1 : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Perencanaan dan Organisasi

IK ini untuk mengukur sejauh mana Biro Perencanaan dan Organisasi telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Realisasi

2023	79,30
2024	80,25

Sasaran Kegiatan (L2) Pengelolaan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi yang Optimal dan Akuntabel

IK L2.1 : Persentase Realisasi Anggaran BPO

IK ini untuk mengukur sejauh mana Biro Perencanaan dan Organisasi telah melakukan pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel.

Realisasi

2023	100%
2024	100%

Sasaran Kegiatan (L1) Tata Kelola Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi yang Baik

Tata Kelola Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi yang baik merupakan salah satu unsur dari infrastruktur diplomasi yang kuat yang merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi yang mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.

Sasaran Kegiatan L1 diukur berdasarkan capaian pada 1 (satu) IK L1.1: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPO yang merupakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Analisis IK L1.1

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Perencanaan dan Organisasi

Deskripsi IK

Nilai Evaluasi AKIP BPO merupakan nilai dari komitmen BPO yang secara konsisten meningkatkan pencapaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan secara tepat sasaran, akuntabel dan berorientasi hasil melalui implementasi SAKIP.

Inspektorat Jenderal, Kemenlu melakukan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah yang berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal No. 00651/B/PW/05/2023/67/11 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, yang disesuaikan dengan Peraturan Kemen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang 4 (empat) komponen penilaian dengan bobot dan ruang lingkup evaluasi AKIP sebagai berikut:

Komponen Penilaian:

- Perencanaan Kinerja (30%)
- Evaluasi Kinerja (25%)
- Pengukuran Kinerja (30%)
- Pelaporan Kinerja (15%)

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- Penilaian pelaporan kinerja; dan
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Dengan adanya pelaksanaan evaluasi AKIP BPO, diharapkan memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; perolehan nilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja; memperoleh saran perbaikan untuk peningkatan AKIP serta informasi kesesuaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya oleh BPO.

Adapun predikat nilai evaluasi AKIP adalah

Dari data diatas akan ditemukan hasil akhir nilai AKIP Satker dengan klasifikasi sebagai berikut:

AA	Skor	90 - 100	Sangat Memuaskan	CC	Skor 50 - 60 Cukup (Memadai)
A	Skor	80 - 90	Memuaskan	C	Skor 30 - 50 Kurang
BB	Skor	70 - 80	Sangat Baik	D	Skor 0-30 Sangat Kurang
B	Skor	60 - 70	Baik		

Informasi Kinerja

Tabel III.33. Capaian IK L1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPO

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPO	Nilai Evaluasi AKIP yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemenlu	80,25 *)

Realisasi	Target	Capaian
80,25 *)	80	100,31%

Sumber: AKSI
*) Nilai Evaluasi AKIP BPO tahun 2023/2024

Pada tahun 2024, realisasi IK L1.1 Nilai Evaluasi AKIP BPO tercatat sebesar 80,25 (A), dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 80. Dengan demikian, capaian IK sebesar 100,31%. Interpretasi dari perolehan nilai Evaluasi AKIP tersebut adalah:

A
(Nilai 80-90)

MEMUASKAN
Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/Subkoordinator

Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal, Kemenlu. Secara umum, kenaikan nilai IK L1.1 Nilai Evaluasi AKIP BPO di tahun 2023/2024 disebabkan oleh peningkatan kualitas pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (Renaksi), Manual Indikator Kinerja (Manual IK) dan Laporan Kinerja (LKj) serta tindaklanjut BPO terhadap rekomendasi APIP di tahun sebelumnya.

Dari segi perencanaan kinerja di awal Tahun 2023 dan 2024 BPO sudah membuat Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja beserta manual indikator kinerja yang digunakan sebagai pengukuran kinerja setiap triwulan untuk dituangkan ke dalam aplikasi AKSI Kemenlu secara berkala sekaligus sebagai pelaporan kinerja. Selain itu, pelaporan kinerja

Secara umum, kenaikan Nilai Evaluasi AKIP BPO di Tahun 2023/2024 disebabkan oleh peningkatan kualitas pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

juga dilakukan oleh pegawai BPO setiap tahunnya melalui aplikasi e-kinerja BKN dan sebagai pelaporan kinerja secara utuh di Tahun 2023, BPO juga menyampaikan LKj Tahunan secara tepat waktu dan telah mempublikasikannya di *website* Kemenlu. Sebagai upaya dalam peningkatan kualitas kinerja, selama tahun 2023 BPO juga melakukan rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) secara berkala.

Perbandingan Kinerja

Adapun penilaian evaluasi implementasi SAKIP selama 5 tahun (2020-2024) secara detail dapat dijelaskan tergambarkan dari tabel berikut:

Tabel III.34. Nilai Komponen IK L1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPO

Komponen Yang Dinilai	Bobot	2020	2021	2022	Bobot	2023	2023/ 2024
Perencanaan Kinerja	30%	24,96	25,15	25,43	30%	24,60	24,60
Pengukuran Kinerja	25%	19,06	19,06	19,38	30%	24,60	24,60
Pelaporan Kinerja	15%	12,35	12,18	12,45	15%	11,85	12,30
Evaluasi Kinerja	10%	7,64	7,64	7,98	25%	18,25	18,75
Capaian Kinerja	20%	14,23	14,65	14,02			
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		77,88	78,68	79,25		79,30	80,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB		BB	A

Dari tabel di atas, terdapat perbedaan komponen penilaian evaluasi implementasi SAKIP dari tahun 2019-2021 yang menggunakan 5 (lima) komponen menjadi 4 (empat) komponen di tahun 2022

Terdapat perubahan Peraturan Kemen PANRB No. 12 Tahun 2015 yang semula digunakan sebagai pedoman evaluasi atas implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi Peraturan Kemen PANRB No. 88 Tahun 2021

sampai sekarang. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan Peraturan Kemen PANRB No. 12 Tahun 2015 tertanggal 22 Juni 2015 yang semula digunakan sebagai pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi Peraturan Kemen PANRB No. 88 Tahun 2021 tertanggal 31 Desember 2021.

Dimana penyajian Nilai Evaluasi AKIP di tahun 2020-2022 menggunakan Nilai Evaluasi AKIP tahun sebelumnya dikarenakan di tahun berkenaan hasil dari Nilai Evaluasi AKIP belum terbit.

Walaupun tidak dapat dibandingkan secara 5 tahun berdasarkan detail komponen penilaian evaluasi implementasi SAKIP, namun masih bisa dilihat perbandingan kinerja selama periode Renstra 5 tahun dimana nilai AKIP BPO mengalami kenaikan setiap tahun.

Tabel III.35. Target, Realisasi, dan Capaian IK L1.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPO

L1.1

	Target	Realisasi	Capaian
2020	79	77,88	98,58%
2021	79	78,68	99,59%
2022	80	79,25	99,06%
2023	80	79,30	99,13%
2023/ 2024	80	80,25	100,31%

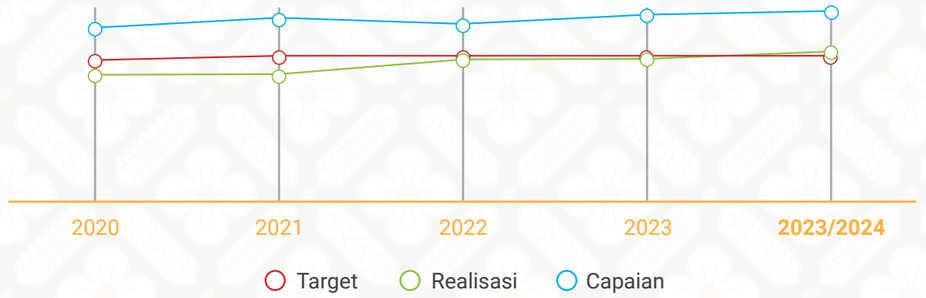

Nilai hasil evaluasi AKIP untuk tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 didasarkan pada kenaikan komponen perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Namun demikan, terjadi penurunan pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal yang tidak mengalami perubahan.

Sedangkan untuk nilai hasil evaluasi AKIP untuk tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 dikarenakan terdapat perbaikan dalam penetapan target kinerja BPO dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik dalam perencanaan kinerja serta menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dokumen pelaporan. Selain itu, BPO telah menyajikan informasi keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.

Untuk hasil evaluasi AKIP tahun 2023 tidak dapat dibandingkan, namun terdapat penjelasan terkait aspek kualitas, perencanaan kinerja BPO yang telah disusun sudah memadai dan memenuhi sebagian besar kriteria penilaian. Begitu pula dengan aspek pemanfaatan, dokumen perencanaan kinerja secara umum telah dimanfaatkan untuk perbaikan penyusunan perencanaan secara berkesinambungan. BPO juga telah menyusun LKj yang mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja dan telah diformalkan dan dipublikasikan melalui website resmi Kementerian.

Terkait dengan perbandingan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023/2024 yang mengalami kenaikan dari tahun 2023, sudah dijelaskan dalam informasi kinerja di atas.

Target akhir Renstra Tahun 2024 sebesar 82 (A) sedangkan target 2024 sesuai PK adalah 80 (BB), terdapat perbedaan target Renstra dengan target PK di Tahun 2024 dikarenakan evaluasi dari hasil realisasi dan capaian dari Tahun 2020-2023 yang tidak mencapai target maksimal sehingga target Tahun 2024 disesuaikan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

1. Perencanaan Kinerja

BPO telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yaitu Renstra Tahun 2020-2024 dan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek/tahunan yaitu Renja tiap tahunnya (2020-2024) dimana rencana kinerja tersebut dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja.

Sebagai pedoman dalam mencapai target yang dibuat, BPO juga menyusun Manual IK dan Renaksi tiap tahunnya (2020-2024). Dokumen perencanaan kinerja tersebut disusun dengan orientasi untuk mencapai hasil dengan menggunakan ukuran kinerja yang SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* dan *Continously Improved*). selama periode Renstra 5 tahun (2020-2024), berikut target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan:

BPO telah menyusun dokumen perencanaan kinerja dengan menggunakan ukuran kinerja yang SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* dan *Continously Improved*) untuk orientasi mencapai hasil.

Tabel III.36. Target, Realisasi, Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi

Indikator Kinerja	2020	Realisasi 2020	2021	Realisasi 2021	2022	Realisasi 2022	2023	Realisasi 2023	2024	Realisasi 2024
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.	85	76,81	83	77,88	81	79,46	81	81,55	**81**	**81,55**
Nilai Evaluasi AKIP Kemenlu.	78 (BB)	77,83	79 (BB)	78,59	79.5 (BB)	78,81	79.8 (BB)	79,15	**79.8 (BB)**	**80,86**
Tingkat Maturitas SPIP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**3,60 (skala 5)**	**3,86**
Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi.	N/A	N/A	N/A	N/A	4 (skala 1-4)	3,92	3,6 (skala 4)	3,54	**3,6 (skala 4)**	**3,43**
Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal.	79 (BB)	79,54	80 (BB)	79,89	80 (BB)	80,19	80,20 (AA)	80,40	**80,45(A)**	**81,05**
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal.	90	84,14	91	86,60	91	90,29	92	91,14	N/A	N/A
Jumlah Unit Eselon 1 dan Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran min. 92.	N/A	N/A	N/A	N/A	40	26	30	11	N/A	N/A
Jumlah Unit Organisasi Kementerian dan Satker Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal "Sangat Baik" (BB).	112 (dari 141)	126	122 (dari 141)	131	130 (dari 141)	128	130 (dari 141)	133	**135**	**139**
Persentase alokasi yang memiliki catatan blokir pada halaman IVA DIPA.	10%	0%	10%	0%	10%	0%	9%	0%	**9%**	**1,29%**
Indeks/Nilai Revisi Anggaran Satker Kementerian dan Perwakilan.	95%	100%	4 (skala 5)	4	99%	99,91%	99%	100%	**81%**	**93,90%**
Persentase Analisis terkait Organisasi yang Dimanfaatkan	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	100%	80%	100%	**82%**	**100%**
Nilai Evaluasi AKIP BPO.	79 (BB)	77,88	79 (BB)	78,68	80 (BB)	79,25	80 (BB)	79,30	**80 (BB)**	**80,25**
Persentase Realisasi Anggaran BPO.	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	87,99%	95%	100%	**95%**	**100%**

Penyesuaian kualitas dan target tersebut tidak hanya didasarkan pada SMART-C, namun juga didasarkan pada realisasi tahun lalu dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pihak pengawas internal dan eksternal terhadap kualitas Indikator Kinerja BPO.

Pada Tahun 2024, IK terkait Nilai Kinerja Anggaran (NKA) SMART dianggap menjadi tidak relevan untuk dijadikan sebagai IK. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kalkulasi NKA oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu.

2. Pengukuran Kinerja

Manual IK yang disusun sebagai pedoman dalam mencapai target digunakan sebagai pengukuran kinerja. Di Tahun 2023 dan Tahun 2024, BPO telah menyusun Manual IK yang didalamnya menjelaskan definisi operasional dan mekanisme pengumpulan data kinerja yang jelas dan dapat diandalkan pada tingkat Unit Organisasi.

Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan organisasi dalam mengelola kinerja dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. BPO melakukan pengukuran kinerja secara berkala (triwulan dan tahunan) melalui aplikasi e-kinerja BKN, aplikasi e-Monev Bappenas dan aplikasi AKSI Kemenlu yang dituangkan dalam LKj beserta dengan Realisasi Rencana Aksi dan Matriks Informasi Kinerja (tahunan).

3. Pelaporan Kinerja

BPO telah Menyusun LKj tahun 2023 pada tingkat Unit Organisasi dan disampaikan pada tanggal 18 Januari 2024 (tepat waktu). Laporan Kinerja telah mengungkapkan informasi tentang pencapaian kinerja dan telah diformalkan dan dipublikasikan melalui *website* resmi Kemenlu. Pelaporan kinerja secara triwulanan di Tahun 2024 juga telah dilakukan BPO melalui aplikasi AKSI Kemenlu beserta realisasi Rencana Aksi yang dikirim secara resmi melalui memorandum ke Bagian Evaluasi Kinerja Kementerian dan Perwakilan, BPO.

Di tahun 2023, pegawai BPO secara menyeluruh telah menyusun dan melaporkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2023 serta telah menyusun dan melaporkan SKP secara berkala (triwulanan dan tahunan) di tahun 2024 sebagai realisasi dari turunan perjanjian kinerja organisasi ke masing-masing individu/ pegawai BPO.

Dibandingkan dengan tahun 2022, data kinerja yang disajikan BPO pada LKj tahun 2023 lebih komprehensif karena berisi informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan realisasi tahun-tahun sebelumnya, analisis keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi sumber daya secara umum dan upaya perbaikan ke depan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

BPO secara berkala melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui rapat DKO yang telah terdokumentasi dalam laporan rapat. Selaku pimpinan BPO, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi selalu terlibat dalam pengambilan keputusan serta memberikan arahan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja triwulanan yang akan berlangsung dan tahunan.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja BPO. Dalam hal ini BPO terus berupaya untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dan menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP BPO tahun 2023/2024 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (target pada tahun akhir Renstra) dimasing-masing IK serta Matriks Penjenjangan Kinerja yang menggambarkan hubungan kinerja, strategi kebijakan, dan aktivitas antar instansi maupun unit kerja lainnya (*crosscutting*) yang tersaji di dalam Matriks Informasi Kinerja di dalam LKj BPO Tahun 2024, telah disajikan.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja IK L1.1. Terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2024:

1. Perencanaan Kinerja

Pada tanggal 27 Februari 2024, BPO telah menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan PK, Manual IK dan Renaksi Tahun 2024 sebagai komitmen dan kesepakatan kesinambungan kinerja untuk tahun 2024 yang didukung oleh IK yang diampu oleh masing-masing bagian di Lingkungan BPO. Rapat tersebut dihadiri oleh Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO), Pengelola Keuangan dan *Person in Charge* (PIC).

Penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan realisasi kinerja dan anggaran tahun sebelumnya serta proyeksi pencapaian periode berjalan di Tahun 2024.

Dalam pembahasan IK pada PK Kepala BPO Tahun 2024, terdapat beberapa target yang dilakukan penyesuaian dan terdapat IK baru yang diadakan sesuai dengan *cascading* yang diterima dari PK Sekretaris Jenderal Tahun 2024 yaitu:

BPO telah menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan PK, Manual IK dan Renaksi PK BPO Tahun 2024 sebagai komitmen dan kesepakatan kesinambungan kinerja untuk tahun 2024 yang didukung oleh IK yang diampu oleh masing-masing Bagian di Lingkungan BPO.

Tabel III.37. Perubahan Target dan IK Baru pada PK Kepala BPO Tahun 2024

Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
S1.3	Tingkat Maturitas SPIP	N/A	3,6 (skala 5)
C2.1	Nilai Evaluasi AKIP Setjen	80,20 (A)	80,45 (A)
B1.1	Jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal ¨SANGAT BAIK¨ (BB)	130	135
B1.3	Nilai Revisi Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI	99%	81%
B2.1	Persentase Analisis terkait Organisasi yang dimanfaatkan	80%	82%

Dengan adanya IK baru di Tahun 2024 yaitu IK S1.3 Tingkat Maturitas SPIP, BPO telah menyusun Manual IK baru sebagai penjelasan IK yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja di Tahun 2024.

Selain itu, BPO juga mengikuti Kegiatan Penyusunan Muatan Informasi Kinerja dan Anggaran dalam KRISNA RENSTRA 2025-2029 di Bulan September 2024. Pada kegiatan tersebut, BPO telah menyampaikan kerangka pendanaan tahun 2025 sampai 2029 dengan memperhatikan kondisi ideal serta pemenuhan kebutuhan pelaksanaan program jangka menengah di lingkungan BPO.

2. Pengukuran Kinerja

Secara berkala, BPO telah melakukan pengukuran kinerja dengan mengisi realisasi kinerja baik di aplikasi Monev nasional: SAKTI (Kemenkeu), e-Monev (Bappenas), e-kinerja BKN maupun aplikasi Monev internal: aplikasi AKSI Kemenlu serta Realisasi Rencana Aksi, Laporan Kinerja Tahunan dan Matriks Informasi Kinerja secara tepat terhadap target organisasi yang telah ditetapkan di Perjajian Kinerja. Tidak hanya mengisi nilai realisasi kinerja saja di aplikasi tersebut, tetapi BPO juga melampirkan data dukung sebagai lampiran atas klaim capaian atas target yang ditetapkan.

Secara berkala, BPO telah melakukan pengukuran kinerja dengan mengisi realisasi kinerja baik di aplikasi Monev nasional dan Monev internal

Dalam mendukung pengukuran kinerja BPO di Tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan yang diikuti oleh BPO sepanjang Tahun 2024:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja dan Anggaran triwulanan (Juli dan September) yang membahas evaluasi atas pelaporan realisasi kinerja dan anggaran serta adanya rekomendasi dan arahan dari pihak internal maupun pihak eksternal (Bappenas dan Kemenkeu) untuk menyempurnakan pengisian klaim realisasi kinerja per triwulan dengan data yang tepat dan akurat yang disertai narasi, analisis kinerja dan data dukung yang valid sesuai Manual IK.
- Kegiatan Pra Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja sampai dengan TW IV Tahun 2024 (Desember 2024), diperoleh informasi atas hasil pemantauan evaluasi pelaporan kinerja Kemenlu secara umum pada seluruh aplikasi kinerja. Untuk pencapaian kinerja dan proyeksi pencapaian akhir tahun, BPO memperhatikan langkah-langkah optimalisasi realisasi anggaran dan strategi pencapaian target kinerja sehingga dapat mengoptimalkan capaian kinerja dan anggaran.

- Kegiatan Interkoneksi dan Sosialisasi Aplikasi Kinerja Organisasi (AKSI) Kementerian Luar Negeri (November 2024), SMKO BPO memperoleh informasi pengembangan aplikasi AKSI seperti interkoneksi data dengan monSAKTI terkait penuangan data target, realisasi volume dan anggaran di level Rincian *Output* dan Komponen, adanya fitur baru yaitu: fitur *copy paste* IK dan Manual IK, fitur penyusunan dan reviu PK, fitur penyusunan renaksi dan realisasi renaksi, serta fitur pelaporan realisasi kinerja per triwulan. Di dalam kegiatan tersebut SMKO BPO juga memperoleh pelatihan untuk pengoperasian terkait fitur-fitur baru tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas SMKO BPO dalam melaporkan realisasi dan capaian IK kedepannya.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam upaya menyempurnakan pelaporan dokumen kinerja pada aplikasi AKSI, sebagai data dukung dari lampiran LKj Tahun 2024. BPO turut aktif mengikuti kegiatan Pemutakhiran Penjenjangan Kinerja Kementerian Luar Negeri pada Aplikasi AKSI yang diselenggarakan pada Bulan November 2024. Pada aplikasi AKSI, BPO menggunakan fitur *cascading* kinerja untuk melakukan penginputan data penjenjangan kinerja bagi Unit Organisasi Eselon II. Adapun penjenjangan kinerja yang diinput merupakan upaya penyempurnaan a.l. (i) sasaran kegiatan; (ii) matriks peran hasil; (iii) rencana hasil kerja, indikator dan target masing-masing pegawai yang termuat dalam dokumen SKP.

BPO telah melakukan pemutakhiran penjenjangan kinerja Kementerian Luar Negeri pada aplikasi AKSI dimana termuat dalam dokumen Sasaran Kerja Pegawai.

Mengingat BPO berkontribusi pada pencapaian kinerja Kemenlu pada *Learning and Growth Perspective*, utamanya yang terkait dengan nilai AKIP dan RB. BPO memulai rangkaian koordinasi dengan bagian terkait untuk mengidentifikasi data dan realisasi kinerja untuk dituangkan dalam LKj. Adapun kegiatan yang diselenggarakan dalam persiapan penyusunan LKj Tahun 2024 adalah Kegiatan *Kick Off* Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2024 (Bulan Oktober dan November 2024) dan Rapat Koordinasi Penyusunan LKj BPO di Bulan November 2024.

Tujuan pelaksanaan rapat Koordinasi Penyusunan LKj BPO di Bulan November 2024 adalah pembagian tugas *Person in Charge* (PIC) sesuai dengan masing-masing bagian pengampu IK serta menyamakan persepsi terkait format dan sistematika dalam penyusunan LKj yang telah diberikan pada saat Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LKj bagi Satker Pusat dan Perwakilan RI Tahun 2024 (Bulan November) agar selaras dengan LKj Kemenlu dan LKj Sekretariat Jenderal. Dengan penyelenggaraan Rapat koordinasi tersebut, diharapkan BPO dapat menyajikan pelaporan kinerja akhir tahun yang komprehensif serta menyampaikan sesuai dengan batas waktu pelaporan kinerja untuk Tahun 2024 (18 Januari 2025).

Dalam menyusun pelaporan kinerja, BPO juga memanfaatkan teknologi berupa *drive, cloud* Kemenlu sebagai sarana *sharing* dokumen untuk mempermudah penyusunan dokumen AKIP secara bersama-sama dalam peningkatan koordinasi antar bagian.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP. Pada Bulan September 2024, BPO mengikuti kegiatan Pembahasan Pemutakhiran Penjenjangan Kinerja Kemenlu, Es I dan Penjenjangan Kinerja Unit Organisasi Es II. Dari kegiatan tersebut terdapat beberapa prinsip teknis yang perlu diperhatikan BPO dalam menyusun penjenjangan kinerja, a.l (i) dihubungkan dengan komponen perencanaan, (ii) dihubungkan dengan kinerja organisasi, (iii) dihubungkan dengan eksisiting struktur organisasi, (iv) dihubungkan dengan eksisting program/kegiatan, dan (v) dihubungkan dengan nomenklatur program/kegiatan. BPO telah menyelesaikan penjejangan kinerja beserta identifikasi *crosscutting* kinerja antar unit organisasi maupun antar instansi.

Selain itu sebagai evaluasi akuntabilitas kinerja internal, BPO juga mengadakan Rapat DKO secara (triwulanan) di Bulan Januari, Juli, September, November 2024 dan Awal Tahun 2025. Di dalam rapat DKO tersebut dilakukan pembahasan secara mendalam yang mencakup seluruh komponen evaluasi yang terdiri dari perencanaan kinerja (target yang telah ditetapkan), pengukuran kinerja triwulanan dengan memperhatikan *progress* kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai target yang ditetapkan serta arahan dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai tindak lanjut evaluasi dari realisasi/progres kegiatan yang dilaksanakan.

BPO melakukan rapat DKO secara (triwulanan) dengan pembahasan yang mencakup evaluasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, progres kegiatan dan arahan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai tindak lanjut evaluasi dan realisasi kegiatan kedepannya.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal tidak hanya dilakukan dengan rapat DKO saja, melainkan juga adanya aktifitas pemantauan pengisian realisasi kinerja baik di aplikasi Monev nasional: SAKTI (Kemenkeu), e-Monev (Bappenas), e-kinerja BKN maupun aplikasi Monev internal: aplikasi AKSI Kemenlu serta Realisasi Rencana Aksi, Laporan Kinerja Tahunan dan Matriks Informasi Kinerja secara tepat terhadap target yang ditetapkan.

Kendala dan Tantangan

Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pengimplementasian SAKIP di Lingkungan BPO adalah:

1. Adanya perubahan pada peraturan di tingkat nasional yang berakibat tingginya perubahan kebijakan di level pimpinan Es. I, sehingga berakibat pula pada tingginya revisi dokumen perencanaan di BPO selaku Unit Organisasi Es. II.
2. Adanya fitur-fitur baru pada aplikasi kinerja serta perubahan salah satu kalkulasi IK sebagai implementasi perubahan peraturan di tingkat nasional.
3. Intensitas mutasi pegawai yang tinggi menjadi tantangan dalam melakukan proses *transfer knowledge* dari pejabat lama ke pejabat baru.
4. Adanya gangguan pada server dan aplikasi internal, sehingga menghambat proses pengelolaan kinerja di BPO.
5. Penjadwalan ulang DKO dikarenakan kesibukan masing-masing bagian.
6. Masih belum tercapainya target kinerja triwulanan yang ditetapkan dikarenakan adanya urgensi isu *pop up* yang harus diselesaikan dan kurangnya *reminder* terkait target serta batas waktu input klaim realisasi kinerja per triwulan.

Upaya Perbaikan

Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh BPO dalam mengatasi kendala dan tantangan dalam rangka pengimplementasian SAKIP di Lingkungan BPO:

1. Cepat tanggap dan adaptif mengikuti perkembangan perubahan peraturan serta melakukan rapat koordinasi yang berkesinambungan untuk *update* tindak lanjut perubahan kebijakan Eselon I.
2. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan/sosialisasi/bimtek terkait fitur-fitur baru pada aplikasi kinerja serta cepat dalam menyesuaikan dan mengikuti perubahan kalkulasi pada salah satu indikator kinerja yang berdampak pada capaian kinerja.
3. Melakukan penyimpanan data secara rapi (membuat folder) dengan pemberian judul penyimpanan yang mudah dipahami serta data-data yang lengkap dan informatif.
4. Membuat *file back up* secara manual di masing-masing perangkat pengolah data individu untuk mengantisipasi kehilangan data pada saat gangguan pada server internal dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemegang desk pusat terkait gangguan pada aplikasi internal.
5. Penjadwalan di awal dan penyesuaian ketersediaan jadwal Karo PO dengan masing-masing bagian dalam pelaksanaan DKO.
6. Membagi tim kerja dalam penyelesaian isu *pop up* dan tugas pokok dalam pencapaian target kinerja serta membuat *reminder* terkait target serta batas waktu input klaim realisasi kinerja per triwulan dan membuat laporan kinerja secara berkala (triwulanan) sebagai evaluasi realisasi target pada periode sebelumnya.

Proyeksi Kedepan

Dalam menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Kerja Tahun 2025. BPO akan merujuk kepada Dokumen Kinerja dan Kerja Sekretariat Jenderal, serta melakukan analisis penetapan IK selama 5 tahun Renstra (2020-2024) yang tertuang di dalam Laporan Kinerja BPO guna perubahan/penyempurnaan IK di Tahun 2025, mengingat Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode RPJMN 2025-2029.

Sampai LKj ini dibuat, Kemenlu telah menyampaikan masukan terkait Program, Kegiatan dan *Output* Prioritas RPJMN 2025-2029 yang diampu ke Bappenas. Setelah RPJMN 2025-2029 ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006, seluruh unit kerja di lingkungan Kemenlu akan melakukan proses penyesuaian dokumen perencanaan yang meliputi Renstra, Renja, PK, Manual IK dan Renaksi tidak terkecuali BPO di level Es. II.

Dokumentasi

Gambar III.45. Dialog Kinerja Organisasi BPO Triwulan I Tahun 2024 (Jakarta, 2 Januari 2024)

Gambar III.46. Dialog Kinerja Organisasi BPO Triwulan II Tahun 2024 (Jakarta, 2 Juli 2024).

Gambar III.47. Keikutsertaan BPO dalam Kegiatan Penyusunan Muatan Informasi Kinerja dan Anggaran dalam KRISNA RENSTRA 2025-2029 (Depok, 12-14 September 2024).

Gambar III.48. Dialog Kinerja Organisasi BPO Triwulan III Tahun 2024 (Jakarta, 17 September 2024).

Gambar III.49. Keikutsertaan BPO dalam Kegiatan Sosialisasi Aplikasi AKSI Kementerian Luar Negeri hasil pengembangan Interkoneksi aplikasi AKSI dengan MONSAKTI (Jakarta, 6-8 November 2024).

Gambar III.50. Dialog Kinerja Organisasi BPO Triwulan IV Tahun 2024 (Jakarta, 12 November 2024).

Gambar III.51 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) Tahun 2024 (Depok, 22 November 2024).

Gambar III.52. Keikutsertaan BPO dalam Kegiatan Pembahasan Pemutakhiran Penjenjangan Kinerja Kemenlu, Es I dan Penjenjangan Kinerja Satuan Kerja Es II (Jakarta, 25-26 dan 28 November 2024).

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

memberikan penghargaan kepada:

Biro Perencanaan dan Organisasi

sebagai Peringkat Ketiga
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon II Kementerian Luar Negeri Tahun 2023/2024
dengan Nilai "80,25" (Kategori A)

Jakarta, 10 September 2024
Menteri Luar Negeri,

Retno L.P. Marsudi

Gambar III.53. Penghargaan Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai Peringkat Ketiga Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja Eselon II Kementerian Luar Negeri Tahun 2023/2024 dengan Nilai 80,25 dan Kategori A (Jakarta, 10 September 2024).

Gambar III.54. Keikutsertaan BPO dalam Kegiatan Pra Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Sampai Dengan Triwulan (TW) IV TA 2024 (Depok, 9-12 Desember 2024)1

Gambar III.55. Dialog Kinerja Organisasi BPO Awal Tahun 2025 (Jakarta, 7 Januari 2025).

Sasaran Kegiatan (L2) Pengelolaan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi yang Optimal dan Akuntabel

Keberadaan infrastruktur diplomasi yang kuat, salah satunya ditopang oleh pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel. Pengelolaan anggaran meliputi pengelolaan dimulai dari penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangan. Dalam hal ini, BPO telah berusaha untuk mengelola anggaran secara optimal yang dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran Kegiatan L2 diukur berdasarkan capaian pada 1 (satu) IK L2.1: Persentase Realisasi Anggaran BPO

Analisis IK L2.1

Persentase Realisasi Anggaran BPO

Pagu dan Realisasi Anggaran Dalam 5 Tahun

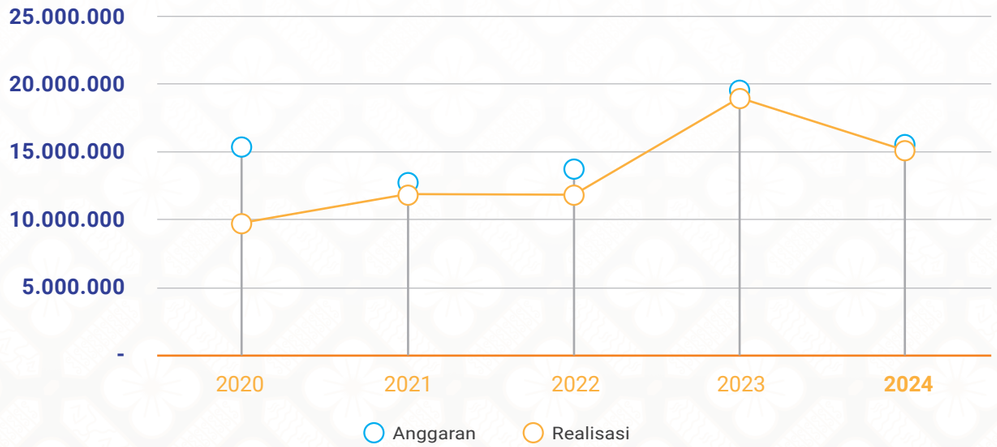

Sumber : Satu DJA Kemenkeu

Deskripsi IK

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Pencapaian IK.L2.1 Persentase Realisasi Anggaran BPO didapat dari seluruh pertanggungjawaban dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DIPA BPO yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN), Kemenkeu selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibuat oleh BPO untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA BPO. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat serta disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2024 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024.

Persentase Realisasi Anggaran BPO didapat dari seluruh pertanggungjawaban dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DIPA BPO yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negera (KPPN), Kemenkeu selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

Informasi Kinerja

Tabel III.38. Capaian IK L2.1 Persentase Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Realisasi Anggaran BPO	Hasil Persentase Realiasi Anggaran BPO	100 %

Realisasi	Target	Capaian
100 %	95 %	105,26 %

Sumber: AKSI

Pada tahun 2024, realisasi IK L2.1 Persentase Realisasi Anggaran BPO tercatat sebesar 100 %, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 95 %. Dengan demikian, capaian IK L2.1 mencapai 105,26%.

Realisasi IK L2 diperoleh melalui anggaran yang digunakan dibagi alokasi anggaran final dikali 100 persen. Bagian anggaran dari DIPA Sekretariat Jenderal (WA.6015 Pengelolaan Organisasi) yang dikelola oleh Satker BPO pada tahun 2014 sebesar Rp15.522.702.000 terdiri dari 2 KRO yaitu: EBA (layanan dukungan manajemen internal) dan EBD (layanan manajemen kinerja internal). Di Tahun 2024, Jumlah realisasi DIPA BPO sebesar Rp15.522.690.520 atau sebesar 100 % dari jumlah pagu anggaran di kegiatan WA. 6015 “Pengelolaan Organisasi”.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.39. Target, Realisasi, dan Capaian IK L2. 1 Persentase Realisasi Anggaran BPO

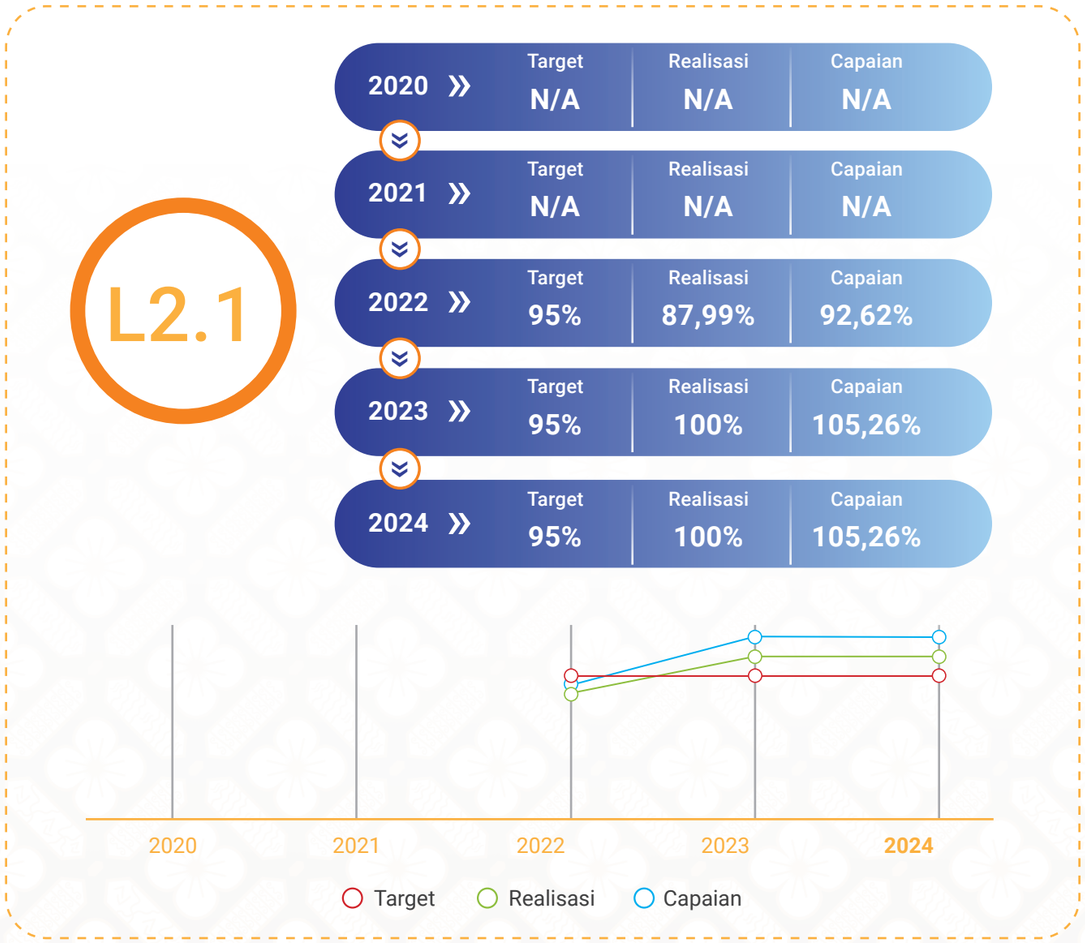

Berdasarkan target tabel di atas, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut target IK L2.1 memiliki target yang sama yaitu 95%, hal tersebut dikarenakan penerapan tren penetapan target selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan nantinya di Tahun 2025 akan dilakukan perubahan target dengan mempertimbangkan realisasi di Tahun 2022-2024.

Realisasi IK mengalami peningkatan yang diukur dari nilai sisa anggaran/UP/TUP yang dikelola oleh BPO pada akhir tahun 2024 yaitu Rp11.480 dari Rp29.337 pada tahun 2023. Peningkatan realisasi antara lain disebabkan oleh meningkatnya pelaksanaan kegiatan pada bagian-bagian, penguatan koordinasi dan komunikasi antar bagian dengan pengelola keuangan, serta penyusunan rencana yang lebih terstruktur di tahun 2024.

Indikator kinerja L2 Persentase Realisasi Anggaran BPO ditetapkan sejak tahun 2022, sehingga untuk target akhir Renstra Tahun 2024 tidak ada.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Capaian realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi yang tinggi merupakan salah satu indikasi kinerja BPO yang baik, yakni anggaran yang disusun telah melalui proses perencanaan yang cukup baik dengan tetap menjaga kebutuhan terhadap perubahan kegiatan sesuai arahan Pimpinan.

Pencapaian realisasi kinerja BPO didukung oleh realisasi yang tinggi, dengan tetap menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan hal ini tercermin dari terealisasinya seluruh target kinerja di BPO. BPO secara terus melakukan upaya-upaya dalam kegiatan untuk mendukung program di Sekretariat Jenderal berjalan dengan baik, akuntabel dan optimal.

Pencapaian realisasi kinerja BPO didukung oleh realisasi yang tinggi, dengan tetap menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan hal ini tercermin dari terealisasinya seluruh target kinerja di BPO.

Tingginya capaian realisasi anggaran pada tahun 2024 di BPO didukung oleh sistem pengelolaan kegiatan dan anggaran yang sudah baik. Hal ini terlihat dari mekanisme penunjukkan *Person in Charge* (PIC) keuangan pada bagian di BPO yang membantu dalam menyusun, menerjemahkan dan mengkomunikasikan kebutuhan anggaran secara khusus kepada pengelola keuangan. Pola evaluasi terhadap kegiatan, kinerja dan anggaran dilakukan secara rutin yaitu per 3 bulan dengan mekanisme Dialog Kinerja Organisasi (DKO) BPO yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi sehingga arahan terhadap pencapaian target menjadi jelas dan konkrit. Kedua hal ini terbukti mampu mendorong dan menjaga capaian realisasi anggaran dengan hasil realisasi kinerja yang sangat baik.

Selain itu, kunci penting dalam penyerapan anggaran adalah penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang mencerminkan kondisi riil yang selanjutnya RAB digunakan dalam penyesuaian anggaran melalui revisi anggaran. Semakin detil dan pasti RAB yang disusun maka pertanggungjawaban keuangan akan menjadi lebih baik. Maka dari itu peran PIC keuangan pada bagian menjadi penting karena harus dapat menerjemahkan kegiatan dalam bentuk usulan anggaran, waktu dan kesesuaian pembebanan.

Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang riil merupakan kunci penting dalam penyerapan anggaran yang selanjutnya dapat digunakan untuk penyesuaian anggaran melalui revisi anggaran.

Analisis Kegiatan yang Mendukung Capaian

Sejumlah kegiatan strategis telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Dan Organisasi sepanjang tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan dukungan kegiatan pada unit Sekretariat Jenderal seperti penyusunan *Grand Design* Diplomasi Ekonomi, Postur Diplomasi, Bimbingan Tenis dan evaluasi anggaran terhadap pelaksanaan fasilitas sewa rumah di Perwakilan RI, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat Kemenlu dan lain sebagainya. Dalam rangka merealisasikan IK tingkat realisasi anggaran, berikut beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Dan Organisasi pada tahun 2024:

1. Evaluasi anggaran melalui DKO yang dilaksanakan selama 3 kali;
2. Pelaksanaan revisi anggaran sebanyak 13 kali;
3. Penyusunan RAB Triwulanan sebanyak 4 kali;
4. Pembaharuan RAB bulanan oleh setiap bagian sebanyak 10 kali;
5. Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) sebanyak 37, mekanisme pembayaran langsung (LS) sebanyak 14 dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 1 kali.

Kendala dan Tantangan

Meskipun Biro Perencanaan Dan Organisasi berhasil mencapai target IK L2.1 pada tahun 2024, bahwa masih terdapat beberapa kendala dan tantangan antara lain :

1. Adanya kebutuhan penyesuaian kegiatan sesuai arahan Pimpinan,
2. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa
3. Penghematan/*self blokir* anggaran perjalanan dinas di bulan Desember tahun 2024
4. Kekosongan jabatan Eselon III dimana posisi ini menentukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Upaya Perbaikan

Biro Perencanaan Dan Organisasi telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam mengurangi dampak kendala dan tantangan yang ada sehingga IK dapat tetap tercapai, upaya tersebut antara lain :

1. Memberikan data serapan anggaran per 3 (tiga) bulan kepada Kepala Biro sebagai bahan evaluasi dalam DKO BPO;
2. Menyusun rencana kegiatan beserta RAB per triwulan dengan pembaharuan dilakukan setiap awal bulan;
3. Menyusun revisi anggaran setiap bulan atas dasar usulan kegiatan dan RAB kegiatan dari masing-masing bagian;
4. Melakukan diskusi usulan kegiatan antara pengelola keuangan dengan PIC termasuk pemillihan pengadaan barang dan jasa;
5. Mengisi kekosongan jabatan pada level eselon III dengan pejabat sementara;
6. Peningkatan kapabilitas pengelola sesuai ketentuan dengan mengikuti pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Bendahara Pengeluaran (BP) tersertifikasi.

Proyeksi Kedepan

Kedepannya BPO tetap konsisten menunjuk pengelola keuangan dari staf BPO yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan keuangan, mengetahui struktur anggaran, pola dan jenis kegiatan BPO.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dengan sangat baik adalah pemilihan PIC bagian karena menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran, oleh karenanya penugasan staf sebagai PIC oleh Kepala Bagian perlu mendapat perhatian khusus.

Evaluasi dan proyeksi kegiatan dalam skema DKO BPO sangat membantu dalam mengendalikan dalam pencapaian kinerja realisasi anggaran BPO.

Realisasi Anggaran

Sepanjang tahun 2024, telah dilakukan 13 (tiga belas) kali revisi pagu anggaran yang disebabkan oleh adanya penyesuaian pagu anggaran baik karena perubahan prioritas maupun karena adanya kebijakan blokir anggaran di akhir tahun. Berdasarkan DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2024 No. SP DIPA-011.01.1.403247/2024 tanggal 24 November 2023. Pagu anggaran Sekretariat Jenderal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.671.102.856.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan anggaran yang dikelola (WA.6015) BPO pada tahun 2024 sebesar Rp15.522.702.000,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Tabel III.40. Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2024 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Sumber Dana
Belanja Barang	15.522.702.000,00	15.522.690.520,00	100	RM
Total	**15.522.702.000,00**	**15.522.690.520,00**		**100%**

Sumber: Sakti- Realisasi F-16 detail SP2D

BPO berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2024 dengan realisasi mencapai 100% atau sebesar Rp15.522.690.520,00 (Aplikasi SAKTI). Persentase capaian ini sama dengan tahun sebelumnya, dengan pembeda sisa anggaran tahun 2023 sebesar Rp29.337,00, sedangkan sisa anggaran 2024 Rp11.480.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

BPO berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya melalui tiga pilar utama: pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan transparan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja, serta optimalisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

Dalam rangka reformasi birokrasi, BPO berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui tiga pilar utama: pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan transparan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja, serta optimalisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan efektivitas, sehingga setiap alokasi dana memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus strategis melalui pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan kemampuan digitalisasi, serta pembinaan kepemimpinan. Sementara itu, sarana dan prasarana didesain untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan inovatif.

Melalui langkah-langkah tersebut, BPO tidak hanya bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*), tetapi juga memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal. Efisiensi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung pencapaian target strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Beberapa kegiatan BPO yang dilakukan dalam langkah efisiensi sumber daya dengan tujuan peningkatan pengelolaan anggaran antara lain:

1. Bimbingan teknis penyusunan dan penelitian RKA-KL tahun 2025, bersama Inspektorat Jenderal dengan peserta seluruh satker Pusat dan Perwakilan yang dilakukan secara luring dan daring.
2. Bimbingan teknis dan monitoring evaluasi kinerja dan anggaran, bersama Inspektorat Jenderal, Biro Umum dan Biro Keuangan dengan peserta seluruh satker Pusat dan Perwakilan yang dilakukan secara *luring* dan *daring*.

Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi anggaran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai seberapa efektif BPO dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja yang terukur. Tingkat efisiensi digambarkan dalam kuadran yang mengelompokkan capaian kinerja dan serapan anggaran sebagai berikut:

Kuadran Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Penilaian kriteria tinggi rendahnya capaian kinerja dan anggaran per triwulan didasarkan pada batasan angka/persentase sebagai berikut:

Kriteria Tinggi Rendahnya Capaian Kinerja dan Anggaran per Triwulan

	Rendah	Tinggi
TW I	Di Bawah 25%	Di Atas 25%
TW II	Di Bawah 50%	Di Atas 50%
TW III	Di Bawah 75%	Di Atas 75%
TW IV	Di Bawah 90%	Di Atas 90%

Berdasarkan Renja BPO TA 2024 dan metode pengelolaan anggaran berbasis kinerja, BPO menetapkan 5 (lima) Rincian *Output* untuk mendukung 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja. Capaian kinerja BPO pada tahun 2024 telah didukung oleh serapan anggaran sebesar 100%. Rincian anggaran per RO dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.41. Pagu dan Realisasi Anggaran Rincian *Output* atas Indikator Kinerja yang Didukung

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (IK)	Capaian IK	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Tata Kelola Organisasi Kementerian Luar Negeri yang Baik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri	81,55	Layanan Reformasi Kinerja	**1.078.091.000**	**1.078.089.253**	**100,00**
			Layanan Reformasi Kinerja	1.078.091.000	1.078.089.253	100,00
			Evaluasi RB tahun 2023 dan Perencanaan Program RB tahun 2024, Rapat Koordinasi dan Evaluasi kematangan data sektoral, Rapat Koordinasi dan Evaluasi Nilai Pelayanan Publik RB, Koordinasi pelaksanaan RB tahun 2024, Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2024			
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerimtah (AKIP) Kementerian Luar Negeri	80,86	Bimtek Persiapan Pelaksanaan PM Maturitas SPIP Terintegrasi 2023/2024, Koordinasi Pelaksanaan PM Maturitas SPIP Terintegrasi 2023/2024, Bimtek Pelaksanaan SPIP-MR Pusat dan Perwakilan, Evaluasi hasil pelaksanaan PM Maturitas SPIP Terintegrasi 2023/2024, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP-MR Pusat dan Perwakilan			
			Evaluasi SOP Mikro unit kerja Pusat dan Perwakilan			
	Tingkat Maturitas SPIP	3,86	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	**9.467.539.000**	**9.467.534.917**	**100,00**
Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi yang Prima Tata Kelola Organisasi Sekretariat Jenderal yang Baik	Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Jenderal	3,43 81,05	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9.467.539.000	9.467.534.917	100,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Kementerian Luar Negeri Pusat dan Perwakilan RI Bimtek Perencanaan Kinerja dan Anggaran Kementerian Luar Negeri Pusat dan Perwakilan RI			
			Penyusunan Penganggaran Kementerian dan Perwakilan			
			Penyusunan Standar Biaya Kementerian dan Perwakilan			
Manajemen Kinerja dan Anggaran yang Berkualitas	Jumlah Unit Organisasi Eselon I dan Perwakilan RI yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat minimal "SANGAT BAIK" (BB)	139	Bimtek Penyusunan RKA-K/L Perwakilan RI TA 2025 melalui *Video Conference*			
			Penyusunan Besaran ADTLN			
	Persentase alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri yang memiliki catatan blokir pada halaman IV DIPA	1,29%	Penyusunan *Grand Design* Diplomasi Ekonomi			
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	**1.986.271.000**	**1.986.269.234**	**100,00**
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.986.271.000	1.986.269.234	100,00
	Nilai Revisi Anggaran Satker Kementerian dan Perwakilan RI	93,9%	Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kemenlu dan Pewakilan RI			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (IK)	Capaian IK	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Hasil Analisis terkait Organisasi yang Optimal	Persentase Analisis terkait Organisasi yang dimanfaatkan	100%	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kemenlu Yang Terkait Pelaksanaaan Instruksi/Peraturan Presiden			
			Penyusunan Laporan Kinerja Kemenlu			
Tata Kelola Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Perencaaan dan Organisasi	80,25	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	**2.990.801.000**	**2.990.797.116**	**100,00**
			Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.990.801.000	2.990.797.116	100,00
			Penguatan Kelembagaan Kementerian RI			
Pengelolaan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi yang Optimal dan Akuntabel	Persentase realisasi anggaran BPO	100%	Penguatan Kelembagaan Perwakilan RI termasuk Indeksasi Perwakilan			
			Layanan Rumah Tangga Biro			
NCKO 2024		**106,25**	**TOTAL**	**15.522.702.000**	**15.522.690.520**	**100,00**

Di Tahun 2024, BPO menetapkan 5 (lima) Rincian Output untuk mendukung 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja dan anggaran BPO telah mencapai lebih dari 90%, sehingga BPO berada pada **Kuadran I atau Efisiensi Kinerja Anggaran telah Mencapai Kuadran Ideal**. Hal ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja.

Faktor-faktor utama yang mendukung tercapainya efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal yang dikelola oleh BPO antara lain adalah:

1. Optimalisasi Penggunaan Anggaran untuk Berbagai Kegiatan

Pengelolaan anggaran dilakukan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan strategis yang terkoordinasi dengan baik. BPO dapat melaksanakan seluruh rencana kegiatan rutin maupun instruksi Pimpinan berupa kegiatan-kegiatan prioritas, antara lain:

a. kegiatan rutin yang telah ditetapkan awal tahun antara lain:
- Penguatan kelembagaan Perwakilan dan Kementerian;
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Kementerian Luar Negeri Pusat dan Perwakilan RI
- Bimtek Perencanaan Kinerja dan Anggaran Kementerian Luar Negeri Pusat dan Perwakilan RI;
- Penyusunan Penganggaran Kementerian dan Perwakilan;
- Optimalisasi Infrastruktur Diplomasi Kementerian Luar Negeri;
- Bimtek Penyusunan RKA-K/L Perwakilan RI TA 2025 melalui *Video Conference*;
- Penyusunan *Grand Design* Diplomasi Ekonomi;
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kemenlu dan Pewakilan RI;
- Penyusunan Laporan Kinerja Kemenlu;
- Penyusunan, Pelaksanaan dan Evaluasi RB Kemenlu;
- Penyusunan dan Evaluasi SPIP;
- Penguatan RB Kemenlu Tahun 2024.

b. Kegiatan instruksi Pimpinan berupa kegiatan prioritas yang mendapat perhatian khusus antara lain:
- Penyusunan postur diplomasi;
- Bimtek dan evaluasi pelaksanaan Fasilitas Sewa Rumah (FSR);
- Evaluasi dan pemantauan infrastruktur diplomasi;
- Pelaksanaan koordinasi evaluasi reformasi birokrasi tingkat Kementerian.

Kegiatan diatas mendukung pencapaian KRO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (WA.6015.EBA) dan KRO (WA.6015.EBD) Layanan Manajemen Kinerja Internal yang berkontribusi pada pencapaian IK seperti Indeks Kepuasan Layanan BPO, Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal, dan Jumlah Unit Organisasi Eselon I serta Perwakilan RI yang memperoleh nilai AKIP dengan predikat minimal "SANGAT BAIK" (BB). Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan ekonomis, BPO mampu mendukung mencapai tujuan strategis pada level Eselon I/Sekretariat Jenderal dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh BPO.

2. Koordinasi dan Sinergi Antar Bagian

Efisiensi dalam setiap tahap pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan berhasil dicapai melalui koordinasi yang kuat di antara seluruh pegawai BPO. Komitmen yang tinggi dari Kepala Biro untuk bekerja secara terintegrasi menghasilkan sinergi yang optimal, memungkinkan pencapaian target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi lintas Bagian dalam merancang kegiatan strategis menciptakan peluang untuk inovasi, meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan dan anggaran, serta memaksimalkan *outcome*/dampak dari setiap alokasi anggaran.

Dengan langkah-langkah tersebut, BPO berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Upaya ini diharapkan tidak hanya mampu mendukung pencapaian target kinerja yang lebih optimal, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan oleh BPO kepada seluruh Unit Organisasi di Kementerian Luar Negeri secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam penyusunan, perencanaan dan pertanggungjawaban DIPA BPO. Melalui pengelolaan yang bertanggung jawab, BPO dapat memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang maksimal, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesesuaian ketentuan serta peraturan perundangan-undangan.

Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Output

Kementerian Keuangan melalui PMK No. 113 Tahun 2023 telah menetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk Tahun Anggaran 2024, terdiri dari Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK). Standar ini bertujuan untuk memberikan acuan biaya yang jelas dan terukur dalam menghasilkan setiap satuan volume keluaran. Dengan adanya SBK, anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara lebih efisien karena sudah didasarkan pada kebutuhan yang telah distandardisasi, sehingga mencegah pemborosan dan memastikan setiap anggaran berkontribusi langsung terhadap pencapaian *output*. Sesuai dengan aturan tersebut, pengukuran efisiensi anggaran dalam pencapaian *output* diformulasikan dengan RO/*output* yang ditagging dengan SBKU maupun SBKK yang telah ditetapkan.

Tabel III.42. Monitoring Efisiensi SBK untuk RO yang Dikelola oleh BPO

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9/11	13 = 8-12	14= 13/8	15	16
1.	01 Sekretariat Jendral	403247 Kantor Pusat Sekretariat Jendral Kementrian Luar Negeri	WA Program Dukungan Manajemen	6015.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	1.986.269.234	1.390,00	1.408,00	1.410.702	238.589.298	99	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
2.	01 Sekretariat Jendral	403247 Kantor Pusat Sekretariat Jendral Kementrian Luar Negeri	WA Program Dukungan Manajemen	6015.EBD.961 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Layanan Penyusunan LAKIN untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker 20 s.d 40 satker	551.000.000	1.078.089.253	310,00	310,00	3.477.707	547.522.293	99	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Sumber: Monev Kemenkeu TA 2024

Berdasarkan data monitoring efisiensi SBK yang dikelola oleh BPO, terdapat 2 (dua) RO yang telah *ditagging* dengan SBKU, yaitu Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Layanan Reformasi Kinerja. Kedua RO ini berhasil mencapai tingkat efisiensi per RO sebesar 99%, di mana realisasi anggaran secara konsisten lebih rendah dibandingkan indeks SBKU yang telah ditetapkan. Hasil ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang hemat sumber daya namun tetap menjaga kualitas layanan. Efisiensi yang dipertimbangkan maksimal hingga 20% dalam penghitungan nilai efisiensi per RO ini menjadi indikator penting dari implementasi penganggaran berbasis kinerja yang optimal dan akuntabel, sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan.

Kementerian Keuangan melalui PMK No. 113 Tahun 2023 telah menetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk Tahun Anggaran 2024, terdiri dari Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK).

Efisiensi Sumber Daya Manusia

Untuk mendorong efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dalam pencapaian kinerja, Biro Perencanaan dan Organisasi telah menyempurnakan penjabaran kinerja yang menggambarkan kerangka logis pencapaian target hingga ke level individu. Penjabaran ini dituangkan dalam pembagian peran hasil bagi setiap pegawai, yang menjadi acuan dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan, Biro Perencanaan dan Organisasi juga fokus pada pengelolaan sumber daya manusia yang efisien. Langkah-langkah strategis telah diambil untuk mendukung tujuan organisasi diantaranya sebagai berikut :

1. Penempatan Pegawai yang Tepat

Memastikan pegawai ditempatkan sesuai kebutuhan Biro Perencanaan dan Organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi dan latar belakang pendidikan dan pelatihan/ sertifikasi pegawai agar sesuai dengan tugas yang diemban.

2. Penyederhanaan Birokrasi

Mengkaji ulang struktur organisasi untuk memastikan bahwa setiap jabatan memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih fungsi.

3. Pelatihan dan Sertifikasi

Menyelenggarakan dan mendorong pegawai di Biro Perencanaan dan Organisasi untuk mengikuti pelatihan maupun pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Melaksanakan Dialog Kinerja secara berkala terhadap kinerja pegawai, untuk memberikan umpan balik dan mengidentifikasi potensi pengembangan.

Tabel III.43. Pemenuhan Formasi Pegawai Berdasarkan Kebutuhan Organisasi

Biro Perencanaan dan Organisasi	Kebutuhan	Pemenuhan
Kepala Biro	1	1
Kepala Bagian	5	5
Kepala Subbagian	15	10
Analis Anggaran Madya	1	0
Analis Anggaran Muda	5	0
Analis Anggaran Pertama	9	0
Analis SDM Aparatur Madya	2	0
Analis SDM Aparatur Muda	3	0
Analis SDM Aparatur Pertama	7	1
Arsiparis Mahir	1	0
Arsiparis Muda	1	1
Arsiparis Penyelia	2	1

Biro Perencanaan dan Organisasi	Kebutuhan	Pemenuhan
Arsiparis Pertama	1	1
Diplomat Madya	1	1
Diplomat Muda	6	2
Diplomat Pertama	10	2
Penata Kanselerai Madya	20	0
Penata Kanselerai Muda	26	13
Penata Kanselerai Pertama	20	5
Penelaah Teknis Kebijakan	10	10
Perencana Madya	4	0
Perencana Muda	12	0
Perencana Pertama	18	17
Pranata Komputer Pertama	1	0
Total	**181**	**70**

Sumber: Duk.kemlu.go.id dan Permenlu No.3 Tahun 2024

Berdasarkan Permenlu No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permenlu No 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Organisasi didukung oleh komposisi formasi kepegawaian sejumlah 181 orang pegawai. Adapun *bezzeting* kepegawaian di akhir tahun 2024 berdasarkan data yang diambil dari Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) adalah sebanyak 70 orang pegawai. Selain itu, Biro Perencanaan dan Organisasi juga didukung oleh sebanyak 7 orang PPNPN. Selama tahun 2024, dengan kondisi *bezzeting* pegawai yang belum memenuhi jumlah formasi, Biro Perencanaan dan Organisasi tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal, efisien dan produktif.

Melalui langkah-langkah ini, Biro Perencanaan dan Organisasi berusaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi pegawai untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia yang efisien diharapkan dapat meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel.

Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Penggunaan sarana dan prasarana Biro Perencanaan dan Organisasi terkait erat dengan penerapan *good governance* dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Biro Perencanaan dan Organisasi telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yang akuntabel dan produktif. Proses pengadaan dan penghapusan BMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang usulannya dilakukan melalui Biro Umum. Selain itu, Biro Perencanaan dan Organisasi juga melakukan pengusulan pemeliharaan secara berkala terhadap BMN seperti kendaraan operasional dan fasilitas perkantoran lainnya.

Biro Perencanaan dan Organisasi menerima BMN pada tahun 2024 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, yaitu sebagai berikut.

Tabel III.44. Penerimaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024

NO.	Nama Barang	Tipe	Jumlah Barang		Tanggal Penerimaan BMN	No BAST
1.	PC UNIT	Acer Veriton Z4 AIO + Microsoft Office standar 2021	10	unit	23 Januari 2024	BA/00173/PL/01/2024/26
2.	Laptop	Acer UN 3481 + Microsoft Office standar 2021	5	unit	23 Januari 2024	BA/00173/PL/01/2024/26
3.	Laptop	Microsoft Surface Pro 9-12 Core5 8gb	1	unit	30 Januari 2024	BA/00240/PL/02/2024/26
4.	Keyboard	Signature Keyboard with Slim Pen 2	1	unit	30 Januari 2024	BA/00240/PL/02/2024/26
5.	Software	Microsoft Office 2019	1	unit	30 Januari 2024	BA/00240/PL/02/2024/26
6.	PC UNIT	Acer Veriton Z4 AIO + Microsoft Office standar 2021	1	unit	1 Maret 2024	BA/00471/PL/03/2024/26
7.	Alat Vicon	Logitech MSIP-REM-DZL (V-U0032-V-U0033	2	unit	2 September 2024	BA/PL/09/2024/26
8.	Air Purifier	Blue Air - DustMagnet	4	unit	2 September 2024	BA/PL/09/2024/26
9.	PC UNIT	Acer Veriton AIO Core i7-12700 + Microsoft Office standar 2021	5	unit	1 Oktober 2024	BA/01822/PL/10/2024/26
10.	Laptop	Acer Travelmate P214 + Microsoft Office standar 2021	2	unit	1 Oktober 2024	BA/01822/PL/10/2024/26
11.	Printer	HP Color Laser 150nw	1	unit	1 Oktober 2024	BA/01671/PL/10/2024/26
.	**Total**		**33**	**unit**		

Sumber: Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara BPO

Kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang akuntabel dan produktif menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam Program dan Sasaran Strategis selama tahun 2024. Dengan demikian, pengelolaan BMN yang efektif dan efisien telah mendukung pencapaian tujuan organisasi serta optimalisasi penggunaan sumber daya.

Capaian Kinerja Lainnya

RB Tematik

Seperti yang dijelaskan pada IK S1.1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri pada Sasaran Kegiatan S1 Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang baik di bab sebelumnya. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan dimana isu strategis RB yang akan dihadapi adalah Isu Hulu terkait tata kelola pemerintahan dan Isu Hilir terkait agenda prioritas Pembangunan Nasional. Dengan demikian, *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut *double track*, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan **RB General**, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut **RB Tematik**.

Pada Sasaran Kegiatan S1 Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang baik di bab sebelumnya telah dijelaskan secara detail terkait RB General, sedangkan untuk RB Tematik sendiri memiliki penguatan 4 (empat) isu tematik di Tahun 2023 yaitu 1). Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Stunting; 2) Peningkatan Realisasi Investasi; 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan; 4) Kebijakan Aktual Presiden (Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi)

1. Optimalisasi Penggunaan Anggaran untuk Berbagai Kegiatan

Penguatan rekomendasi kebijakan implementasi *Sustainable Development Goal's* (SDG's) pada isu pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting Tahun 2023

No.	Forum Pertemuan	Prakarsa/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
Tahun 2023			
1.	*High Level Meeting on the Midterm Review of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030 di New York, AS, 18-19 Mei 2023	Membahas upaya mempercepat implementasi SDGs melalui *strategic foresight.*	Hasil pembahasan menjadi salah satu acuan dalam upaya penajaman dan penyempurnaan pelaksanaan Perpres 87/2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, khususnya terkait upaya mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana.
2.	Sidang Komisi ESCAP ke-79 Bangkok, Thailand, 14-21 Mei 2023.	Indonesia berkomitmen kuat dalam mencapai SDGs dan telah mengadopsi berbagai inisiatif holistik untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk pembangunan ekonomi hijau, pengurangan GRK, kebijakan rendah karbon, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan siap berkolaborasi dalam mencapai Agenda Pembangunan 2030.	Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia tahun 2023 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.
3.	Pertemuan ECOSOC *High-Level Political* Forum dan *HighLevel Segment* tahun 2023 di New York 10-20 Juli 2023	Dalam pertemuan, Indonesia menggarisbawahi 3 (tiga) pesan utama dari *Coordination Segment of ECOSOC* yang dipimpin Indonesia, yaitu pentingnya *interlinkages, self-evaluation*, dan *concreteness* dalam rangka aksi mencapai agenda 2030 dan SDGs.	Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia tahun 2023 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.
4.	Pertemuan *High Level Week* Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, tanggal 14 – 29 September 2023.	Indonesia dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa salah satu upayanya mempercepat pencapaian SDGs adalah dengan melokalisasi SDGs dari tingkat nasional hingga ke tingkat desa. Selain itu Indonesia juga senantiasa mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan untuk akselerasi SDGs.	Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

No.	Forum Pertemuan	Prakarsa/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
5.	*the 7th ASEAN Ministerial Meeting on Sports* (AMMS-7) dan 14th SOMS, di Chiang Mai, Thailand, 27 Agustus-2 September 2023	Menyepakati pelaksanaan kegiatan pilot project yang akan diselenggarakan di Indonesia yaitu *ASEAN Football4SDGS* dan A*ctivating the ASEAN Declaration on Leveraging the Role of Sports in ASEAN Community-Building and Achieveing SDGs*	Pelaksanaan proyek ASEAN Football4SDGS di Indonesia hasil kerja sama antara ASEAN dengan *Japan-ASEAN Integration Fund* (JAIF), yang dijadwalkan akan selesai pada Oktober 2025
6.	*ASEAN IndoPacific Forum* (AIPF), di Jakarta pada 5 - 6 September 2023	AIPF merupakan *flagship event* pada keketuaan Indonesia di ASEAN sebagai wujud implementasi konkret dari ASEAN *Outlook on Indo-Pacific* (AOIP). AOIP mengutamakan pendekatan dialog serta kerja sama terbuka dan inklusif di di kawasan Indo-Pasifik di bidang maritim, ekonomi, konektivitas, dan pemenuhan SDGs.	Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
7.	Pertemuan Tindak Lanjut I-EFTA CEPA, 24 Maret 2023	Program-program yang diusulkan RI-EFTA dalam memenuhi kepentingan bersama, diantaranya peningkatan kapasitas pengolahan makanan laut daya saing produk perikanan dan akses pasar dalam kerangka I-EFTA CEPA dan penguatan SDGS Indonesia melalui platform nasional mengenai standar keberlanjutan sukarela (*voluntary sustainability standards* / VSS)	Penyelenggaraan *International Fish Trade, Global Applicable Framework, and Market Access* di Jakarta pada 4-6 Juni 2024, kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Norwegia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat EFTA, *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan Infofish. Pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas dalam perdagangan internasional produk perikanan, antara lain: instrumen internasional perdagangan perikanan, preferential access produk perikanan dan akuakultur, akses pasar, legalitas dan produk perikanan.
8.	Fundraising BKKBN dengan HRH GKR Bendoro dengan tema '*Global Friendship for Prosperous Family: Zero Stunting for the Nation*', 9 Juni 2023	Partisipasi aktif Kemenlu pada kegiatan Fundraising BKKBN dengan HRH GKR Bendoro dengan tema *'Global Friendship for Prosperous Family: Zero Stunting for the Nation'*. Kegiatan ini merupakan forum pengumpulan dana sebagai bagian dari program percepatan penurunan stunting untuk mencapai target 14% pada 2024.	Pelaksanaan Fundraising BKKBN dengan HRH GKR Bendoro dengan tema '*Global Friendship for Prosperous Family: Zero Stunting for the Nation*', 9 Juni 2023
9.	*Lions Day with United Nations* di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Saharjo dengan tema 'Edukasi Stunting dan MPASI untuk Keluarga Baduta', 26 Agustus 2023	Partisipasi aktif Kemenlu pada kegiatan *Lions Day with United Nations* di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Saharjo dengan tema 'Edukasi Stunting dan MPASI untuk Keluarga Baduta'. Kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi dengan NGO dan PBB guna edukasi terkait stunting dan MPASI kepada setidaknya 100 orang yang terdiri dari kader, ibu hamil, dan keluarga yang memiliki bayi di bawah usia dua tahun (Baduta).	Pelaksanaan *Lions Day with United Nations* di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Saharjo dengan tema 'Edukasi Stunting dan MPASI untuk Keluarga Baduta', 26 Agustus 2023
10.	*20th International Inter-Ministerial Conference on South-South Cooperation in Population & Development* di Zimbabwe, 9-10 Oktober 2023	Partisipasi aktif Kemenlu dalam kegiatan 20th *International Inter-Ministerial Conference on South-South Cooperation in Population & Development* di Zimbabwe. Indonesia sebagai bagian dari *Executive Committee* pada PPD menghadiri pertemuan guna mendorong potensi Kerja Sama Selatan Selatan Triangular (KSST) untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kependudukan, termasuk isu *stunting*.	Mendorong peningkatan jumlah kegiatan dan pendanaan KSST di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia tahun 2023

No.	Forum Pertemuan	Prakarsa/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
11.	*Side Event* di sela-sela *Seventh Asian Pacific Conference* oleh Indonesia, Thailand, Malaysia dan Filipina di Thailand, 15 November 2023.	Partisipasi aktif Kemenlu dalam penyelenggaraan Side Event di sela-sela Seventh Asian Pacific Conference oleh Indonesia, Thailand, Malaysia dan Filipina di Thailand. Secara spesifik, Indonesia angkat tema *"Addressing Poverty, Stunting and Unmet Need for Family Planning in Indonesia, Multi-sector Convergence Approach Based on National Family Data"*	Menjadi referensi upaya penyempurnaan strategi pencapaian SDGs nasional.
12.	*Courtesy Call* dengan UNFPA Representative Indonesia, 11 Desember 2023	Partisipasi aktif Kemenlu dalam kegiatan *Courtesy Call Representative* UNFPA Indonesia dengan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, 11 Desember 2023. Pertemuan dilaksanakan guna memastikan koridor kerja UNFPA Indonesia sejalan dengan prioritas Pemerintah Indonesia dan *Country Program Action Plan* (CPAP) RI-UNFPA periode 2021-2025, termasuk dalam penanganan isu *stunting*, representatif UNFPA Indonesia tekankan komitmen keberpihakan UNFPA kepada Pemri dan akan berupaya mendorong potensi kerja sama, termasuk melalui KSST.	Pelaksanaan *Country Program Action Plan* (CPAP) RI-UNFPA periode 2021-2025, termasuk dalam penanganan isu stunting

2. Peningkatan Realisasi Investasi

1. **Peningkatan Investasi pada Infrastruktur Hijau dan Rantai Pasok**
   - Koordinator : Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
   - Pelaksana : TPPE, Direktorat Asia Tengah, Direktorat Kerja Sama ASEAN
   - Capaian Anggaran : 99,99%
   - Realisasi Output : 81 Potensi Kerja Sama senilai USD 11,700,000,000
2. **Peningkatan Investasi pada Transformasi Digital**
   - Koordinator : Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
   - Pelaksana : TPPE, Direktorat Asia Tengah, Direktorat Kerja Sama ASEAN
   - Capaian Anggaran : 99,99%
   - Realisasi Output : 8 Potensi Kerja Sama senilai USD 2,600,000,000
3. **Peningkatan Investasi pada Sustainable Financing**
   - Koordinator : Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
   - Pelaksana : TPPE, Direktorat Asia Tengah, Direktorat Kerja Sama ASEAN
   - Capaian Anggaran : 99,99%
   - Realisasi Output : 4 Potensi Kerja Sama senilai USD 729,900,000
4. **Peningkatan Realisasi Investasi pada Business Matching dan Promosi Investasi**
   - ***Business Matching*** : Komitmen investasi merupakan kesepakatan tertulis dengan negara mitra oleh Perwakilan RI dalam bentuk investasi *business matching*, pembukaan pasar potensial dan unggulan, forum kerja sama. Di tahun 2023, tercatat terdapat 471 Komitmen yang berhasil diperoleh Perwakilan RI.
   - **Realisasi Komitmen dari Wilayah Akreditasi Perwakilan RI :** Meningkatkan peranan guna memberikan kontribusi lebih intensif pada upaya peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia serta menjaring lebih luas investor untuk dapat menanamkan modal di Indonesia, Promosi Investasi dari seluruh Perwakilan RI terealisasi sebesar USD 36,941,000,000.
   - **Promosi Investasi :** Forum/ Kegiatan/ Pameran Investasi Internasional yang dilaksanakan Perwakilan RI dapat memberikan banyak informasi strategis kepada investor mengenai peluang investasi (*outbound* atau *inbound*) yang dapat dilakukan di Indonesia.
   - **Komitmen Investasi dalam Forum Multilateral :** Komitmen Jepang dalam melakukan investasi untuk mendukung proses transisi energi di Indonesia dalam rangka AZEC *Cooperation* dengan investasi senilai USD 500,000,000.

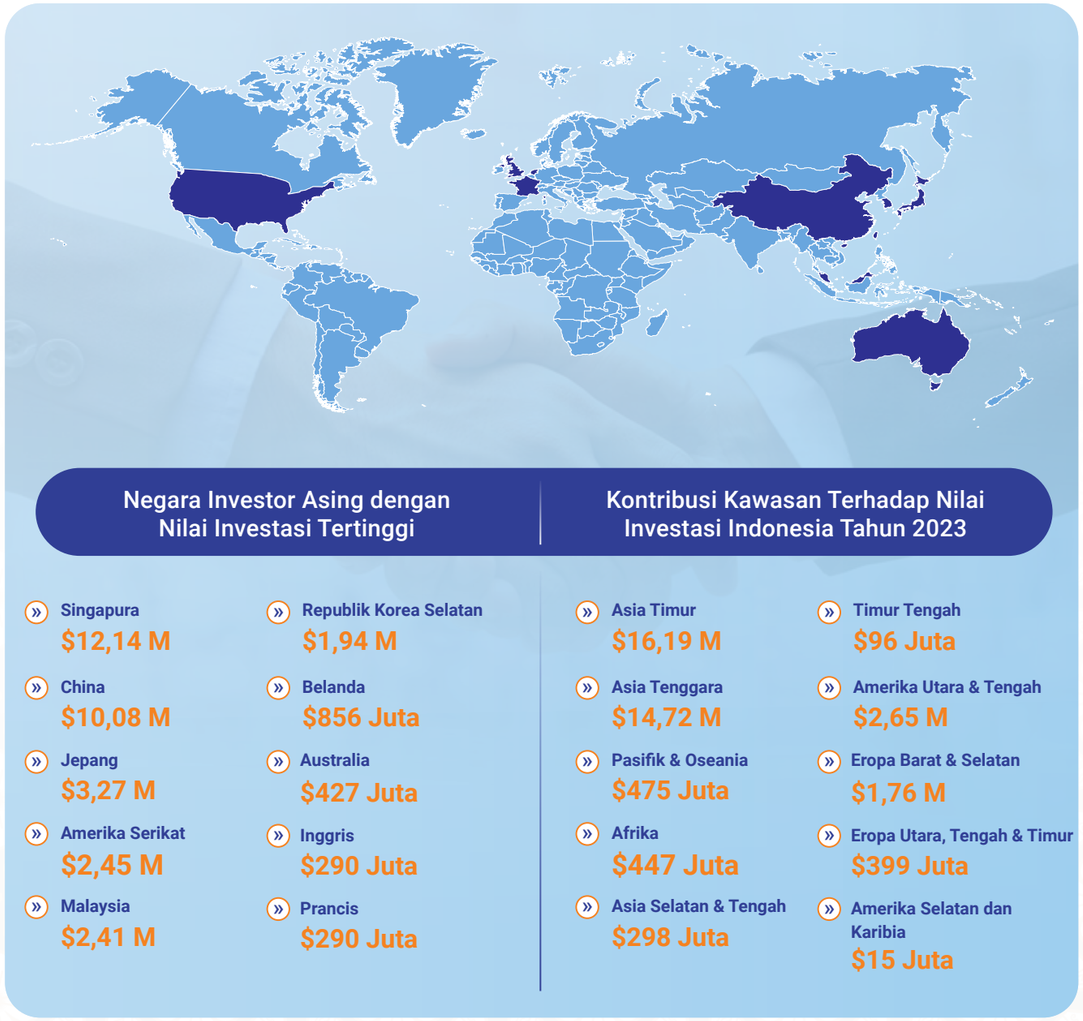

Negara Investor Asing dengan Nilai Investasi Tertinggi

- Singapura $12,14 M
- Republik Korea Selatan $1,94 M
- China $10,08 M
- Belanda $856 Juta
- Jepang $3,27 M
- Australia $427 Juta
- Amerika Serikat $2,45 M
- Inggris $290 Juta
- Malaysia $2,41 M
- Prancis $290 Juta

Kontribusi Kawasan Terhadap Nilai Investasi Indonesia Tahun 2023

- Asia Timur $16,19 M
- Timur Tengah $96 Juta
- Asia Tenggara $14,72 M
- Amerika Utara & Tengah $2,65 M
- Pasifik & Oseania $475 Juta
- Eropa Barat & Selatan $1,76 M
- Afrika $447 Juta
- Eropa Utara, Tengah & Timur $399 Juta
- Asia Selatan & Tengah $298 Juta
- Amerika Selatan dan Karibia $15 Juta

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

1. **Sistem Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri**
   - Portal Peduli WNI diluncurkan untuk memfasilitasi fitur Lapor Diri, Pelayanan Administrasi dan Persuratan, Penanganan Kasus dan berbagai pelayanan kekonsuleran secara *online*.
   - *Safe Travel* untuk WNI yang berpergian ke Luar Negeri bukan untuk menetap, aplikasi ini menyediakan informasi interaktif bagi WNI yang akan atau sedang berada di luar negeri, termasuk informasi negara, himbauan perjalanan, dan tombol darurat.

   Dengan adanya Portal Peduli WNI dan aplikasi *Safe Travel*, WNI di luar negeri dapat mengakses layanan dan informasi kapanpun dan dimanapun secara mudah, murah, aman, dan cepat. Platform digital ini memberikan berbagai manfaat bagi WNI di luar negeri, antara lain:
   - Kemudahan akses: WNI tidak perlu datang langsung ke Perwakilan RI.
   - Efisiensi biaya: Menghemat biaya transportasi, akomodasi, dan fotokopi dokumen.
   - Ketersediaan 24/7: Layanan dapat diakses kapanpun dan dimanapun.
   - Integrasi data: Memudahkan Kemlu dan Perwakilan RI dalam memberikan pelayanan dan perlindungan yang cepat dan tepat.

2. **Digital Layanan Data Diplomasi Ekonomi dan Administrasi** Pemerintahan
   - INA-Access : untuk business matching potensi pedagangan dan investasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI
   - Single Platform Diplomasi Ekonomi yang terintegrasi
   - SIM-SDM : pengelolaan sumber daya manusia
   - SIM-KEU: pengelolaan keuangan/anggaran
   - Kemenlu Sign terintegrasi dengan aplikasi Tanda Tangan Elektronik
   - AKSI Kemenlu: menilai capaian kinerja organisasi Unit Kerja Pusat dan Perwakilan

Indikator Keamanan

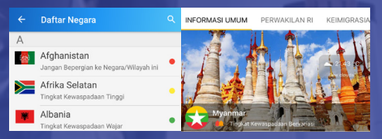

Indikator Keamanan menunjukan seberapa aman suatu negara/wilayah tersebut untuk dikunjungi.

Indikator Keamanan **dapat didiversifikasi** sesuai wilayah, provinsi, negara bagian, apabila terdapat wilayah yang berbeda statusnya di satu negara yang sama.

Asesmen Indikator Keamanan dikelola oleh Clearing House yang terdiri dari K/L/I terkait: Kemlu, BIN, BAIS, Kemenkes, BNPT

Kebijakan Visa

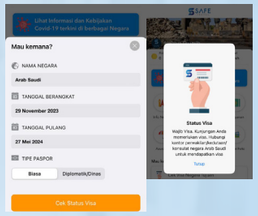

Kebijakan visa di seluruh negara/wilayah di dunia berdasarkan jenis dokumen perjalanan baik paspor biasa, dinas, maupun diplomatik yang akan digunakan.

Tombol Darurat

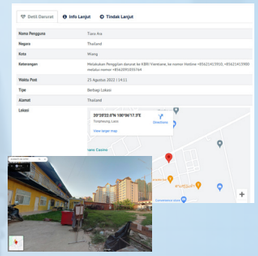

- Menghubungkan pengguna dengan Perwakilan RI terdekat.
- Push email ke Perwakilan RI.
- Fasilitas Google Street View pada dasbor operator Pusat dan Perwakilan RI ->mempermudah Perwakilan RI untuk upaya quick response.

FITUR BARU SAFE TRAVEL

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Sari

Sahabat Artifisial migRan Indonesia

Chatbot berbasis kecerdasan buatan yang ditujukan untuk Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, khususnya perempuan, untuk memperoleh informasi atau mengadukan suatu permasalahan di luar negeri secara lebih cepat, mudah, dan efektif. Sari merupakan hasil kerjasama Kemlu dengan UN Women.
Sari dihibahkan sepenuhnya ke Kemlu.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

UN WOMEN

Integrasi Electronic Customs Declaration

Integrasi Safe Travel dengan layanan ECD Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna Safe Travel dapat mengakses ECD dari aplikasi Safe Travel dan data diri serta data perjalanan pengguna Safe Travel akan terisi otomatis pada isian ECD. Integrasi tersebut tertuang pada naskah Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Bea Cukai, Ditjen Protkons, dan BP2MI

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

4. Kebijakan Aktual Presiden pada Pengendalian Inflasi

- Tahun 2022 - Dokumen *ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan* 2023 - 2027 didorong untuk diadopsi dalam *ASEAN Post Ministerial Conference* (10+1)
  Realisasi Anggaran : Rp 1,319,873,000
  Capaian Anggaran : 96,13%
  Realisasi Output : 1 Prakarsa
  Koordinator : Ditjen Kerja Sama Multilateral dan Ditjen Kerja Sama ASEAN
  Pelaksana : Ditjen Kerja Sama Eksternal ASEAN dan Dit Kerja Sama Ekonomi ASEAN
  Indikator : Tingkat Efektivitas Dukungan Diplomasi dalam Pengendalian Inflasi
- Tahun 2023 - Kemenlu mendukung Mekanisme Ketahanan Ekonomi Kawasan dan Global (Forum multilateral dan ASEAN dengan menjaga stabilitas keuangan kawasan Asia Tenggara, Konektivitas Pembayaran, Transaksi Mata Uang Lokal di ASEAN.
  Norm-Setting pada forum Multilateral:
  a. Upaya terkoordinasi dalam rangka menstabilkan pasar global dan mengatasi ketidakseimbangan ekonomi
  b. Menyuarakan kebutuhan financing dan investasi bagi negara berkembang
  c. Menyuarakan *Right to Development* (Hak atas Pembangunan) di berbagai forum multilateral
  d. Mendorong Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Bilateral & Multilateral
  e. Menyuarakan sistem pendanaan khususnya arsitektur dan restukturisasi utang yang lebih adil
  Realisasi Anggaran : Rp 92,214,890,000
  Capaian Anggaran : 99,91%
  Realisasi *Output* : 10 Prakarsa
  Koordinator : Ditjen Kerja Sama Multilateral dan Ditjen Kerja Sama ASEAN
  Pelaksana : Ditjen Kerja Sama Eksternal ASEAN dan Dit Kerja Sama Ekonomi ASEAN
  Indikator : Tingkat Efektivitas Dukungan Diplomasi dalam Pengendalian Inflasi
- 10 prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di forum regional maupun multilateral terkait upaya menjaga stabilitas ekonomi kawasan dan global, yang terdiri dari:
  1. 2 (dua) Prakarsa/rekomendasi terkait konektivitas pembayaran dan transaksi mata uang lokal di ASEAN pada KTT ASEAN ke-42 (10-11 Mei 2023) dan KTT ASEAN ke-43 (5-7 September 2023), yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di dalam negeri a.l. dalam bentuk:
     » Penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra, antara Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS. (5 September 2023).
     » Peresmian implementasi interkoneksi pembayaran QR antara Indonesia (Bank Indonesia) dengan Singapura (*Monetary Authority Singapore*), pada tanggal; 17 November 2023.

  2. 8 (delapan) Prakarsa/rekomendasi dalam sejumlah forum G20, COP 28 dan *Climate Ambition Summit* terkait pengembangan ekonomi hijau maupun transisi energi, termasuk kerangka pembiayaan, yang diharapkan tidak berdampak pada kenaikan inflasi melainkan justru mendorong stabilitas ekonomi; telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di dalam negeri a.l. dalam bentuk:
     » Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon
     » Peraturan Menteri Keuangan No 103/ 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan
     » Penerbitan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia oleh OJK pada Februari 2024.

5. Kebijakan Aktual Presiden dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Promosi Produk Dalam Negeri melalui hibah/kerja sama teknik
   Kemenlu turut mendorong penggunaan produk-produk Indonesia dalam hibah Pemerintah RI kepada negara sahabat. Beberapa produk dalam negeri yang telah dimanfaatkan dalam proses pemberian hibah antara lain produk farmasi dan alat Kesehatan, vaksin dan transportasi. Dalam kurun waktu 2020-2024, setidaknya telah dilakukan pemberian hibah yang melibatkan produk Indonesia dalam 7 (tujuh) hibah dengan nilai sebesar Rp. 59.744.667.966,000.
2. Promosi Perdagangan (ekspor) produk unggulan Indonesia di Luar Negeri
   Kemenlu terus melakukan strategi penguatan diplomasi secara berkesinambungan guna mendukung performa ekspor nasional, melalui promosi produk-produk unggulan di luar negeri. Langkah tersebut tentunya juga dilaksanakan dalam rangka mendukung agenda nasional dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri guna menopang industri nasional. Pada tahun 2023, upaya Kemenlu dan Perwakilan RI dalam melakukan promosi, fasilitasi dan akselerasi ekspor, berhasil merealisasikan 381 komitmen perdagangan dengan negara mitra dengan nilai USD 36 miliar. Capaian tersebut meningkat signifikan dibanding pencapaian tahun 2022 yaitu 234 komitmen perdagangan dengan nilai USD 6,3 miliar

Komitmen Ekspor Produk Unggulan Indonesia Tahun 2023

No.	Jenis Produk Dalam Negeri	Jumlah Komitmen	Keterangan
1.	Makanan dan Minuman	102	Termasuk rempah-rempah
2.	Ekonomi hijau	100	Produk Pertanian, Peternakan dil
3.	Mesin dan Bahan baku Industri	46	
4.	*Home goods*	31	*Furniture, houseware* dan lain-lain
5.	Ekonomi Kreatif	29	Produk fesyen, *software* dil
6.	Alat Kesehatan dan Farmasi	20	
7.	Industri Strategis	12	Alat pertahanan dan energi dil
8.	Kecantikan dan Perawatan Diri	10	
9.	Transportasi dan Logistik	10	
10.	Otomotif	9	
11.	Produk lainnya	12	
.	**Total**	**381**	

3. Promosi Produk dalam negeri unggulan Indonesia melalui Platform Digital Ina-Access
   Kolaborasi promosi antar pemangku kepentingan nasional juga didukung dengan inovasi digital yang dilakukan Kemenlu. Melalui website **www.ina-access.com**, Kemenlu memfasilitasi kerja sama para pelaku usaha dengan lebih terarah. Kedepan website ini diproyeksikan menjadi portal perdagangan Indonesia dengan seluruh negara mitra dari berbagai kawasan. Utilisasi Ina-Access diperkuat dengan penyelenggaraan forum-forum bisnis berorientasi kawasan, seperti *Indonesia-Europe Business Forum* (IEBF) dan *Indonesia-Latin America and the Caribbean Business Forum* (INA-LAC BF).

   Pada tahun 2023, website website INA-ACCESS berhasil menjadi platform digital bagi total 1.055 perusahaan yang terdaftar sebagai Exhibitor dengan total 5.358 produk yang dipamerkan dari berbagai sektor.
   - Terdapat 1.206 akun visitor terdaftar. Platform digital INA-ACCESS juga tercatat telah diakses dalam 11.306 sesi yang terbagi dalam 26.610 tayangan halaman oleh 8.425 pengguna dari 145 negara/entitas.
   - INA-ACCESS juga dimanfaatkan untuk promosi 10+1 destinasi wisata prioritas Indonesia, serta lebih dari 150 proyek investasi Indonesia (bekerja sama dengan BKPM dan Bank Indonesia).

4. Optimalisasi Penggunaan Belanja PDN pada Belanja Kemenlu
   Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri, diantaranya melalui penerbitan 13 (tiga belas) etalase katalog sektoral Kemenlu, dimana satu diantaranya adalah etalase "Galeri Nusantara" yang menampung produk khas Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh Satker Perwakilan RI di luar negeri untuk mempromosikan produk khas Indonesia di luar negeri. Selama 2023, tercatat 4.127 produk tayang pada katalog sektoral Kemenlu, dimana 98,8% produk listing tersebut merupakan produk dalam negeri. Adapun transaksi pada katalog sektoral Kemenlu tersebut di tahun 2023 mencapai Rp 50,03 Milyar.

   Berdasarkan catatan LKPP, total perencanaan PDN Kemenlu pada tahun 2023 (exclude belanja pengadaan Satker Perwakilan RI di luar negeri) adalah sebesar Rp 494,1 Milyar atau 76,38% dari pagu belanja pengadaan Satker Pusat Kemenlu sebesar Rp 896,8 Milyar. Adapun tingkat realisasi PDN terhadap komitmen PDN mencapai 81,60% atau sebesar Rp 558,9 Milyar.

Data Hibah Dan Bantuan Kemanusiaan Berupa Produk Dalam Negeri Serta Kerja Sama Lainnya Tahun 2023

No.	Negara Penerima	Jenis Produk Dalam Negeri	Nilai /Jumlah
Hibah			
1.	Nigeria	Vaksin Pentavalen produksi Bio Farma.	1.580.000 dosis vaksin pentavalen (senilai 14,9 miliar Rupiah)
2.	Afghanistan	Vaksin Polio bOPV produksi Bio Farma.	10 juta dosis
3.	Vanuatu	Pendanaan, pengerjaan dan pengadaan bahan material rekonstruksi ruang VIP Bandara Internasional Bauerfield di Port Vila, Vanuatu.	28 miliar Rupiah
4.	Sekretariat MSG	Kendaraan roda empat jenis SUV	2 buah kendaraan produksi Indonesia senilai 2,1 miliar Rupiah
Bantuan Kemanusiaan			
1.	Palestina	Bantuan dari filantropi dan Pemerintah RI pada tanggal: 1. 4 - 5 November 2023: Bahan makanan, peralatan medis, selimut, tenda dan barang-barang logistik lainnya. 2. 20 dan 22 November 2023: Obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, makanan, dan barang logistik lainnya	1. 4 - 5 November 2023: 50,8 ton 2. 20 dan 22 November 2023: 39,6 ton, senilai 31,9 miliar Rupiah.
2.	Palestina	Bantuan Pemerintah RI berupa obat, *medical sundries*,makanan, tenda, pakaian, selimut dan keperluan medis darurat penanganan trauma fisik, melalui *Palestinian Red Crescent* dan UNRWA.	90,4 ton.
3.	Suriah	Makanan, pakaian tebal, selimut dan berbagai kebutuhan musim dingin yang diangkut menggunakan 2 pesawat terb.	75 juta ton
4.	Sudan	Bantuan medis yang disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI)	

No.	Negara Penerima	Jenis Produk Dalam Negeri	Nilai /Jumlah
5.	Libya	Barang-barang kebutuhan dasar korban banjir seperti tenda, pakaian, selimut, makanan tambahan ibu dan balita, disinfektan, obat, dan perlengkapan medis	46 ton senilai lebih dari 13,9 miliar Rupiah
6.	Vanuatu	1. Tenda, generator, velbed, hygiene kit dan pakaian. pada 9 Mei 2023. 2. Produk makanan buatan Indonesia seperti mie instan dan biskuit.	1. Bantuan Pemerintah RI senilai 8,2 Miliar Rupiah 2. Bantuan KBRI Canberra senilai USD 10.000
7.	Myanmar	1. 24 Juni 2023: terpal, tenda kanvas, tenda keluarga, makanan instan, perlengkapan alat kesehatan, selimut, matras, dan generator 2. Bantuan melalui AHA Center (AHAC) Desember 2023: bahan pangan pokok (rice, oil, beans).	1. 24 Juni 2023: berat 45 ton senilai sebesar 7,7 miliar Rupiah 2. Desember 2023: USD 250.000
Kerja Sama Lainnya			
8.	Iran	1. Pada triwulan II tahun 2023, Kerja sama PT Meditech Indonesia (anak perusahaan Meditech Iran) dan PT Indofarma di pabrik PT Indofarma untuk memproduksi alat telemedicine yang telah mencapai 200 unit dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 49% sebagai tindak lanjut LoI Kerja sama Telemedicine RI-Iran. Dalam prosesnya, Kemenlu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, diantaranya Kementerian Kesehatan, PT Meditech Indonesia dan PT Indofarma.	200 unit alat telemedicine, 49% TKDN

Dokumentasi

Gambar III.56. Kehadiran Presiden RI, Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 (Rio De Janeiro, Brazil, 18 November 2024).

Gambar III.57. Kehadiran Menteri Luar Negeri, Sugiono dalam G-7 *Foreign Affairs Ministers Meeting Outreach Session With Indo-Pacific Partners* (Fiuggi-Anagni, Italia, 25-26 November 2024).

Gender sebagai salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 (Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020) dan terintegrasi dalam beberapa Bab di RPJMN 2020-2024. "Gender" juga masuk sebagai salah satu Goal dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan tujuan ke 5: Kesetaraan Gender.

Dalam menjalankan pengarusutamaan sesuai dengan RPJMN 2020-2024, Kementerian Luar Negeri telah membuat Peraturan Menteri Luar Negeri No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Di dalam Permenlu tersebut mengatur hal terkait:

1. Maksud dan Tujuan
   Sebagai pedoman organisasi dalam penerapan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

2. Perencanaan
   Adanya norma pengarusutamaan gender yang saling terkait mulai dari rencana jangka menengah sampai rencana kerja yang nyata menjadi kegiatan organisasi Kemenlu. Kementerian Luar Negeri dapat bekerjasama dengan pihak lain yang dianggap kapabel untuk melakukan análisis perencanaan.

3. Pelaksanaan
   Mengatur lembaga Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kemenlu, mulai dari susunan keanggotaannya beserta tugas-tugas yang diberikan kepada kelompok kerja PUG.

4. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
   Mengatur mekanisme pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kemenlu.

5. Pendanaan
   Mengatur anggaran pelaksanaan PUG yang dapat berasal dari Unit Organisasi terkait.

Sebagai implementasi Perpres No. 18 Tahun 2020 dan Permenlu No. 21 Tahun 2020 terkait pengarusutamaan gender. BPO selaku Manajer Kinerja Organisasi Pusat (MKOP) telah menghimbau agar seluruh unit organisasi melakukan *tagging* Anggaran Responsif Gender (ARG) pada masing-masing DIPA TA 2024 unit organisasi di lingkungan Kemenlu.

Pengarusutamaan Gender di dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 dan rancangan awal RKP 2025 tersaji pada tahap pertama penguatan fondasi transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan agenda pembangunan kesetaraan gender yang memiliki indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Terdapat revitalisasi instrumen dalam pengintegrasian penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender yaitu:

Semula	Revisi
Perencanaan: 1. GAP 9 Langkah 2. Digunakan untuk perencanaan tahunan 3. Pusat: sebagai bahan penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) di level RO di Renja K/L dan RKA K/L	**Perencanaan:** 1. GAP 4 Langkah digunakan untuk perencanaan Lima Tahunan 2. Pusat: sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan responsif gender lima tahunan
Penganggaran: Dokumen Anggaran Responsif Gender mencakup: 1. RKA-KL 2. *Gender Budget Statement* (GBS) 3. TOR/KAK	**Penganggaran:** Dokumen Anggaran Responsif Gender mencakup: 1. RKA-KL 2. *Gender Action Budget* (GAB) berisi informasi di GBS dan KAK (simplifikasi dokumen)

Revitalisasi pengarusutamaan gender akan dilaksanakan pada seluruh tahapan pembangunan yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.

Untuk itu, di Tahun 2024. Sesuai dengan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-346/MK.02/2024, B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025 serta PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

BPO sebagai MKOP telah menghimbau agar seluruh unit organisasi melakukan *tagging* ARG dengan mengikutsertakan dan memfasilitasi Tim Pokja PUG dalam Kegiatan Bimtek Penyusunan Renja dan RKA-K/L Perwakilan RI TA 2025 sebagai *reviewer* dalam penyusunan *Gender Action Budget* (GAB) dan tagging ARG dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada unit organisasi masing-masing serta menghimbau unit organisasi Pusat dan Perwakilan RI untuk menyajikan capaian kegiatan yang mengusung PUG di Laporan Kinerja tahun 2024 masing-masing unit organisasi.

Kearsipan

Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan, Biro Perencanaan dan Organisasi selaku unit pengolah yang mengelola arsip unit organisasi berhasil mencapai predikat Nilai AA (Sangat Memuaskan) dalam Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024, dengan komposisi nilai tertinggi pada Sumber Daya Kearsipan (SDM serta Prasarana dan Sarana Kearsipan) dan diikuti nilai tertinggi selanjutnya pada penggunaan arsip, penyusutan arsip, penciptaan arsip dan pemeliharaan arsip. Penghargaan ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan. Sebagai wujud perbaikan keberlanjutan, BPO akan berusaha memperbaiki proses pengarsipan dokumen di tahun berikutnya.

Penutup

04

Simpulan Umum Capaian Kinerja

Pada Tahun 2024 nilai capaian kinerja BPO sebesar 106,25 (Istimewa) yang didapat dari nilai masing-masing perspektif

Jika dilihat dari perolehan skor perspektif NCKO BPO, rata-rata BPO memperoleh skor di atas 100 untuk 3 (tiga) perspektif yaitu:

Stakeholder Perspektif : Dimana BPO dinilai mampu dalam memenuhi harapan *stakeholder* (pemangku kepentingan) baik dari pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari BPO, namun tidak menggunakan layanan BPO secara langsung.

Internal Business Process Perspektif: Dimana BPO dinilai mampu dalam mewujudkan rangkaian proses yang dikelola BPO dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer.*

Learning and Growth Perspektif: Dimana BPO dinilai mampu dalam melakukan perbaikan dan penguatan sumber daya internal, seperti: sumber daya manusia, penggunaan anggaran yang efisien dan akuntabel, pengelolaan kinerja serta pengawasan yang mampu mengoptimalkan proses bisnis utama BPO.

Adapun untuk skor ***Customer Perspektif*** masih dibawah 100 merupakan tantangan bagi BPO untuk dapat meningkatkan harapan dari pengguna layanan yang berkaitan langsung dengan pelayanan BPO.

Kendala-Kendala Utama yang Dihadapi

Selama tahun 2024, BPO menghadapi sejumlah kendala dan tantangan dalam menghadapi target kinerja, yaitu:

Kesiapan Unit Organisasi menjadi Unit Lokus dan Partisipasi Pembangunan Zona Integritas	Tantangan dalam kesiapan Unit Organisasi Pusat dan Perwakilan RI untuk menjadi Unit Lokus Evaluasi, partisipasi dalam pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Penyampaian Dokumen SAKIP	Belum seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenlu menyampaikan dan menggugah dokumen SAKIP sesuai standar dan tepat waktu dengan analisis yang memadai.
Penyusunan Dokumen SPIP dan MR	Belum seluruhnya Tim Satuan Tugas (Satgas) unit organisasi di lingkungan Kemenlu memiliki *awareness* terkait pengendalian dan manajemen risiko.
Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	BPO sebagai koordinator dalam perencanaan dan evaluasi kinerja, penataan organisasi dan tata kerja, penataan tata laksana dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta layanan Manajemen, telah melakukan pendampingan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenlu dalam penyusunan dokumen kinerja dan anggaran, penyusunan program kegiatan Reformasi Birokrasi serta penyusunan dokumen SPIP MR secara intensif. Namun demikian, terdapat *deadline* dari pihak eksternal (*stakeholder*) yang cukup singkat dan diluar dari kalender perencanaan yang mengakibatkan permintaan/ penginputan/ pengumpulan data/ dokumen harus dipercepat. Hal tersebut mempengaruhi kepuasan dari penerima layanan BPO.
Mekanisme Alur dan Proses Perencanaan Anggaran	Belum seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenlu memahami mekanisme alur dan proses perencanaan anggaran secara utuh di masing-masing unit organisasi, sehingga diperlukannya perbaikan atau revisi anggaran pada unit organisasi bersangkutan.

Langkah di Masa Mendatang untuk Peningkatan Kinerja

Pada tahun 2025, BPO akan terus meningkatkan kualitas kinerja antara lain:

Penguatan indikator Reformasi Birokrasi

Menjadi Tim Penilai Internal (TPI) di semua indikator kinerja RB, mengkoordinasikan 7 (tujuh) Unit Pelayanan Publik (UPP) guna memenuhi parameter indeks pelayanan publik, internalisasi terkait RB General dan RB Tematik, berkoorrdinasi dengan Tim Penilai Nasional dan Instansi Meso serta mengkompilasi pengisian portal RB dan Survei Kepuasan Masyarakat setiap triwulan.

Penyusunan Dokumen SAKIP

Senantiasa berkoordinasi dengan unit organisasi dalam melakukan identifikasi sasaran beserta indikator kinerja yang mendukung dan berkontribusi atas pencapaian sasaran nasional pada RPJMN 2025-2029. Selain itu, memberikan pemahaman dalam menyamakan persepsi terkait dokumen SAKIP dengan evaluator di lingkungan Kemenlu.

Penguatan SPIP dan MR

Penguatan SPIP di lingkungan Kemenlu dengan melakukan bimtek dan monitoring pelaksanaan SPIP secara mendalam per triwulan dan merevisi Permenlu No. 2 Tahun 2018 serta Permelu No. 10 Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Kepala Badan BPKP terbaru.

Peningkatan Pelayanan Biro Perencanaan dan Organisasi

Sebagai salah satu peningkatan pelayanan BPO dalam pendampingan penyusunan dan evaluasi dokumen kinerja dan anggaran, penyusunan program kegiatan Reformasi Birokrasi serta penyusunan dokumen SPIP MR dan pelayanan analisa terkait penataan kelembagaan. Kedepannya, BPO akan membuat videografis dan *update* panduan tata cara pengoperasian aplikasi serta materi bimtek untuk peningkatan pemahaman terkait ketata laksanaan kelembagaan, organisasi serta kinerja dan anggaran satuan organisasi di lingkungan Kemenlu.

Mekanisme Alur dan Proses Perencanaan Anggaran

Memberikan pemahaman tentang struktur anggaran dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang baru.

INFRASTRUKTUR DIPLOMASI KUAT
untuk **DIPLOMASI HEBAT**

Laporan Kinerja

Biro Perencanaan & Organisasi

Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10110 Indonesia
Telp (+62) 21 344 1508

www.kemlu.go.id